

CARA PANDANG

Inspirasi Terkini!

Edisi Maret 2022

INVESTASI BOLEH, RUGI JANGAN!

TRADING FOREX
DIBENCI, TAPI DINANTI

DAMPAK EKONOMI GLOBAL
PERANG RUSIA-UKRAINA

CATATAN UNTUK CALON
IBU KOTA BARU

Salah satu jenis
trading forex
terpercaya dan
memiliki track record
baik adalah DIDIMAX



9 772746 105042

PLATFORM **CARA PANDANG**.com

Inspirasi Terkini!

Carapandang.com hadir dalam wujud multimedia dengan konten yang tidak hanya berupa teks dan foto, tetapi juga videografis, infografis, majalah online dan podcast.

Melalui **Carapandang.com**, khalayak diharapkan mendapatkan banyak informasi terkini dan terinspirasi.

Telah Tersedia di Play Store



DAFTAR ISI

TAJUK

MENUNDA PEMILU 5

LAPORAN UTAMA

**TRADING FOREX DIBENCI,
TAPI DINANTI 9**

**INDRA KENZ, DONI SALMANAN
DAN JERAT FOREX BODONG 12**

**MEMILIH TRADING
FOREX YANG TEPAT 14**

**MISS CENLI YANI, TRADING ANALYST DIDIMAX
INVESTASI BOLEH, RUGI JANGAN! 16**

LAPORAN KHUSUS

**CATATAN UNTUK CALON
IBU KOTA BARU 22**

TERGESA-GESA BERPINDAH IBU KOTA 26

PENDIDIKAN

BELAJAR.ID,

WUJUD DIGITALISASI PENDIDIKAN 28

**TIADA IPA-IPS DALAM
KURIKULUM MERDEKA 30**

**PRAKTIK GURU GUNAKAN
PLATFORM MERDEKA BELAJAR 32**
**POLITIK LOKAL MEMENGARUHI
KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAERAH 36**

HUKUM

**MEMPERTANYAKAN KEADILAN
UNTUK PEKERJA 38**

**ANGIE BEBAS PASCA TERJERAT
PROYEK WISMA ATLET 40**

POLITIK

DPP IMM:

**PENUNDAAN PEMILU
MENCIDERAI KONSTITUSI 42**

**MANUEVER PERPANJANGAN
MASA JABATAN PRESIDEN 44**

WAWANCARA KHUSUS

**POEMPIDA HIDAYATULLAH,
DARI JHT, PAK JOKOWI, HINGGA IKN 48**

INTERNASIONAL

**DAMPAK EKONOMI GLOBAL
PERANG RUSIA-UKRAINA 52**



LAPORAN UTAMA

KELAS MENENGAH, INVESTASI DAN PEMULIHAN EKONOMI 6

Seperti pasukan elit dalam sebuah regu pertempuran, kelas menengah di Indonesia memiliki peran penting dalam membangun dan menjaga kaki-kaki ekonomi di Indonesia.

**PP MUHAMMADIYAH DESAK
RUSIA-UKRAINA LAKUKAN
GENCATAN SENJATA 56**

**FOREIGN MINISTERS ASEAN RETREATS'
2022
KOLEKTIFITAS ASEAN DI
PANGKAL 2022 58**

OPINI

**KONFLIK MOSKOW-KIEV DAN
KERAPUHAN EKONOMI 60**

**PENUNDAAN PEMILU DAN
WAJAH REPRESIF PEMERINTAH 62**

RESENSI

**TEROR, CINTA DAN
PERDAMAIAN 64**

SAVANA, ADA APA DI SANA? 66

BUDAYA

**MEMIKAT EKSPATRIAT
DENGAN SUARA ANGKLUNG 68**

BAHASA

INTRIK LOGIKA PENGUSAHA 70

ARTIS

**PESAN CHRISTIANO
RONALDO UNTUK PERANG
RUSIA-UKRAINA 72**

KOLOM

**MEDIA SOSIAL DAN
IRONI LITERASI KITA 74**

**ARTIS
"SAYA MENDUKUNG
TANAH AIR SAYA"
73**



Menunda Pemilu, Melanggar Hukum

Wacana penundaan Pemilu 2024 bergulir luas yang didukung PKB, PAN, dan Golkar. Wacana ini banyak ditolak oleh sejumlah tokoh dan masyarakat biasa. Selain itu sebanyak 8 LSM membuat petisi menolak penundaan Pemilu 2024. Mereka menganggap penundaan pemilu sebagai pelanggaran hukum tertinggi di negeri ini.

Isu ini bertentangan dengan Konstitusi negara. Sebab dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan jabatan Presiden dan Wakil Presiden diemban selama 5 tahun dan hanya sampai dua periode. Namun nyatanya, para elite partai DPR malah memperluas dukungan agar dapat mengubah konstitusi pemilu berkala dan pembatasan masa jabatan presiden.

Hemat saya, penundaan pemilu bakal berdampak serius yakni kevakuman kekuasaan di berbagai level. Konsekuensinya, begitu jabatan berakhir, maka jabatan-jabatan kenegaraan harus diisi dengan pemilu juga harus berakhir. Para pejabat mulai dari presiden, hingga anggota DPRD tidak bisa melaksanakan jabatan kembali. Jika itu terjadi khawatir terjadi tindak anarki dari masyarakat karena ada kekosongan hukum.

Imroatus Solihah

(Pemerhati hukum dan tinggal di Malang)

MENAG KEMBALI BIKIN GADUH



Pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumus yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing menuai protes dari berbagai kalangan. Mulai dari MUI hingga anggota DPR RI.



Bahkan Menag dilaporkan ke Polisi oleh Pakar Telematika Roy Suryo akibat ucapannya. Roy Suryo melaporkan Menag dengan dugaan ITE dan pasal penistaan agama.



Ketua MUI Pusat KH. Cholil Nafis menilai apa yang diucapkan oleh Menag Yaqut tidak pantas sebab membandingkan sesuatu yang suci dan suara hewan yang najis.



Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah kadang malas berkomentar soal membandingkan sesuatu yang suci dan baik dengan suara hewan najis mughallazah. Karena itu bukan soal kinerja tapi soal kepantasan di ruang publik oleh pejabat publik. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan melindungi kita semua.



KH. Cholil Nafis
Ketua MUI



Pernyataan Menag yang mensejajarkan kumandang azan dengan gonggongan anjing sebagai pernyataan tidak bijak dan hanya memancing kegaduhan. Kita memahami ada sensitivitas di kalangan umat Islam tentang hal-hal yang terkait dengan agama, maka pilihan diksi dan contoh-contoh kejadian dalam komunikasi publik para pejabat negara mesti hati-hati.



Arsul Sani
Anggota DPR RI Fraksi PPP



Suara azan yang begitu indah dan bermakna menjadi semacam budaya di Indonesia. Dikumandangkan dari masjid dan musala sebanyak lima kali sehari dengan durasi 1 hingga 1,3 menit. Tentunya tidak bisa disamakan dengan suara apa saja, apa lagi dianggap sebagai suara yang mengganggu.



Sufmi Dasco Ahmad
Wakil Ketua DPR RI

DATA: BERBAGAI SUMBER RISET: TIM GRAFIS: OBIE



Majalah Cara Pandang

Dewan Pembina: Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed, Faozan Amar

Pemimpin Perusahaan : Zulfikar Rachman **Penanggujawab:** Michael Malik, Mahmud Marhaba **Pemimpin Redaksi :** Nafik Muthohirin **Redaktur Pelaksana :** Amir Fiqi, Zainal Arifin **Redaktur :** Robby Firmansyah, Habibi Khasim, Ridwan **Desain Grafis :** Hengki, Soki Rahman Wardi, Taqi khana **IT :** Zulfikar Iskandar **Fotografer :** Robby Firmansyah, Jirga **Reporter :** Ika, Amir, Edi, Afi, Marshal, Malik, Ridwan, Zildan Syauqi **Sirkulasi:** Syifa Chairul Hidayat

Alamat Redaksi

Jalan Pulo Ribung Rukan Rose Garden Boulevard No. 85-87 Kota Bekasi 17147 Telp (021) 82760392 dan (021) 21383521 email: redaksi@carapandang.com

Majalah Cara Pandang menerima kiriman artikel opini dan rubrik-rubrik lainnya, tak terkecuali rubrik bahasa. Panjang tulisan mencapai 1.000-1.200 kata, spasi satu, times new roman, disertai pas foto terbaru, nama lembaga/institusi, alamat email, kontak person dan nomor rekening. Artikel dapat dikirim melalui alamat redaksi

MENUNDA PEMILU

Tidak ada angin dan hujan, tiba-tiba Cak Imin, sebutan akrab Muhaimin Iskandar, mewacanakan penundaan Pemilu hingga 2027. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu beralasan situasi ekonomi nasional masih sulit sekarang ini, ditambah dengan wabah Covid19 yang belum kunjung membaik. Tak butuh waktu lama, diskursus itu mendapat dukungan dari sejumlah koleganya yang tergabung dalam partai koalisi pemerintah, di antaranya Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Ide yang dikemukakan Cak Imin tersebut mendapat tanggapan serius. Faktor ekonomi melemah dan pandemi segera terpatahkan. *Toh*, ekonomi nasional tak benar-benar mengalami pelemahan. Justru sejumlah ekonom memprediksi tahun depan ekonomi dalam negeri akan membaik. Pun demikian, meski Covid-19 tak mungkin hilang sepenuhnya, tapi geliat aktifitas sosial-ekonomi masyarakat tak akan berhenti seperti pada Masa awal virus ini menyerang.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) dalam rilis terbarunya bertajuk “Sikap Publik terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan Presiden” melaporkan, hanya 24,1 persen masyarakat yang setuju perpanjangan jabatan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan ekonomi akibat Pandemi. Mayoritas masyarakat atau sebanyak 68,1 persen tidak setuju dan meminta Jokowi mengakhiri jabatannya pada 2024.

Meski survei yang dirilis pada Kamis (3/3) itu menyebut kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi, namun publik lebih memilih supaya pemerintah Indonesia konsisten dengan aturan konstitusi yang mengatur jabatan presiden selama 5 tahun dan bisa tambah satu periode

melalui pemilu.

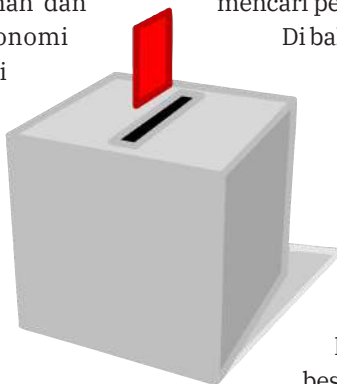
Dengan demikian, suara publik sesungguhnya menghendaki pergantian presiden tetap pada 2024 dan dilakukan melalui pemilu. Sebab, jika *ngotot* diperpanjang tanpa proses pemilu, itu sama halnya dengan menciderai demokrasi. Perilaku sejumlah elite politik yang demikian itu sama seperti mengingkari konstitusi.

Presiden Jokowi dalam pernyataannya yang dimuat sejumlah media nasional menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu seperti menampar mukanya. Jika tidak demikian, berarti pihak-pihak yang mengusulkan ide tersebut ingin mencari perhatian darinya.

Di balik isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan yang dilempar ke publik menandakan sejujurnya elit politik lebih mementingkan kemauannya sendiri. Faktanya mayoritas publik tidak menyetujuinya. Jika penundaan ini dialamatkan untuk realisasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru atau pemulihan ekonomi pasca kritis, maka itu akan menjadi pekerjaan besar bagi presiden selanjutnya.

Hanya saja, publik sudah jamak tahu, bahwa pernyataan Jokowi tidak selalu sesuai dengan tindakan. Seperti pada awal kepemimpinannya di periode kedua yang ingin menguatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tapi realitasnya justru dia juga yang melemahkan lembaga antirasuah tersebut melalui revisi undang-undang KPK.

Jadi, sebagai rakyat kecil, kita bisa menilai sikap presiden ini apakah benar-benar jujur dari dalam hati ingin menegakkan demokrasi dan konstitusi nasional atautkah hanya “pemanis di bibir” saja supaya masyarakat tetap diam! **Nafik Muthohirin**



KELAS MENENGAH, INVESTASI DAN PEMULIHAN EKONOMI

Seperti pasukan elit dalam sebuah regu pertempuran, kelas menengah di Indonesia memiliki peran penting dalam membangun dan menjaga kaki-kaki ekonomi di Indonesia. Inilah kelas dalam tatanan masyarakat Indonesia yang diharapkan berperan dalam mendorong pemulihan ekonomi dan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

pandemi Covid-19, sehingga risalah tersebut belum memasukkan kondisi ketika pandemi. Tentu, selama masa pakebluk diperkirakan ada perubahan angka, tapi, paling tidak, estimasi tersebut bisa dijadikan acuan untuk menggambarkan bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia sangat besar.

Jumlah kelas menengah sebesar itu terang saja menghadirkan peluang bagi Indonesia untuk mempercepat pemulihan ekonomi selama pandemi,

lebih-lebih pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Salah satu transmisi peran kelas menengah dalam pembangunan ekonomi di Indonesia adalah pendalaman investasi, baik investasi sektoral maupun investasi di pasar keuangan. Investasi sendiri menyumbang kurang lebih 30 persen struktur ekonomi Indonesia.

Kelas menengah, dalam hal ini, perlu berperan aktif dalam menggairahkan proyek-proyek investasi yang

World Bank (2020) melalui sebuah laporan bertajuk “*Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class*” mencatat bahwa Indonesia kini memiliki 52 juta penduduk yang secara ekonomi mapan (*economically secure*). Dengan kata lain, satu dari lima penduduk Indonesia adalah bagian dari orang-orang yang mapan secara ekonomi tersebut. Selain memiliki daya tahan pada aspek ekonomi, kelompok ini juga mengantongi akses pada pendidikan dan sarana kesehatan yang layak. Tentu, secara kelas sosial, kelompok masyarakat ini berada di strata menengah atas dengan kemampuan kognitif yang mumpuni.

Sungguh pun begitu, laporan Bank Dunia tersebut disusun sebelum





sebelumnya terhenti akibat pandemi. Selain itu, keterlibatan kelas menengah dalam investasi juga seperti dua sisi koin mata uang, satu pihak akan menguntungkan pemulihan ekonomi makro, tetapi di sisi lain juga berpotensi menaikkan pendapatan kelompok kelas menengah yang selama pandemi menahan konsumsi dan mengandalkan simpanan di perbankan.

Investasi Sektoral

Salah satu lahan investasi kelas menengah Indonesia yang bisa dikembangkan adalah investasi di sektor riil. Investasi ini bersifat langsung (*direct investment*) dengan menanamkan modal pada sektor tertentu dengan perhitungan dan

perencanaan bisnis yang matang.

Beberapa sektor yang sangat mungkin dikembangkan antara lain: pariwisata, restoran, perkebunan, pangan, perikanan, dan industri pengolahan. Pola-pola kerja sama bisa dikembangkan untuk membangun sebuah industri. Kooperasi bisa dilakukan dengan melibatkan penduduk lokal, misalnya pengelolaan pariwisata desa. Begitu juga pola investasi di sektor pertanian, bisa melibatkan peran petani lokal dalam proses bisnisnya, sehingga investasi yang dilakukan kelas menengah mampu menumbuhkan asa baru bagi masyarakat kelas menengah bawah yang selama ini kesulitan untuk naik kelas secara ekonomi.

Investasi yang dilakukan di sektor

riil tidak melulu dalam skala ekonomi yang besar. Investasi kecil dan menengah sangat memungkinkan dilakukan dengan melibatkan industri kecil dan menengah yang lebih masif. Justru, model investasi seperti ini akan lebih banyak menghasilkan tetesan ekonomi bagi masyarakat bawah, yang dalam konteks pemulihan ekonomi menjadi sangat penting dan mendesak.

Trading Forex

Selain investasi di sektor riil, kelas menengah yang familiar dengan pasar keuangan, cocok untuk mencoba investasi di pasar valuta asing atau *foreign exchange (forex)*. Di masa pandemi, pasar *forex* dinilai menjadi salah satu yang tumbuh paling pesat. Hal ini disebabkan oleh pembatasan



pergerakan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari kerumunan. Dengan aktivitas yang hanya boleh dilakukan di rumah, beberapa kelompok masyarakat mulai tertarik berinvestasi jangka panjang dengan ikut menjadi *trader* di pasar *forex*.

Lebih-lebih, perkembangan teknologi yang semakin pesat dan jaringan internet yang semakin baik, makin mendorong masyarakat untuk mengalihkan pekerjaan dari bekerja di sektor riil menjadi seorang *trader*.

Namun demikian, masyarakat mesti pintar dan jeli memilih aplikasi *forex* yang baik dan tidak tipuan. Untuk terjun di dunia *trader*, bagi seorang pemula harus mencari tahu tentang asal usul perusahaan, aplikasi, *review* dari *users*, dan lain sebagainya. Jadi, trading *forex* ini mengajarkan kelas menengah untuk berpikir maju, menjadi pebisnis dan pandai membaca

situasi sehingga bisa menentukan kapan mau menjual atau membeli saham dalam aplikasi *forex*.

“Jadi, investasi boleh tapi rugi jangan. Kita mesti menyadari bahwa *trader* itu sekarang bisa menjadi profesi,” ujar Cenli Yani, Trading Analyst DIDIMAX di podcast yang dipublikasikan *Cara Pandang* (17/02).

Namun demikian, berinvestasi di pasar valuta asing mesti dilakukan dengan kepala jernih. Sebab, pengelolaan uang yang baik adalah kunci sukses berhasil berinvestasi di pasar valuta asing. “Tidak boleh rakus, kuncinya,” pungkas Cenli Yani (17/02).

Di sisi lain, investasi di pasar valuta asing relatif cocok di tengah pandemi seperti ini yang masih membutuhkan pembatasan interaksi manusia. Sebab, semua prosesnya sangat memungkinkan dilakukan melalui internet dan gawai yang biasa kita gunakan sehari-hari.

Tentu, investasi jenis ini bertujuan untuk mendapatkan profit yang ditujukan untuk kebutuhan pribadi. Jenis investasi ini berbeda dengan investasi di sektor riil yang memungkinkan untuk memberi manfaat pada masyarakat yang lebih luas.

Namun demikian, investasi di pasar valuta asing adalah salah satu opsi yang bisa dilakukan oleh para generasi milenial yang memiliki modal cukup dan ingin belajar berinvestasi. Sebab, ini adalah salah satu pilihan aman dengan risiko yang bisa diperhitungkan.

Terlepas dari pilihan investasinya, baik sektor riil maupun valuta asing, kelas menengah di Indonesia punya peran penting untuk menjaga stabilitas ekonomi pada masa *recovery* hari-hari ini. **Azhar**



TRADING FOREX DIBENCI, TAPI DINANTI

Tak sedikit orang yang menganggap negatif terhadap trading forex. Mempercayakan keuangan pada jenis investasi ini seringkali berakhir dengan penipuan. Tapi siapa yang sangka, masih banyak orang yang menanti untuk menjadi bagian dari keuntungan yang berlimpah melalui trading ini.

Pada masa pandemi, banyak pekerja yang terpaksa dirumahkan seiring industri membatasi aktivitas produksi. Kini, situasi sudah mulai membaik, industri perlahan kembali mengepul. Masyarakat kelas menengah kembali ingin menanamkan modal investasi baik di sektor riil maupun di pasar keuangan.

Masyarakat ingin memulihkan kembali pendapatan seperti masa

sebelum pandemi, sehingga secara psikologis, semangat berinvestasi cenderung meningkat sejalan dengan mulai terkendalinya kurva pandemi yang mencapai puncaknya pada pertengahan 2021.

Sungguh pun demikian, semangat masyarakat untuk kembali berinvestasi demikian, perlu mendapat saluran dan pengarahan yang tepat. Edukasi kepada masyarakat perlu digalakkan sejak dini. Sebab, *moral hazard* selalu



mengintai siapa saja yang tidak memiliki cukup informasi.

Maka kemudian, penting untuk diketahui prinsip dasar investasi, yakni bahwa investasi itu selalu berdiri di atas dua filosofi dasar: untung dan rugi. Maka, jika terdapat penawaran investasi yang langsung menawarkan keuntungan dalam level yang bombastis dengan hanya bermodalkan sejumlah kecil uang, investasi tersebut patut dicurigai.

“Tidak ada bisnis yang instan. Tidak ada bisnis yang selalu untung. Tidak ada bisnis yang selalu rugi. Setiap bisnis pasti ada risiko dan *reward*-nya,” ujar Cenli Yani, Trading Analyst DIDIMAX di podcast yang dipublikasikan carapandang.com (17/02).

Ramainya penipuan berkedok investasi yang belakangan ini

mencuat melalui platform internet, menyebabkan salah satu sarana investasi, yakni *trading forex* sebagai sesuatu yang negatif. Publik menilai seperti ini setelah berkaca pada maraknya penipuan dalam investasi *forex*, penipuan umumnya menasar mereka yang tidak mengetahui secara umum skema bisnis *forex*.

Sebab itulah, *forex* banyak mendapat persepsi negatif, selain aspek spekulatifnya yang memang relatif tinggi. Namun demikian, ada beberapa informasi yang mungkin perlu diluruskan. Dalam beberapa hal, *forex* juga berkaitan dengan investasi jangka panjang yang sangat memungkinkan dijadikan sandaran untuk kebutuhan finansial rumah tangga.

“*Trading forex* itu sesungguhnya tidak untuk merugikan nasabah, tetapi

untuk investasi jangka panjang,” kata Cenli Yani.

Selain itu, investasi jangka panjang juga berkaitan dengan prospek bisnis yang ditawarkan. Dalam hal ini, nasabah atau calon investor perlu menggali informasi lebih mengenai bagaimana model investasi *forex* yang baik dan benar itu. Maksudnya adalah memahami dasar filosofi berinvestasi, bahwa *trading forex* sekalipun, pasti mengandung potensi kerugian, sebab begitulah hukum investasi.

Pada aras ini, terdapat dua hal yang seyogianya diperhatikan untuk mengelola investasi *forex*, antara lain: *Pertama*, pengelolaan uang (*money management*). Hal ini berkaitan dengan strategi untuk mengelola tingginya risiko yang terjadi dalam *trading forex*.

Kedua, mengelola psikologi *trading*.

Hal ini lebih berkaitan dengan cara mengelola investasi agar terhindar dari kegagalan. Sebab, sering kali, ketidaksiapan *trader* dalam menghadapi fluktuasi atau gejolak pasar yang tak jarang datang secara tiba-tiba, menyebabkan kebingungan dan kegugupan *trader* dalam mengambil keputusan bisnis. Hal-hal tidak terduga mesti diantisipasi dengan baik, tentu melalui analisa dan riset yang cukup terhadap data-data pasar yang tersedia.

Dua aspek tersebut, patut diperhatikan untuk menjaga agar keputusan-keputusan yang akan dilakukan ketika berinvestasi dalam pasar valuta asing diputuskan dalam pertimbangan yang matang. Termasuk, ketika seorang *trader* sudah memperoleh keuntungan yang besar, pengelolaan kapital menjadi sangat penting, untuk mengurangi potensi rakus akibat tergiur oleh pasar.

Pada konteks ini, tentu saja perlu dipahami bahwa *trading* di pasar valuta asing juga bukan investasi yang instan, melainkan mengandung beberapa kadar risiko, sebagaimana bisnis pada umumnya.

Menghindari Penipuan

Ada banyak pemberitaan yang menginformasikan tentang *trading forex* bodong atau abal-abal. Salah satunya adalah Robot trading MarkAi, yang pada pertengahan tahun lalu dilaporkan oleh sejumlah nasabahnya karena dinilai melakukan penipuan besar-besaran. Lebih dari 500 ribu nasabah MarkAi kehilangan uang investasi, lenyap seketika dengan alasan untuk menghindari aliran dana masuk dari suntown forex ke MarkAI. Nyatanya, para nasabah benar-benar mengalami penipuan.

Menurut Pengamat dan Praktisi

Investasi Desmond Wira, saat ini tawaran investasi bodong berkedok robot trading tengah marak dengan jenis robotnya yang beragam. Mulai dari *trading forex*, emas, sampai kripto.

“Semuanya sebenarnya sama, yaitu *money game*,” kata Desmond.

Sebab itu, para *users* trading forex perlu melakukan riset kecil-kecilan sebelum mempercayakan keuangannya pada jenis forex tertentu. Publi perlu mengedukasi dirinya sendiri dengan mencari tahu kebenaran, legalitas dan track record jenis trading forex tertentu agar tidak menyesal di kemudian hari.

Sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat, dalam penerapan investasi di salah satu sarana investasi, yakni pasar valuta asing, ada beberapa tips yang bisa diperhatikan oleh para *trader* untuk menghindari adanya potensi-potensi penipuan yang tidak diinginkan.

Pertama, memahami cara kerja bisnis perusahaan di mana nasabah akan berinvestasi. Langkah pertama ini menjadi sangat menentukan untuk mengetahui bahwa kita berinvestasi pada perusahaan yang jelas, tepat, dan memiliki visi berbisnis yang baik dan terukur.

Kedua, menyelidiki apakah bisnis yang sedang kita ikuti tersebut berbadan hukum resmi dan memiliki legalitas yang jelas. Hal semacam ini penting untuk diteliti lebih dulu sebelum memutuskan untuk berinvestasi di suatu perusahaan tertentu. Sebab, tanpa adanya badan hukum yang jelas, suatu perusahaan sudah jelas disebut ilegal dan melanggar hukum. Inilah salah satu kedok investasi bodong yang selama ini meresahkan masyarakat.

Ketiga, selain faktor tujuan investasi, untuk menghindari adanya *moral*

“Tidak ada bisnis yang instan. Tidak ada bisnis yang selalu untung. Tidak ada bisnis yang selalu rugi. Setiap bisnis pasti ada risiko dan *reward*.”

Cenli Yani,
Trading Analyst DIDIMAX

hazard dalam proses investasi, penting juga kita mengontrol keinginan pribadi atas harapan untuk meraup untung sebesar-besarnya dalam waktu yang cepat. Tentu, hukum bisnis yang baik selalu memberi pelajaran berharga bahwa bisnis selalu mengandung kadar risiko yang mesti dipikul. Memang, semakin tinggi risiko yang ditanggung, semakin besar potensi keuntungan yang bisa didapat.

Dalam pada ini, masyarakat yang ingin kembali berinvestasi perlu mempelajari terlebih dahulu tujuan investasi yang hendak dituju, jenis investasinya, prospeknya, termasuk memperhitungkan strategi yang akan digunakan. Hal seperti ini adalah modal dasar untuk memulai investasi.

Maka, akhirnya, apa pun jenis investasinya, memegang filosofi dasar investasi adalah kunci terhindar dari investasi bodong yang begitu merugikan. Kita tentu tidak ingin tabungan yang kita idam-idamkan untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang, tiba-tiba lenyap melalui mesin trading forex yang tidak jelas.

Zar/Naf

INDRA KENZ, DONI SALMANAN DAN JERAT FOREX BODONG



Indra Kenz telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus investasi bodong. Crazy rich asal Medan tersebut terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dengan persangkaan pasal judi online, penipuan, penyebaran hoaks, hingga tindak pidana pencucian uang atau TPPU.

Fenomena flexing saat ini sedang marak menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, banyak masyarakat yang tertipu oleh crazy rich yang memamerkan harta kekayaan.

Setiap orang pasti mendambakan hidup sejahtera dan memiliki harta yang berlimpah. Syukur-syukur, hartanya dapat diwariskan sampai tujuh turunan. Ini merupakan sifat natural manusia, Adam Smith menyebutnya dengan istilah *homo economicus*.

Mengakumulasi pundi-pundi harta untuk menumpuk kekayaan adalah

suatu pekerjaan yang sah-sah saja. Namun, yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara mendapatkan dan mengumpulkan kekayaan itu.

Akhir-akhir ini jagat publik tengah dihebohkan “*crazy rich*” atau biasa dikenal “sultan”, yaitu orang yang super-kaya karena sukses dalam dunia bisnis. Istilah ini menjadi trending di media karena sejumlah anak muda yang tampil dengan harta melimpah dan berbagai pernak-pernik mewah atau biasa disebut *flexing*.

Tentu, orang yang menyaksikan fenomena ini menjadi kagum dan ingin memiliki kekayaan seperti anak muda tersebut.

Namun, seiring berjalannya waktu, dari beberapa nama *crazy rich*

tersebut kenyataannya kekayaan yang dipamerkannya adalah palsu dan hanya digunakan untuk memanipulasi calon pelanggan. Tak disangka, harta yang dipamerkan tersebut adalah hasil dari investasi bodong berkedok binary option.

Investasi Bodong
Banyak masyarakat yang tertipu ketika diiming-imingi investasi yang cepat menghasilkan keuntungan dalam jumlah besar. Pada kasus Binomo, misalnya, keuntungan yang didapat pelanggan bisa mencapai 85 persen dari modal awal.

Sebagai orang awam, melihat keuntungan yang luar biasa besar tersebut pastilah tergiur. Dari sisi psikologis pasti akan terpengaruh dan pada akhirnya masuk dan ikut ke dalam lubang investasi yang demikian.

Karena itu, Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L Tobing memaparkan, terdapat empat hal yang menyebabkan investasi ilegal itu tumbuh subur dan memakan banyak korban di Indonesia, di antaranya yaitu: Pertama, masih rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai produk-produk keuangan, hingga manfaat dari investasi yang masuk akal.

“Kedua, kelemahan masyarakat yang sangat mudah tergiur dengan tawaran keuntungan besar tanpa harus repot-repot berusaha,” kata Tongam.

Ketiga, kesulitan ekonomi yang dialami oleh masyarakat, sehingga mengambil keputusan yang tidak dipertimbangkan secara matang.

Keempat, banyak yang terjebak dengan investasi bodong lantaran melihat testimoni pengalaman orang yang sudah bergabung lebih dulu. Testimoninya tentu saja menggiurkan untuk menarik minat anggota baru.

Padahal kalau kita cermat, sesungguhnya orang seperti Indrakenz adalah influencer yang sengaja diprofilkan oleh Binomo untuk "berganti wajah" dengan menjadi sosok yang seolah-olah super kaya di usia muda. Lalu, berbagai kekayaan yang palsu itu dipublikasi di media sosial secara besar-besaran agar menginspirasi anak muda lain untuk bisa cepat menjadi "sultan" dalam waktu cepat.

Salah satu investasi bodong yang tertangkap basah adalah Binomo. Bareskrim Polri dalam keterangannya menyatakan platform tersebut telah menjanjikan keuntungan 85 persen. Salah satu aktor yang dilaporkan adalah Indra Kenz, yang dikenal sebagai sultan atau *crazy rich* asal medan. Indra Kenz diketahui telah mempromosikannya sejak tahun 2020.

Belum lama usai, ternyata hal serupa terjadi pada *crazy rich* asal Bandung, Doni Muhammad Taufik atau dikenal masyarakat sebagai Doni



Salmanan melalui aplikasinya Quotex. Doni ditetapkan menjadi tersangka karena melakukan penipuan opsi biner atau trading binary option.

Inilah pentingnya pemahaman yang utuh dan selektif ketika akan terjun dalam dunia trading. Karena, apabila kita mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan yang banyak di saat itulah kehancuran sudah menanti. Selain hal itu, yang dapat menjadi pelajaran buat anak muda atau siapa saja hendaknya mencari harta dan kekayaan dengan cara-cara legal yang

tidak bertentangan dengan undang-undang.

Pakar digital Anthony Leong menyampaikan, "Kita perlu mengajak dan membentuk pola pikir masyarakat bagaimana mencari segala sesuatu perlu proses dan untuk mendapatkan profit jangan melalui proses instan. Ini penting untuk pesan kepada seluruh milenial yang ada di Indonesia agar tidak termakan pesan *flexing* yang kini banyak dipertontonkan di media sosial," tegas Anthony dikutip dari medcom.id.

Selain menyadarkan masyarakat terkait pentingnya memahami investasi trading, hal lain yang harus didorong adalah pemerintah yang merupakan pembuat serta pelaksana kebijakan. Pemerintah harus tegas terhadap kasus-kasus seperti ini. Investasi bodong yang semakin menjamur harus terus diusut sampai ke akar-akarnya. Karena hanya dengan begitu, Indonesia akan terbebas dari para penipu yang masuk ke ruang-ruang digital dan menyasar kelas menengah produktif. Aldi

"Kita perlu mengajak dan membentuk pola pikir masyarakat bagaimana mencari segala sesuatu perlu proses dan untuk mendapatkan profit jangan melalui proses instan."

Anthony Leong,
Pakar digital

MEMILIH TRADING FOREX YANG TEPAT

Robot Trading Forex kini sedang naik daun. Banyak masyarakat yang ikut terjun dalam investasi ini. Namun, tak sedikit yang tertipu karena usaha tak berizin atau ilegal.

Robot Trading Forex atau biasa disebut dengan istilah *Expert Advisor* (EA) merupakan program perangkat lunak berdasarkan algoritma yang bisa memberikan sinyal beli atau jual dengan cepat. Sistem ini sepenuhnya otomatis, trader tidak perlu duduk diam terlalu lama di depan layar handphone atau komputer untuk bertransaksi. Karena, robot dengan cepat akan memberikan sinyal pasar valas yang akan membantu untuk menentukan apakah akan membeli atau menjual.

Investasi robot trading saat ini sangat populer dan menjadi perbincangan hangat. Banyak yang meyakini jika memakainya akan cepat mendapatkan keuntungan. Apalagi, banyak publik figur dan *influencer* yang terjun dan mengajak ke dunia investasi.

Sebagai orang awam, ketika diiming-imingi investasi yang cepat menghasilkan keuntungan pasti akan tergiur. Psikologis seseorang akan terpengaruh dan pada akhirnya ikut ke dalam dunia investasi. Tentu tidak salah, namun yang harus diperhatikan dalam berinvestasi ataupun trading tidak bisa sembarangan karena harus



menggunakan teknik yang tepat. Maka dari itu, kita perlu berhati-hati dalam setiap keputusan agar perangkat pendukung investasi ini sangat bermanfaat.

Ketika akan terjun di dunia *trading forex*, ada beberapa hal yang perlu diketahui terutama pengguna awal, yaitu *pertama*, selektif dalam memilih broker atau orang-orang yang menawarkan. Biasanya orang yang menawarkan super kaya atau biasa disebut *crazy rich*, namun pada kenyataannya kekayaan tersebut palsu dan hanya digunakan untuk memanipulasi calon pelanggan.

Kedua, memiliki lisensi atau legal. Jika memutuskan akan memakai robot *trading forex* maka pastikan penyedia layanan adalah perusahaan

resmi dan sudah memiliki legalitas atau mengantongi izin Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). *Ketiga*, *track record* perusahaan. *Track record* sangat penting mengingat di luar sana banyak orang-orang yang tertipu akan investasi bodong. Dengan mengetahui *track record* rekam jejak perusahaan akan terlihat apakah kredibilitas atau tidak.

Keempat, mencari informasi sebanyak-banyaknya. Sebelum memutuskan untuk menggunakan robot trading forex maka sebaiknya mencari terlebih dahulu bagaimana *review* dari pengguna atau para trader yang kompeten dan jujur. Dengan begitu, kita akan mendapatkan informasi yang valid.

Didimax Trading Terpercaya

Setelah melakukan analisis seperti yang diuraikan di atas, salah satu trading forex terpercaya yaitu Didimax. PT Didi Max Berjangka telah berdiri sejak tahun 1999 dan saat ini telah aktif kembali dengan kepengurusan yang baru dan profesional sesuai Akta Perubahan Perseroan Terbatas: No. 11 tanggal 17 November 2017 oleh Notaris Inayat Aminputra, SH. Berkantor pusat di Didimax Building Jl. Garuda No 88 Bandung 40184.

PT. Didi Max Berjangka adalah perusahaan pialang berjangka yang mengkhususkan diri pada perdagangan Mata Uang (Forex), Emas (Gold), Perak (Silver) dan Komoditi (Multilateral) dengan spread dan biaya yang sangat kompetitif. Didimax melayani kebutuhan investornya. Didimax memungkinkan akan melakukan perdagangan di semua pasar utama dengan dukungan 24 jam.

PT. Didi Max Berjangka beroperasi berdasarkan ijin dan berada di bawah pengawasan BAPPEBTI, merupakan perusahaan yang telah diakui baik dari sisi kepatuhan terhadap hukum maupun kinerja keuangan dan prestasi. PT. Didi Max Berjangka juga fokus memberikan edukasi dan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar perdagangan berjangka internasional serta didukung oleh para profesional yang berpengalaman di industri berjangka. PT. Didi Max Berjangka adalah broker pemenang penghargaan “Best Forex Education Broker Indonesia 2018” Dari Global Banking and Finance U.K.

Didimak adalah pilihan yang tepat untuk trading para pengguna. Menyediakan layanan dengan profesional dan adil, serta membawa ke pasar keuangan terbesar di



dunia. Selain itu, didimak juga akan memberikan edukasi dan seminar untuk memenuhi kebutuhan para nasabah. Keunggulan lainnya dari didimak adalah diatur oleh BAPPEBTI dan menjadi Broker Terpercaya, Transparan dan Aman.

Robot trading forex ini juga memiliki aset yang berharga yaitu para profesional yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Mereka adalah aset yang memiliki keahlian, integritas, bermutu tinggi untuk mengembangkan perusahaan dan siap memberikan pelayanan terbaik kepada klien.

Belajar Trading Forex

Selain platform untuk berbisnis, Didimax juga hadir dan fokus menyediakan tempat belajar trading forex. Didimax sudah dipercaya oleh banyak kalangan sejak tahun 2000 dan berkantor pusat di Jalan Garuda No. 88, Bandung yang mengkhususkan diri pada perdagangan Mata Uang (Forex), Emas (Gold), Perak (Silver) dan Komoditi (Multilateral) dengan spread dan biaya yang sangat kompetitif.

Salah satu Sang Masti dari Didimak, Ms Cenli di podcast *CaraPandang* mengungkapkan bahwa tujuan untuk berbisnis adalah mencari untung dan meminimalisir kerugian. Meskipun itu menjadi tujuan utama, tetapi hal penting yang tidak boleh dilupakan adalah belajar mengenai investasi yang akan dilakukan. “Edukasi yang kita ajarkan di Didimax bukan sebatas Teknik cara menggunakan. Tetapi, ada materi-materi seperti money manajemen dan psikologi trading yang akan dipelajari,” tegas MS Cenli.

Meskipun trading pada umumnya ingin mendapat keuntungan secara instan, namun perlu keahlian dan pengamatan yang jeli. Trading forex memang menawarkan kemudahan mendapat untung, bahkan dapat menjadi profesi dan pendapatan primer. Tetapi, untuk menuju ke arah sana harus mengerti dan memahami mendalam ilmu trading. Tidak secara mendadak ingin mencoba trading tetapi tidak memiliki ilmunya. Di sinilah Didimax akan memfasilitasi para nasabah yang ingin bergabung sekaligus belajar mendalam. **Aldi**

MISS CENLI YANI, TRADING ANALYST DIDIMAX

INVESTASI BOLEH, RUGI JANGAN!

Investasi *trading forex* belakangan banyak diminati kelas menengah perkotaan. Kebanyakan di antara mereka tergiur oleh keuntungan yang berlebih dan cepat, sementara di sisi yang lain para *users* pemula tersebut abai dengan pentingnya edukasi bisnis di bidang ini. Tak pelak, sebagaimana umumnya menjalani bisnis, kadang beruntung tapi kadang juga merugi. Persoalannya, seringkali nasabah tidak menyiapkan mental ketika mengalami kerugian.

Hal yang lain, beberapa kali pemberitaan media menyudutkan investasi trading forex ini, karena terkait legalitas atau kasus penipuan. Karena itu, penting sekali bagi para calon nasabah untuk memahami *track record* jenis trading forex yang ingin diikuti. Terlebih dalam beberapa tahun terakhir ini, investasi di bidang ini sedang marak jenis dan aplikasinya.

Salah satu jenis *trading forex* terpercaya dan memiliki *track record* baik adalah DIDIMAX. Tak hanya soal keuntungan semata yang dijanjikan DIDIMAX, para *users* akan mendapatkan edukasi dalam berbisnis di bidang ini, terutama menyiapkan mental menjadi pebisnis trading forex dan mengerti atau bisa membaca peluang kapan harus menjual atau membeli saham di waktu yang tepat.

Tim *CaraPandang* berhasil mewawancarai Trading Analyst DIDIMAX Ms. Cenli Yani melalui *Podcast*

Bongkar: Menyongsong Asa Jadi Nyata, pada Kamis (17/2). Berikut ini adalah beberapa petikan wawancaranya:

Ms. Cenli, orang di luar sana ingin mengerti DIDIMAX itu apa, dan kenapa harus memilihnya dalam berinvestasi trading forex?

DIDIMAX adalah sebuah broker untuk menjembatani antara investor yang ingin berbisnis *trading forex* dengan pasar forex. Penting memilih DIDIMAX karena ia satu satunya broker yang menyediakan edukasi bimbingan trading forex secara gratis tanpa dipungut biaya apapun.

Apa daya tarik DIDIMAX untuk kita sebagai trading pemula ?

Kita menawarkan produk dengan banyak *reward*. Lalu, yang paling menonjol dari DIDIMAX adalah kita memberikan edukasi dan bimbingan kepada *users*. Dengan demikian, broker kami legalitasnya sudah resmi. Mendapat pengawasan langsung dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Kami juga menjadi anggota Cyber Future Forex (CFX), sehingga dana nasabah itu sudah aman banget.

Dalam bidang apa saja DIDIMAX memberikan edukasi kepada nasabah?



Kami mengedukasi nasabah tentang cara bertransaksi yang baik dan benar. Juga memberikan pemahaman kepada mereka bahwa yang namanya bisnis trading forex itu bukan hanya tentang cara transaksi, tetapi juga tentang *money management*, mengatur psikologi nasabah, mengerti waktu kapan nasabah bisa bertransaksi dengan tepat. Itu semua ada tekniknya, lalu memahami mereka mengenai pentingnya mendapatkan informasi/berita, yang mempengaruhi berbagai mata uang di trading forex.

Bagaimana paradigma masyarakat tentang trading forex dan bagaimana cara agar dapat meminimalisir agar nasabah tidak lari?

Paradigma masyarakat tentang trading forex benar-benar beragam. Ada yang negatif dan ada juga yang positif. Mereka yang menganggap negatif dipengaruhi karena banyak sekali penipuan trading forex. Nah, DIDIMAX ini muncul untuk memberikan edukasi dan bimbingan. Edukasi diberikan kepada nasabah awam atau pemula hingga mereka sudah bisa bertransaksi secara mandiri. Tidak semua trading forex itu merugikan. Tidak semua trader Forex itu menipu, contohnya ya DIDIMAX ini. Broker ini memberikan edukasi dengan legalitas resmi, memiliki cabang di mana-mana. Kita ingin buka paradigma masyarakat bahwa trading forex itu bukan untuk membuat kalian cepat kaya tapi bisa membuat kalian mendapatkan profit secara konsisten.

Ada anggapan bahwa trading forex itu sulit dipantau dan dicairkan?

Inilah yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari sebuah broker. DIDIMAX itu brokernya paling cepat deposit dan *withdraw*-nya paling cepat



5 menit. Bertransaksi dalam jumlah milyaran pun *nggak* ada *unlimited time*. Untuk *withdraw* sendiri bisa dilakukan di jam kerja, yaitu dari Senin hingga Jumat, dari pukul 08.00-17.00, sementara untuk waktu deposit selama 24 jam. Dipastikan dalam 5 menit akan sampai, karena percuma kalau misalnya *profit* konsisten tapi di *withdraw* susah, makanya mungkin signalnya 99% akurasi bisa dibuktikan untuk *withdraw*-nya 5 menit sampai ke rekening masing-masing.

Apa bedanya DIDIMAX dengan broker lainnya?

DIDIMAX itu beda. Motto DIDIMAX membuat nasabah profit sebanyak-banyaknya. Kita *ngasih* signal yang benar-benar akurat 99% memprofitkan nasabah. Karena DIDIMAX itu memberikan edukasi dengan bimbingan *learning by doing*. Jadi, kalau cuma bisa *ngasih* edukasi saja, ini *lho* tekniknya. Seperti Anda diajak berenang tapi Anda tidak

langsung praktik. Anda tidak akan tahu di dasar air itu ada apa. Tapi kalau diajarin tekniknya, analisisnya, maka itu yang saya namakan kita memberikan signal. Signal-signal ini harus dipraktikkan bagaimana cara analisisnya.

Apakah ketika terjadi lost, DIDIMAX akan meninggalkan nasabah atau berani bertanggungjawab?

Tidak dong. Kita akan bertanggungjawab. Kita tidak akan menghilang gitu saja. Ketika kita *lost* tidak papa hari itu *lost*, namun ketika ada signal untuk profit maka tidak akan kita tinggalkan.

Bagaimana cara membedakan sell atau buy, dan apakah pada grafik itu ada titik temunya?

Kadang aku kalau kasih signal sama mentor lain pasti debat, karena aku orangnya langsung eksekusi. Aku *buy* mereka *sell*, kenapa kok beda? Sebenarnya sama sama saja,

cuma momen saja yang berbeda, kenapa mengambil *sell* atau *buy*. Tentunya, kita punya alasan dan tekniknya masing-masing. Misalnya kalau ada *floating*, ikutin signal aku atau ikutin signal DC. Jika keduanya *floating*, tidak apa-apa *hold* saja. Sebenarnya arahnya sama sama saja, yang penting kita tahu di mana titik harga itu akan naik maupun turun.

Kalau ada nasabah yang bandel, apakah miss masih bertanggung jawab atas kebandelan mereka?

Mau gimana ya? karena semua yang ada di sana pasti tanggung jawab saya. Mau mereka *open* posisi sendiri atau signal dari orang lain, dia tetap *member* saya. Saya harus tetap bertanggungjawab dengan cara *tradingnya*. Mungkin hari ini dibenerin, tapi kalau besok-besok bakal saya diamkan.

Kapan waktu yang tepat untuk pemula seperti saya ini memulai berbisnis trading forex?

Sekarang bisa, tapi pesanku ketika ingin memulai *trading forex* pahami dulu risiko sama *reward*-nya yang didapat. *Mindset*-nya itu dirubah dulu, karena setiap bisnis akan selalu ada untung dan rugi. Jangan sampai kita masuk ke *trading forex* hanya punya *mindset* bahwa kita pasti dapat untung. Tapi ketika kita *lost*, mereka tidak terima. Jangan seperti itu, untung dan ruginya itu kita minimalisir.

Tadi ngomongin trading lagi viral di media sosial. Ada salah satu affiliator yang menjadi tersangka. Bagaimana tanggapan Anda?

Platform tidak salah, yang salah adalah oknum. Sekarang kalau kita menyalahkan platformnya, kenapa mereka bisa bebas jualan meski sudah dibekukan. Sudah tahu itu ilegal, tetapi masih tetap ada orang yang berbisnis dengannya. Yang harus disalahkan itu affiliator mereka, masyarakat juga bisa disalahkan, karena posisi affiliator

adalah berjualan. Semua orang kalau berbisnis tidak akan ada yang diharamkan, *nah* masyarakat itu sudah tahu itu ilegal, keamanan data mereka kurang, kenapa masyarakat masih mau mengikutinya.

Bagaimana cara menghindari hal tersebut itu?

Cari informasi lebih lanjut soal itu. Jangan hanya pada satu sisi saja, tapi lihat dari segala sisi. Jadi harus lebih hati hati.

Apakah nasabah awam yang ingin deposit akan di dampingin langsung (tidak dibiarkan jalan sendiri)?

Tentu saja. Saya rasa hanya DIDIMAX yang memberi edukasi ke semua nasabah. Tim DIDIMAX mengedukasi nasabah supaya menjaga profit secara konsisten. Bukan yang sekali profit langsung besar. Karena orang yang punya uang banyak, mereka tidak akan mempertaruhkan 100% uangnya demi keuntungan. Lebih baik profit sebulan itu cuman 5% atau 10% tapi konsisten daripada yang satu bulan 50%, 100% tapi habis saat itu juga. Jadi semua broker ingin punya keuntungan, tapi DIDIMAX menekankan bagaimana caranya ada simbiosis mutualisme, jadi ndak satu pihak saja yang diuntungkan. Jadi itulah kenapa DIDIMAX berbeda dari yang lain.

Apakah sebagai nasabah itu belajarnya lebih baik memilih satu fokus atau semuanya?

Cari teknik yang sudah terbukti profitnya secara konsisten,



karena cocok atau tidaknya biasanya bergantung pada teknik yang dipakai. Sekarang sudah ada teknik yang bagus ngapain cari teknik yang lain. Semua kapasitasnya sama, tidak susah banget atau gampang banget. Gunanya *learning by doing* itu di situ, ada signal ini analisanya, jadi bisa belajar.

Kalau mengenai EMA, ini apa?

EMA itu kepanjangannya *Exponential Moving Average*. Ini semacam literasi untuk materi dasar *moving average*. Di balik *moving average* ada rahasia bagaimana cara kita mendapatkan profit secara konsisten. Yang tahu ini hanya aku, karena aku yang menyempurnakan teknik ini selama 6 tahun. Jadi aku dari 6 tahun lalu sudah menganalisa melalui EMA. Mereka keluar periode, tapi mereka cuman ngejelasin teknik dasarnya aja kalau misalnya EMA bersilangan berarti *sell* terus, itu gunanya *moving average*. Semua *moving average* pasti seperti itu. Cuma mereka tidak menerangkan cara *entry point* kapan waktu yang tepat, kapan kita transaksi, kapan kita analisa. *Time frame* mana yang cocok digunain dan mana yang tidak.

Apakah invasi Rusia ke Ukraina akan memengaruhi pergerakan trading forex secara umum?

Enggak, karena yang menggerakkan harga market itu pasti faktor fundamental ekonomi. Teknikal itu hanya mengikuti dari pergerakan setelah fundamental ekonomi. Seperti itu, pasti saling berkaitan. Tapi kalau dibilang nyambung enggak. Karena memang pada dasarnya penggerak utama market itu adalah fundamental. Sebelum adanya perang Rusia sebulan

yang lalu, aku udah analisa, tapi nggak terlalu ada pengaruhnya.

Apa tips bagi nasabah menghadapi situasi ekonomi pengaruh perang ini?

Pertama, kalau untuk member DIDIMAX, tolong dijaga lotnya sampai 0,2 saja sudah cukup karena target untuk kita mengambil profit itu sudah jauh. Bisa di angka 5 sampai 7 poin, 5 sampai 7 poin dengan 0,2 itu bisa dapatnya 100 sampai USD150. Satu kali transaksi itu sudah cukup. *Kedua*, ikutin trennya. *Ketiga*, untuk pemula selalu pasang TP sama SL, kalau enggak mau terkena *stoploss* sistemnya *averaging* balik lagi ke poin pertama, dan lotnya dijaga karena isinya pasti dobel. Sementara itu, *planning trading*-nya dijaga, konsisten dengan *planning trading* sehari mau dapat berapa kalau misalnya mau menang banyak tapi kita sudah konsisten seharusnya pengin dapat misal USD200, maka itu sudah cukup.

Berapa persen keuntungan yang bisa didapat idealnya sehari?

Sehari itu bisa dia angka 1% hingga 3%, lalu dikali 20 hari kerja. Kalau lebih dari 3%, itu dibilang serakah. Jika mampu berarti itu bonus.

Banyak yang menganggap trading forex itu haram, bagaimana menurut miss?

Banyak banget perdebatan tentang halal atau haram ini. Trading forex itu basisnya adalah jual beli. Syariatnya ya berdagang syariat, mengikuti hukum jual beli. Trading forex itu punya akad sebelum kita melakukan transaksi jual beli.

Akadnya dimana?

Akadnya itu ada di *agreement*. *Agreement* ini disetujui oleh kedua belah pihak. Kalau nasabah daftar ke

DIDIMAX tidak menerima persetujuan, ya mereka boleh membatalkan tanpa paksaan apapun. Untuk halal-haramnya ini masih bahasa *alarm*. Fatwa MUI, itu berbicara tentang pembolehan *trading forex*. Tidak halal dan tidak haram, tapi diperbolehkan karena syariatnya adalah hukum jual beli. Hukum jual beli pasti pasti ada akadnya. Tidak ada bunga yang ditetapkan 1% dengan paksaan. Ada yang bilang kalau *trading forex* ada yang disebut dengan komisi, itu berarti haram. Itu kata sebagian orang. Katanya itu termasuk riba. Riba itu *kan* terdapat dalam pinjam-meminjam, sementara trading forex itu jual beli. Jadi riba itu *enggak* masuk ke sini.

Jelaskan dong legalitas DIDIMAX dan perputaran uang kalau kita investasi di situ kemana saja?

Ini legal diawasi oleh BPK atau BAPPEBTI. Kita juga anggota PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dan Jakarta Future Exchange (JFX). Ketika nasabah menaruh uang di DIDIMAX, tidak semuanya ada di dalam perusahaan, tapi 70 persennya masuk ke KBI, sementara 30 persennya masuk ke *secret account* yang disediakan oleh DIDIMAX. *Secret account* itu adalah rekening pemisahan antara dana perusahaan dengan dana nasabah. Jadi ketika, misalnya, DIDIMAX mengalami bangkrut, maka 70 persen dana nasabah ada di KBI.

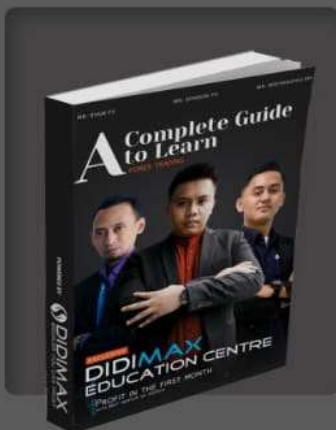
Terus berapa depositnya, persyaratannya apa?

Kalau untuk Anda nasabah DIDIMAX siapin modal minimal 100 juta kita *learning by doing*. Silakan daftar di www.didimax.co.id, siapin KTP, NPWP, dan nomor rekening tabungan, serta isi data diri secara lengkap.

DIDIMAX EDUCATION CLASS

wadah bagi seluruh anggota didimax yang sudah masuk kelas trading di didimax, seluruh anggota tergabung dalam 1 group whatsapp, disana semua anggota akan mendapatkan materi langsung dari mentor, materi yang dibagikan antarlain ialah *cara menggunakan mt4, pengenalan candle stick, mengatur lot, mengatur risk reward*, dan masih banyak materi lainnya.

 BERKUALITAS |  MUDAH DIPAHAMI |  GRATIS



BUKU DIDIMAX EDUCATION CLASS

buku didimax education centre merupakan rangkuman materi mengenai ilmu trading forex yang di tulis langsung oleh mentor didimax, buku ini dibagikan gratis kepada semua member didimax.

— MENTOR DIDIMAX —



KENAPA HARUS PUNYA BUKU DIDIMAX EDUCATION CLASS?

karena buku ini ditulis oleh mentor yang berpengalaman dibidang trading forex, sehingga semua materi yang ditulis dapat dipertanggungjawabkan, serta materi akan mudah dipahami oleh trader pemula

SPECIAL PROMO

dapatkan keuntungan menarik dari didimax setelah anda melakukan deposit!



**NEW
FORTUNER G 2.4
(4x2) MT**



**NEW
VARIO 150**



**RANGE ROVER
EVOQUE**

MINIMAL
DEPOSIT
\$100.000

SETTLE
12500 LOT



**NEW
ALPHARD 2.5 G**

MERCHANDISE



INFORMASI

- New Vario 150: Min. Deposit \$10.000
- New Fortuner G 2.4 (4x2) MT: Min. Deposit \$15.000
- New Mazda CX-5 GT: Min. Deposit \$20.000
- New Alphard 2.5 G: Min. Deposit \$50.000
- Range Rover Evoque: \$100.000



**NEW
MAZDA CX-5 GT**

CATATAN UNTUK CALON IBU KOTA BARU

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memperkirakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Penajam Paser Utara akan melahirkan pusat-pusat pertumbuhan baru. Semua proses realisasi proyek IKN dilakukan dengan tergesa-gesa, termasuk pembahasan RUU IKN yang menimbulkan banyak pertanyaan. Akibatnya, opini publik terbelah menjadi pro dan kontra.

Sejak pertama kali diumumkan Presiden Joko Widodo pada pertengahan 2019, pemindahan ibu kota menuai kritik dari berbagai kalangan. Beberapa komentar yang mencuat terpusat pada isu lingkungan, pembiayaan pembangunan, dan ekonomi nasional.

Dalam konteks lingkungan, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan berpotensi mendorong deforestasi besar-besaran. Kebutuhan lahan yang mencapai 256 ribu hektar, tidak bisa terhindarkan dari pembukaan lahan dalam skala yang masif. Padahal, berbagai lapisan masyarakat, baik di tingkat global maupun

domestik, kini tengah berupaya menanggulangi perubahan iklim yang salah satunya dilakukan dengan cara menjaga ekosistem hutan.

Selain itu, bukan tidak mungkin, luas lahan yang dibutuhkan tersebut akan membengkak, seiring perkembangan kota di sekitarnya. Belum lagi, klaim bahwa Kalimantan Timur adalah paru-paru dunia, dengan kondisi hutan yang rimbun, berpotensi berubah.

Di sisi lain, kritik pembangunan ibu kota baru juga datang dari perspektif ekonomi, yang *notabene*, alasan ekonomi adalah dasar pemerintah ingin memindahkan ibu kota. Selain bermaksud melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, pemerintah juga tengah mendorong redistribusi kue ekonomi ke wilayah Indonesia timur. Angka-angka BPS memang menyebutkan bahwa lebih dari 50 persen ekonomi Indonesia disumbang oleh pulau Jawa.

“Pemihakan dari daerah Timur ini belum cukup sukses sehingga ini salah satu upaya bagaimana melakukan transformasi ekonomi, mengurangi ketimpangan wilayah. Pemerataan dengan benar-benar bangun pusat

pertumbuhan baru yang nyata,” kata Plt Direktur Regional II Bappenas Mohammad Ruodo, dalam sebuah diskusi virtual yang diadakan Forum Merdeka Barat pada Rabu (2/2).

Klaim pemerintah ini mendapat banyak pertentangan dari publik. Misalnya, klaim redistribusi ekonomi ke Indonesia timur dengan mudah dipatahkan oleh sebuah asumsi bahwa yang tengah di bangun di Kalimantan adalah pusat administrasi, bukan pusat bisnis seperti yang hari ini dibangun di Jakarta.

Direktur Institute for Development of Economics dan Finance (Indef) Tauhid Ahmad beranggapan sebaliknya. Dia mengkhawatirkan bahwa pembangunan IKN tidak akan membuat ramai IKN, yang justru akan ramai adalah daerah-daerah penyangganya.

“Kami khawatir justru ibukota baru itu tidak bisa menjadi pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi, tapi yang berkembang justru daerah penyangganya,” kata Tauhid Ahmad, dikutip dari *Sindonews.com* (Minggu, 30/1).

Selain itu, sebetulnya, sejak disahkannya undang-undang tentang otonomi daerah lebih dari 20 tahun lalu, sarana pemerintah daerah untuk mengelola potensi lokal menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sangat terbuka lebar. Dan, terbukti bahwa beberapa daerah berhasil mengembangkan potensi lokalnya berkat otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat.



Suharso Monoarfa



Dalam hal ini, diperkirakan bahwa dampak ekonomi yang akan dihasilkan dari pemindahan ibu kota baru, tidak akan sebesar yang diekspektasikan oleh pemerintah. Beberapa catatan bisa dijabarkan di sini.

Pertama, karakteristik ekonomi pulau Kalimantan dinominasi oleh sektor ekstraktif—pertambangan dan perkebunan. Dari catatan sejarah, daerah-daerah yang sangat bergantung pada sektor ekstraktif, akan minim peran dalam mendorong

lahirnya industri-industri kecil yang menghidupkan ekonomi masyarakat.

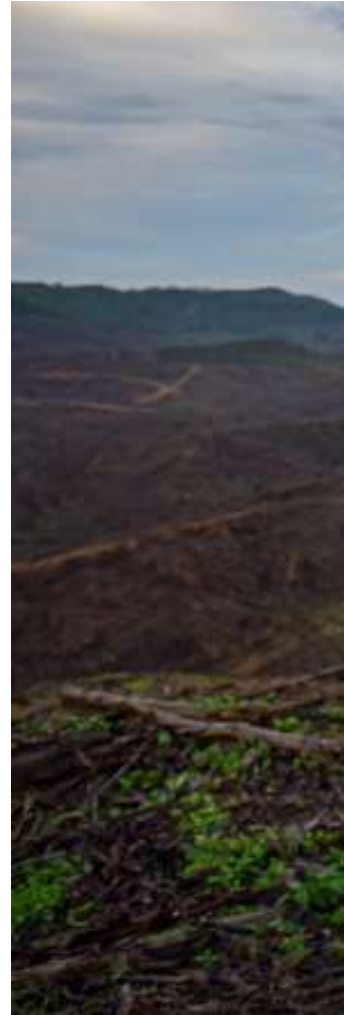
Kedua, pusat-pusat ekonomi tidak banyak tersedia di Kalimantan. Pasar terbesar ekonomi Indonesia Berada di pulau Jawa. Maka, berupaya memindahkan pusat ekonomi dan pasar ke Kalimantan adalah dua pekerjaan yang membutuhkan biaya pengorbanan besar.

Belum lagi, para pegawai yang akan tinggal di ibu kota baru diperkirakan akan rutin meninggalkan ibu kota di

setiap libur akhir pekan tiba untuk mengunjungi sanak famili yang ditinggalkan di Jawa.

Selain itu, pembangunan ibu kota baru yang diberi nama “Nusantara” tersebut, semakin menuai kontra seiring dengan kebutuhan dana yang besar. Sempat muncul polemik bahwa beberapa pos dana akan diambilkan dari sumber Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), meski kemudian diralat oleh pemerintah.

Pemerintah menyebut bahwa 20



Masterplan pembangunan Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur

persen pendanaan pembangunan ibu kota negara akan diambil dari APBN, sementara 80 persen sisanya diusakan dari dana swasta. Publik menilai bahwa penggunaan dana APBN untuk pembangunan ibu kota negara di masa pemulihan pandemi seperti saat ini dipandang sebagai kebijakan yang kurang prioritas.

Di sisi lain, publik juga bisa membayangkan, bahwa beberapa kota di Indonesia yang berhasil dibangun melalui dana investasi swasta justru hanya menjadi konsumsi eksklusif kelas menengah-atas.

Tentu, besaran dana APBN yang dipatok mencapai 20 persen tersebut berpotensi membengkak. Maka kemudian, proses penggunaan perlu dilakukan dengan hati-hati.

Sementara itu, publik yang setuju pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan menilai bahwa beban Jakarta sudah terlalu berat. Tidak

hanya Jakarta, sebetulnya, tetapi pulau Jawa secara keseluruhan karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal di pulau ini.

Jakarta dianggap bukan kota yang ideal sebagai representasi ibu kota negara yang harusnya ramah lingkungan dengan penataan kota yang modern (*smart city*). Di sisi lain, arus urbanisasi besar-besaran (*over-urbanization*) yang terjadi di Jakarta menambah suburnya patologi sosial di masyarakat. Padahal, sejatinya, urbanisasi adalah salah satu tahap suatu negara mencapai kemakmuran.

Selain itu, lingkungan Jakarta yang sering banjir, semakin menguatkan argumentasi pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan.

Keberlanjutan dan Pemerataan

Kendati demikian, hal-hal yang mendasar perlu diketengahkan di sini terlepas dari pro dan kontra yang terus

mengiringinya, bahwa pemindahan Ibu Kota semestinya memerhatikan aspek keberlanjutan dan pemerataan, selain faktor urgensi yang memang menjadi dasar pemikiran bersama, termasuk melalui tahap kajian yang matang baik secara sosial, budaya, dan politik.

Sebab, jangan sampai pemindahan Ibu Kota justru menyebabkan penyakit sosial yang sebetulnya bisa dihindari jika semua kemungkinan yang akan terjadi bisa dimitigasi dengan baik. Dinamisator JATAM Kalimantan Timur Pradarma Rupang mengatakan,



Presiden Jokowi saat meninjau lokasi Ibu Kota Negara yang baru

pemindahan ibu kota akan menjadi beban bagi Kalimantan Timur.

“Sebanyak 73 persen luas Kaltim sudah diberikan untuk izin ekstraksi sumber daya alam dalam bentuk konsesi pertambangan, perkebunan sawit dan izin kehutanan. Sisanya, merupakan kawasan hutan lindung yang akan ditargetkan untuk ibu kota,” kata Pradarma.

Menurut catatan JATAM terdapat 13,83 juta hektar izin dan 5,2 juta di antaranya adalah izin pertambangan. Data JATAM juga menyebut adanya 1.190 izin usaha pertambangan (IUP)

di Kalimantan Timur dan 625 izin di Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Kaltim itu sudah menanggung beban atau krisis akibat kebijakan eksploitasi sumber daya alam. Sekarang dibebankan lagi dengan penunjukkan wilayah untuk ibu kota,” ujar Rupang, dikutip dari *Kompas.com*, Selasa (27/8/2019).

Alasan pemindahan Ibu kota adalah untuk membangun model ibu kota yang lebih ramah lingkungan harus dipegang dengan sungguh-sungguh. Pembukaan lahan untuk ibu kota baru, semestinya diiringi dengan

tumbuhnya lahan perhutanan baru yang berfungsi menyeimbangkan ekosistem lingkungan, menjaga keragaman biodiversitas.

Termasuk, dalam kaitan ini, pembangunan ibu kota baru mesti memperhatikan amanat institusi, yakni perekonomian hendaknya didistribusikan secara merata. Jurang ketimpangan seyogianya ditutup jika tujuan utama pembangunan ibu kota negara di Kalimantan itu adalah menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru. **Zar**

TERGESA-GESA BERPINDAH IBU KOTA

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur kembali mengundang kritik dari berbagai pihak. Mereka menyoal banyak hal, mulai dari akses terhadap kearifan lokal, dampak lingkungan hidup, ekonomi masyarakat setempat, hingga alokasi anggaran pembangunan IKN.

Wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan mendekati rencana matang dengan adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sudah disahkan oleh DPR pada bulan lalu. Kebijakan ini tentu menuai kontroversi terkait beberapa aspek seperti pembiayaan, realisasi waktu, dan feasibilitas daerah di Kalimantan Timur.

Untuk membangun IKN tentu tidak hanya menyiapkan infrastruktur dan lingkungannya, ada hal yang lebih penting dan mendasar yaitu sumber daya manusianya. Hal ini yang sangat penting dan harus dipertimbangkan dengan matang oleh pemerintah. Diperlukan pemahaman dan perencanaan aspek sosial-budaya dan sosial-ekonomi yang komprehensif.

Perencanaan aspek sosial dilaksanakan dengan memastikan faktor-faktor, seperti penerimaan

masyarakat, peningkatan kualitas SDM, pemanfaatan dan pengembangan kearifan lokal, sumber-sumber penghidupan masyarakat, serta peran berbagai pihak termasuk generasi milenial dalam pembangunan IKN.

Melansir dari Kominfo dalam dialog nasional VII pemindahan IKN yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, menegaskan telah melakukan berbagai kajian termasuk aspek demografi, sosial dan budaya dalam pemindahan IKN. Kajian yang dilakukan merupakan tahap awal, yang perlu didiskusikan dan didalami lebih lanjut dengan berbagai pakar.

Dosen Arsitektur dan Perencanaan Universitas Gadjah Mada Laretna Adishakti mengungkapkan pentingnya pembangunan dengan perspektif budaya yang menyeluruh. “Membangun Ibu Kota Negara merupakan sebuah *legacy* yang dilakukan manusia. Semoga nantinya Ibu Kota Negara menjadi saujana pusaka yang tetap mempertahankan kearifan lokal,”.

Respons Masyarakat

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur telah mengundang reaksi dari masyarakat

sekitar. Reaksi ini disampaikan melalui bentuk maklumat yang dikeluarkan oleh masyarakat pulau Kalimantan yang ditandatangani oleh sejumlah organisasi yakni Majelis Adat Dayak Nasional, Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Kesultanan Paser, Kesultanan Banjar, dan Dewan Adat Dayak Provinsi se-Pulau/Banua Kalimantan.

Setidaknya ada lima poin yang disampaikan dari maklumat tersebut. *Pertama*, masyarakat pulau Kalimantan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden RI Joko Widodo dan segenap pimpinan dan Anggota DPR RI, atas pengesahan UU IKN pada Tanggal 18 Januari 2022.

Kedua, Menyatakan kesiapan memberikan dukungan dan terlibat secara penuh dan sungguh-sungguh, atas perwujudan dan pelaksanaan pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur, dengan konektivitas pembangunan kewilayahan antarprovinsi yang ada di Pulau/Banua Kalimantan.

Ketiga, masyarakat pulau Kalimantan ingin pembangunan IKN melibatkan segenap potensi putra-putri asli Pulau/Banua Kalimantan dalam menduduki jabatan-jabatan strategis di Badan



Laretna Adishakti

Otorita IKN dengan memberikan afirmasi yang tertulis dengan jelas dalam peraturan turunan UU IKN.

Keempat, pembangunan IKN harus memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal Pulau/Banua Kalimantan (membangun fasilitas dan simbol-simbol adat, adab dan pusat budaya) dalam ruang lingkup utama di wilayah IKN.

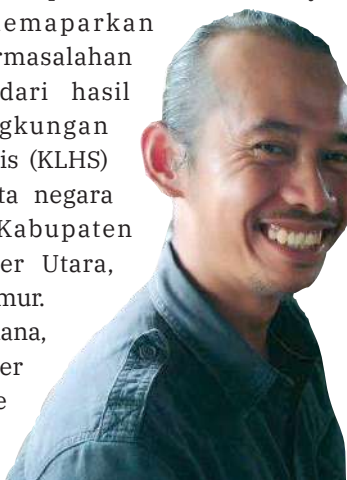
Kelima, Melibatkan secara langsung segenap pemangku kelembagaan adat Pulau/Banua Kalimantan dalam merumuskan dan menyusun peraturan perundang-undangan sebagai turunan dari UU IKN.

Selain dari masyarakat pulau Kalimantan, respon lain datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pakar ekonomi dan pakar kebijakan publik. Kebanyakan dari mereka bernada kontra terhadap pembangunan IKN karena dinilai akan merusak lingkungan dan merugikan perekonomian.

Permasalahan Lingkungan

Dalam perspektif lingkungan, IKN baru juga mendapat banyak kritikan. Pasalnya, belum ada Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang jelas dari pembangunan IKN. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memaparkan ada tiga permasalahan lingkungan dari hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) calon ibu kota negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Wahyu Perdana, selaku manajer kampanye Eksekutif Nasional



Wahyu Perdana

Walhi menyatakan ada tiga permasalahan diantaranya, *pertama* ancaman terhadap krisis air. Ancaman ini salah satunya menyangkut sistem hidrologi. Sistem tersebut akan terganggu dan air tanah tidak memadai. Lokasi IKN merupakan wilayah strategis dan pendukung kebutuhan air bagi 5 wilayah, yaitu Balikpapan, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara khususnya Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Jawa dan Kecamatan Loa Kulu. Selain itu, wilayah tangkap air (*catchment area*) terganggu, akan ada risiko terhadap pencemaran air dan kekeringan.

Kedua, ancaman terhadap flora dan fauna. Ancaman ini akan meningkatkan antara risiko konflik satwa dan manusia. Kasus yang sudah terjadi munculnya buaya di pemukiman warga. Flora dan fauna yang memiliki fungsi jasa penting terhadap ekosistem dan keberadaan ekosistem mangrove di Teluk Balikpapan seluas 2.603,42 hektar akan terancam.

Ketiga, ancaman terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Menurut pernyataan Wahyu lokasi IKN adalah wilayah yang rentan terhadap pencemaran minyak. Imbas dari pencemaran ini akan berisiko terhadap penurunan nutrient di Kawasan pesisir dan laut. Selain itu, tingginya konsesi tambang dan banyaknya lubang tambang yang belum ditutup akan meningkatkan risiko pencemaran pada air tanah, permukaan tanah dan kawasan pesisir.

Anggaran IKN

Selain permasalahan lingkungan, pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan ternyata tak memiliki skema matang terkait pembiayaan proyek tersebut. Awalnya, pemerintah tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun, pemerintah kemudian mengumumkan skema pembiayaan akan banyak dibebankan pada APBN sekitar 53,3 persen.

Sisanya, pendanaan didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 46,7 persen. Bahkan, anggaran IKN pada 2022 akan menggunakan dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal ini mengundang kritik pakar ekonomi dari Universitas Indonesia Faisal Basri. “Jadi, bukan hanya melewat. Ini menandakan bahwa semuanya tidak dikerjakan dengan baik. Berarti informasi yang didapat Pak Jokowi itu ngawur,” tegas Faisal dikutip dari Kompas Tv.

Pemindahan IKN baru ke Kalimantan juga dinilai belum begitu tepat. Apalagi di masa pandemi dimana krisis multidimensi menerpa Indonesia. Memaksakan pemindahan IKN dalam waktu singkat menandakan pemerintah ingin segera meninggalkan *legacy* tanpa mempertimbangkan permasalahan-permasalahan lain yang saat ini masih berlangsung.

Selain itu, proyek yang besar seperti pemindahan IKN, jika tidak ada skema yang matang maka akan memiliki peluang terjadinya skandal. Dana yang belum jelas dan masih akan dicari dinilai tidak tepat dalam model pembangunan. Seharusnya, pemerintah dalam hal ini sebagai pelaksana menyiapkan rencana yang matang dan tata kelola yang baik. **Aldi**

PENDIDIKAN

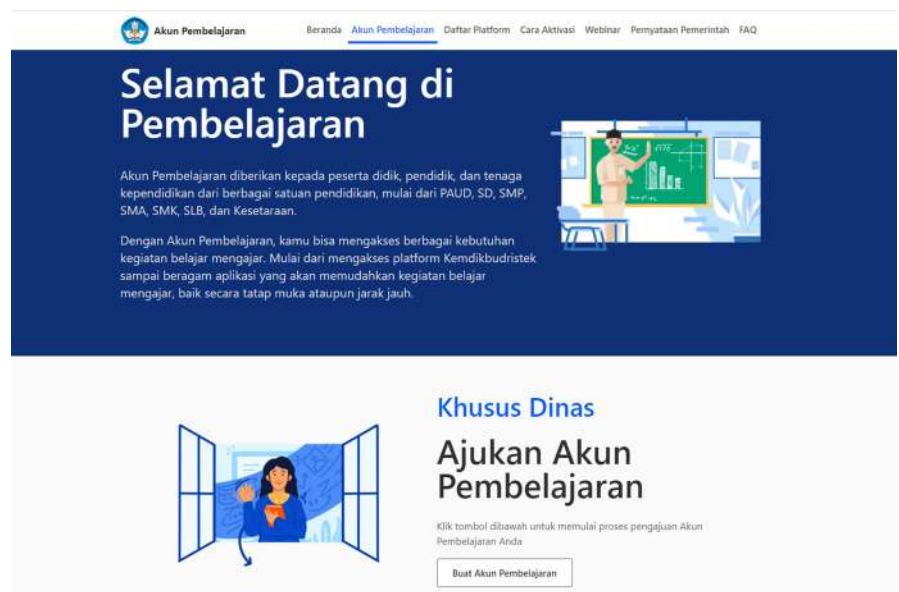
Visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju dan berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut pemerintah sudah banyak mengeluarkan kebijakan dan program, salah satunya *Merdeka Belajar*.

M*erdeka Belajar* memberikan kebebasan dalam belajar yaitu bisa di mana saja, kapan saja, bahkan dari sumber mana saja. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menerapkan metode belajar dengan berbagai sumber belajar. Salah satunya belajar melalui teknologi digital.

Saat ini, dunia pendidikan sedang menghadapi tantangan *learning loss* akibat pandemi Covid-19. Tentunya ini menjadi perhatian bersama baik pemerintah, guru, orang tua maupun masyarakat umum untuk memberikan pengawasan dan bimbingan agar anak-anak tetap dapat mengakses pembelajaran.

Strategi utama *Merdeka Belajar* salah satunya adalah membangun platform pendidikan nasional yang berbasis teknologi. “Kebutuhan digitalisasi dalam dunia pendidikan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari saat ini,” kata Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim dalam sebuah kesempatan di Jakarta.

Menurut Nadiem, digitalisasi sekolah akan memudahkan guru dalam mengakses informasi dan materi yang lebih variatif. Namun, sekolah membutuhkan alat TIK untuk melakukan digitalisasi tersebut.



BELAJAR.ID, **WUJUD DIGITALISASI** **PENDIDIKAN**

“Murid-murid bisa berpartisipasi dalam pendidikan yang lebih dinamis dan berbagai macam adopsi teknologi yang sudah terjadi di masa pandemi ini tidak sia-sia,” ucap dia. Menurut Nadiem salah satu tujuan dalam digitalisasi sekolah, yakni mewujudkan infrastruktur kelas dan sekolah masa depan.

Kemendikbudristek luncurkan belajar.id

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemendikbudristek telah menyediakan akun pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru, murid dan orang tua melalui platform *belajar.id*. Kepala SMP PGRI 6 Surabaya Banu Atmoko mengatakan, *belajar.id* merupakan akun pembelajaran

elektronik yang memuat nama akun yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

“Penyediaan akun pembelajaran ini juga sebagai bentuk digitalisasi sekolah,” ujar Banu Atmoko. Akun ini nantinya bisa digunakan untuk mengakses layanan/aplikasi pembelajaran berbasis elektronik untuk mendukung pembelajaran dari rumah maupun pembelajaran tatap muka melalui penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),” katanya, dikutip dari akun resmi Dispendik Surabaya.

Banu mengungkapkan, kegiatan pelatihan pemanfaatan akun belajar.id meliputi kegiatan-kegiatan yang

bertujuan untuk perbaikan dan pertumbuhan kemampuan (*abilities*), dan keterampilan (*skill*) dalam memanfaatkan akun *belajar.id*.

Digitalisasi sekolah tersebut diharapkan dapat menunjang terjadinya percepatan penyiapan pelajar-pelajar Pancasila sebagai tunas-tunas bangsa. Digitalisasi sekolah yang merupakan sebuah terobosan khususnya di jenjang sekolah dasar, menjadi satu hal yang harus diadaptasi.

Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih menyatakan bahwa seluruh *stakeholder* pendidikan hendaknya melakukan transformasi paradigma menuju model pendidikan yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi.

“Kita semua harus mengubah paradigma kita dalam belajar, paradigma kita dalam berpikir, paradigma kita dalam mengakses sumber belajar. Kita sebagai orangtua, guru sebagai fasilitator, harus mengadvokasi anak-anak kita maupun masyarakat untuk mengakses sumber belajar dalam bentuk digital,” kata Sri Wahyuningsih.

Secara konsep, lanjutnya, digitalisasi sekolah merupakan implementasi dari *new learning* yang disiapkan untuk menghadapi revolusi industri. Karakteristik *new learning* tersebut adalah *student center*, *multimedia*, *collaborative work*, *information exchange* dan *critical thinking in an information making*.

“Dalam rangka percepatan digitalisasi tersebut, Kemendikbudristek selalu berupaya agar ketersediaan sarana pembelajaran berupa peralatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dapat disiapkan secara bertahap. Baik itu oleh pemerintah pusat, pemerintah

daerah, maupun mitra-mitra terkait,” kata Direktur Sekolah Dasar.

Teknologi Memudahkan Akses Pendidikan

Pengembang Teknologi Ahli Muda Kemendikbudristek Wibowo Mukti menuturkan, platform *belajar.id* yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek bertujuan untuk memudahkan para peserta didik dalam mengakses berbagai layanan pendidikan.

“Akun *belajar.id* dari Kemendikbudristek ini memberikan manfaat dalam pembelajaran sehari-hari di sekolah. Selain peserta didik dan tenaga kependidikan, *belajar.id* juga dapat dimanfaatkan oleh kepala dinas pendidikan, kepala bidang pada dinas pendidikan, pengawas sekolah, penilik sekolah, pamong belajar dan yang terakhir adalah pegawai kementerian,” kata Wibowo.

Akun pembelajaran ini juga dapat digunakan untuk mengakses platform-platform lain yang dikembangkan oleh Kemendikbudristek. Salah satunya adalah platform merdeka mengajar yang akan segera diluncurkan sebagai platform edukasi, yang menjadi *tools*-nya para guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila.

“Selain itu juga akun ini dapat mendukung guru untuk mengajar, belajar berkarya dan tentunya untuk menjadi yang lebih baik,” kata Wibowo. Nantinya, akun belajar ini dapat mengakses rapor pendidikan, di mana rapor pendidikan ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan evaluasi pendidikan yakni perencanaan berbasis data yang valid.

“Dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan, baik untuk satuan pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, provinsi maupun pusat,” imbuhnya.

Cara Mudah Mendaftar *belajar.id*

Edginawan Haddendi Hendra, Govtech Edu Telkom Direktorat Digital Business and Technology menambahkan, cara mendapatkan akun pembelajaran adalah pertama bisa melalui operator sekolah di sekolah masing-masing. Kemudian juga bisa langsung secara mandiri membuka halaman website *belajar.id*.

Untuk operator satuan pendidikan bisa membuka halaman *pd.data.kemdikbud.go.id*, lalu login menggunakan akun SSO Data Pokok Pendidikan (Dapodik), di mana akunnya terdaftar di *sdm.data.kemdikbud.go.id*. Kemudian nanti *download*. “Selanjutnya buka file yang sudah di-*download* dan berikan informasi akun tersebut kepada penggunaanya langsung, jangan diberikan kepada orang lain lagi,” kata Edginawan menjelaskan.

Kemudian pengguna akun *belajar.id* bisa secara mandiri memeriksa akun pembelajarannya melalui website yang telah disediakan di akun *belajar.id* melalui HP ataupun *desktop*. Setelah membuka akun *belajar.id*, pengguna harus mengisi data diri, jenis penggunaanya, tanggal lahir, NISN diisi sesuai data di Dapodik.

Langkah selanjutnya, setelah dibuka nanti akan kelihatan apakah memang akun pembelajarannya ada atau tidak. Untuk mendapatkan akunnya sendiri nanti di klik, kirim detail akun ke *e-mail* pribadi. Tapi kalau memang nomor SMS-nya ada, mungkin nanti bisa dikirimkan melalui SMS,” katanya.

Kemudian langkah berikutnya periksa detail akun pembelajaran anda di *e-mail* pribadi, lalu klik mulai aktifkan akun pembelajaran. Nanti itu akan dilakukan proses aktivasi melalui mail.google.com. Ika

TIADA IPA-IPS DALAM KURIKULUM MERDEKA



Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim telah meluncurkan *Kurikulum Merdeka* pada 11 Februari 2022. Lebih lanjut, Mendikbudristek akan meluncurkannya ke sekolah-sekolah lain selain sekolah penggerak.

Nadiem mengklaim kurikulum tersebut bisa menciptakan kegiatan belajar menjadi lebih fleksibel. Tak pelak, beberapa opsi ditawarkan Nadiem dalam kurikulum ini, di antaranya yaitu: *Pertama*, sekolah akan diberikan kebebasan dalam menentukan kurikulum sesuai dengan kesiapannya masing-masing. Sekolah, kata dia, diperbolehkan tetap menggunakan kurikulum 2013 bila belum merasa nyaman melakukan perubahan.

“Tidak dipaksakan sama sekali,

tidak perlu khawatir lagi bahwa sekolah-sekolah ganti menteri ganti kurikulum,” ujar Nadiem.

Kedua, Nadiem mengimbau sekolah yang ingin melakukan transformasi namun belum siap dengan perubahan besar, diperkenankan memilih kurikulum darurat; *Ketiga*, sekolah yang menginginkan dan siap dengan perubahan, diperbolehkan menggunakan kurikulum merdeka.

“Kurikulum ini adalah opsi, pilihan. Karena kita sudah sangat sukses dengan kurikulum darurat, ini pilihan bagi sekolah mengikuti pilihannya masing-masing,” tutur Nadiem.

Di sisi lain, Nadiem menilai kurikulum 2013 masih memiliki sejumlah kelemahan dalam penerapannya selama ini. Melalui *Kurikulum Merdeka*, kegiatan belajar

mengajar dapat lebih fleksibel bagi satuan pendidikan.

“Pada saat ini kurikulum yang digunakan dalam skala nasional ada beberapa kelemahan yang sudah kita identifikasi. Sebenarnya ini bukan satu hal yang baru,” kata Nadiem.

Keunggulan Kurikulum Merdeka

Nadiem mengklaim salah satu keunggulan *Kurikulum Merdeka* ini adalah tidak adanya program peminatan bagi siswa pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Siswa SMA, kini bisa memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan aspirasinya di dua tahun terakhir sekolah.

“Dia tidak terkotak kotak kepada misalnya IPA atau IPS saja. Mereka bisa memilih sebagian IPA, materi pelajaran IPA, sebagian IPS,” kata Nadiem.

Kebebasan memilih, tidak hanya diberikan kepada siswa saja, melainkan juga kepada guru serta sekolah. Dia menjelaskan, guru akan diberikan hak untuk maju atau mundur di dalam suatu fase kurikulum dengan menyesuaikan tahap pencapaian dan perkembangan murid-murid.

“Karena guru itu terpaksa untuk terus maju tanpa memikirkan siapa yang ketinggalan. Jadi guru ini bisa memilih kalau misalnya guru itu merasa dia mau lebih cepat itu bisa, kalau guru itu merasa dia mau pelan-pelan sedikit untuk memastikan tidak ada (murid) yang ketinggalan juga bisa,” ujar Nadiem.

Tak hanya itu, keunggulan lain

kurikulum merdeka ini sekolah bisa memilih untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Kebebasan memilih ini membuktikan bahwa Kurikulum Merdeka tidak akan membelenggu otonomi sekolah.

“Jadinya level otonomi, level kemerdekaan, bagi sekolah, bagi guru, dan bagi peserta didik itu sangat tinggi. Ini bukan kurikulum yang ingin membelenggu sekolah-sekolah. Ini adalah kurikulum yang paling merdeka yang memberikan kemerdekaan kembali kepada sekolah, hak-hak memilih bagi murid, guru, dan sekolah,” ucap Nadiem.

Langkah Tepat Nadiem

Pemerhati pendidikan Ina Liem menilai, langkah Mendikbud Nadiem untuk menghapus pembagian jurusan IPA, IPS dan Bahasa di SMA sangatlah tepat. Sebab pengelompokan ini sering

terjadi masalah dan tidak sesuai dengan tren karir siswa.

“Sebagai Konsultan karir dan jurusan, memang pengelompokan jurusan IPA, IPS dan Bahasa ini kurang efektif, menimbulkan banyak problem kemudian dan tidak sesuai dengan tren karir masa kini,” ujar Ina Liem.

Selain itu, pengelompokan ini juga menyulitkan profil siswa. Ia mencontohkan misalnya ada siswa yang memilih jurusan IPS karena menghindari Fisika. Padahal ia menyukai Biologi dan memiliki minat yang cocok di bidang budidaya perikanan. Setelah lulus ia akan kesulitan masuk universitas sesuai minatnya karena universitas tidak mau menerima lantaran dari jurusan IPS. Dampaknya, sulit mencari SDM unggul yang cocok dan minat sesuai dengan bidang masing-masing.

Selain itu, kurikulum yang berlaku saat ini terlalu padat dan kaku.

Kepadatan materi yang ditempuh peserta didik membuat mereka tidak bisa mempelajari secara mendalam. Padahal setiap anak memiliki kemampuan dan peminatan yang berbeda-beda.

Apabila dipaksakan dengan berbagai materi, maka siswa yang kurang memahami akan lebih tertinggal. Materi yang membosankan dan terbatasnya toolkit guru juga menjadi salah satu kebosanan peserta didik.

Tantangan Besar

Perubahan kurikulum merdeka tentu akan menghadapi tantangan besar termasuk kompetensi guru. Pasalnya, mengubah mindset guru yang sudah nyaman dengan kurikulum lama menjadi lebih inovatif dan kolaboratif bukanlah perkara mudah. Selain itu, tantangan lain adalah merubah syarat masuk perguruan tinggi. Apabila syarat ini tidak dirubah, maka kurikulum *prototipe* akan kurang diminati.

Misalnya untuk masuk ke PTN dengan jurusan STEM (Science, Technology, Engineering dan Mathematics) soal ujian yang diberikan mencakup konten Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi. Padahal dengan kurikulum *prototype*, siswa kelas 11 boleh memilih Matematika dan Fisika saja tanpa Kimia dan Biologi. Ini menimbulkan kesulitan belajar bagi siswa karena harus bimbingan belajar.

Terlebih kemdikbud tidak mempunyai wewenang untuk mengatur syarat masuk perguruan tinggi. Maka perubahan kurikulum menjadi kurikulum merdeka ini haruslah berkesinambungan dan diikuti perubahan ujian masuk Perguruan Tinggi Negeri. **Ika**



PRAKTIK GURU GUNAKAN PLATFORM MERDEKA BELAJAR



Seorang guru menggunakan sumber belajar boneka untuk menjelaskan materi pelajaran. Program Merdeka Belajar memberikan pendidik untuk berkreasi dan berinovasi dalam proses pembelajaran

Platform Merdeka Mengajar yang telah diluncurkan di Platform Merdeka Belajar Episode ke-15 bertujuan untuk membantu para guru mengajar sesuai dengan kemampuan murid, menyediakan latihan untuk meningkatkan kompetensi, serta berkarya dan menginspirasi rekan sejawat.

“Guru harus bisa efektif memberikan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berdampak pada daya serap anak, maka dari itu saya harap Platform Merdeka Mengajar ini dapat memberi fasilitas yang dapat digunakan guru untuk mewujudkan pembelajaran yang memerdekakan,” ucap Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus,

Yaswardi, dalam Silaturahmi Merdeka Belajar bertema “Belajar, Mengajar, dan Berkarya bersama Platform Merdeka Mengajar”, Kamis (24/2) secara virtual.

Merespons hal tersebut, Guru SMP Muhammadiyah 2 Tepus, Yogyakarta, Susilo Windriyatno, mengakui bahwa para guru dapat melihat referensi dan mengambil inspirasi dari guru-guru lain, serta dapat mengambil aksi nyata dari berbagai modul ajar, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), hingga asesmen yang tersedia dalam platform.

“Saya memakai asesmen diagnostik di Platform Merdeka Mengajar. Saya ingin tahu sejauh mana anak-anak paham materi yang saya sampaikan. Apakah saya perlu mengulang lagi, atau saya bisa lanjutkan materi saya. Nah, asesmen ini memberi kita umpan balik tentang pemahaman siswa, karena ketika siswa selesai mengerjakan isian di platform ini, otomatis akan ada umpan balik untuk guru,” tutur Susilo.

“Apakah siswa sudah cakap, perlu intervensi khusus, atau sudah mahir, semuanya diinformasikan. Ini benar-benar membantu saya memetakan kemampuan anak-anak saya, sehingga saya bisa memberi pembelajaran sesuai kemampuan siswa-siswa saya,” terang Susilo.

Susilo juga mengakui banyak video inspirasi di Platform Merdeka Mengajar yang membuatnya tambah semangat mendidik. “Ada juga fitur pelatihan

mandiri yang sangat bermanfaat. Di sini, saya bisa berlatih sendiri, di mana pun, kapanpun, tanpa terhalang tempat dan waktu. Saya belajar apa itu pendidikan yang memerdekakan, bagaimana caranya mempraktikkan Kurikulum Merdeka, dan lain-lain. Platform ini sangat nyaman dan mudah digunakan. Semoga bapak dan ibu guru dapat mengikuti jejak-jejak kita belajar secara mandiri,” tutur Susilo.

Diakui Susilo, dirinya yang dulu harus membuat RPP terlebih dahulu sebelum mengajar, kini dapat mengakses materi-materi RPP yang tersedia di Platform Merdeka Mengajar. “RPP bisa kita modifikasi sesuai keadaan di sekolah kita,” ucap Susilo.

Samuel Kuriake Balubun dari SMA Negeri 5 Tual, Maluku, mengakui Platform Merdeka Mengajar sangat penting dan bermanfaat dalam pelaksanaan layanan belajar di sekolah. “Karena di platform ini tersedia berbagai jenis modul ajar yang bisa dimanfaatkan para guru untuk mengembangkan pembelajarannya,” ucap Samuel.

Senada dengan Samuel, Windarmansyah dari SMK Negeri 01 Palembang, Sumatera Selatan, mengatakan dirinya banyak mendapatkan ilmu baru. “Terutama untuk menyampaikan materi pembelajaran pada siswa dengan menggunakan Profil Pelajar Pancasila,” ucap Windarmansyah.

Guru SD Negeri Jarit 01, Lumajang, Vivi Wahyuni, mengamini hal tersebut. Ia merasakan platform ini sangat bermanfaat bagi dirinya yang sibuk mengajar sekaligus mengurus rumah tangga. “Biasanya kita guru-guru itu kebanyakan waktunya penuh ya di sekolah. Di rumah sudah capek, mau buka laptop ini bagaimana, pokoknya ruwet, apalagi ibu-ibu seperti saya.

Dengan Merdeka Mengajar, kita tinggal pegang telepon genggam saja, kita bisa menonton video inspirasi, bisa melihat inovasi guru lain, yang kalau memang cocok, bisa langsung kita gunakan,” terang Vivi.

“Guru butuh referensi untuk memahami pembelajaran yang memerdekakan. Bagaimana supaya siswa mengalami pembelajaran yang



**Kami
membutuhkan
sesuatu yang
setidaknya dalam
genggaman.
Platform ini sangat
lengkap, ada buku
buat gurunya,
ada buku buat
muridnya. Kita
tinggal comot saja**

Vivi Wahyuni,
Guru SD Negeri Jarit 01,
Lumajang

tidak tebas rata, yang berdasarkan kemampuan siswa masing-masing. Kami membutuhkan sesuatu yang setidaknya dalam genggaman. Platform ini sangat lengkap, ada buku buat gurunya, ada buku buat muridnya. Kita tinggal comot saja,” ucap Vivi menceritakan pengalamannya, yang seperti Susilo, mengaku amat terbantu video-video inspirasi di Merdeka Mengajar

“Kita dapat mengambil apapun yang

ada di modul-modul pada Platform Merdeka Mengajar, kemudian kita sesuaikan dengan kemampuan siswa kita. Jika ada pelajaran yang tidak kita mengerti, kita bisa lihat inovasi guru lain. Kalau cocok, bisa kita terapkan langsung bagi kelas kita,” ucap Vivi.

Mudahnya Pakai Platform Merdeka Mengajar

Menggunakan Platform Merdeka Mengajar, diakui Susilo dan Vivi, sangat mudah. Pertama-tama, para guru dan kepala sekolah dapat masuk ke platform *Merdeka Mengajar* dengan menggunakan Akun Google berdomain *belajar.id* (Akun Pembelajaran) atau *madrasah.kemendikbud.go.id* (Akun Madrasah). *Merdeka Mengajar* dapat diakses melalui penjelajah atau browser dengan tautan *guru.kemdikbud.go.id* maupun lewat aplikasi di *Google Play Store* (Android).

Beberapa produk dan fitur dalam platform pun memungkinkan untuk diakses secara luring, misalnya dengan mengunduh materi Perangkat Ajar ke gawai pengguna.

Vivi mengakui senang dengan pendekatan pembelajaran berbasis proyek (project based learning). “Sebelumnya, sekolah kami sebagai Sekolah Penggerak, belum tahu pembelajaran berbasis proyek. Kemudian kita belajar dari Platform Merdeka Mengajar, ternyata ada semua di situ dan mudah digunakan,” terang Vivi.

“Sayaberbfokuskepada pembelajaran berbasis proyek agar anak-anak lebih fokus ke praktiknya, dibandingkan ceramah tapi anak belum paham. Saya membuat anak-anak mengerjakan proyek mandiri maupun kelompok, misalnya lewat membuat video. Ini sekaligus meningkatkan kemampuan siswa di bidang TIK,” ucap Vivi.



Terkait harapan bagi *Merdeka Mengajar*, Susilo menguraikan, “Saya harap, bisa ditambahkan fitur unggahan atau upload hasil karya siswa dan fitur unduhan sertifikat jika guru melakukan pelatihan mandiri. Kami sebagai guru juga menggunakan akun belajar.id, mungkin bisa ditautkan

dengan Info GTK supaya makin mudah digunakan.”

“Saya berharap ada fitur unggah RPP atau modul ajar, sehingga kami bisa berbagi RPP buatan sesama guru, dokumentasi foto-foto siswa, dan untuk bukti karya seperti video dapat terkoneksi ke YouTube, agar bisa

dilihat guru-guru lain,” harap Vivi.

Yaswardi mengaku gembira mendengar pengalaman para guru. “Semoga ini menjadi daya tarik untuk guru-guru kita dari Sabang hingga Merauke supaya aktif menggunakan Platform Merdeka Mengajar,” tutur Yaswardi.

Yaswardi juga berharap agar para pemimpin dinas pendidikan mendorong dan memberi kesempatan bagi para guru dan kepala sekolah untuk aktif mengakses Platform Merdeka Mengajar. “Bagi para kepala sekolah, mari berikan ruang kemudahan bagi para guru untuk mendapatkan informasi terhadap Platform Merdeka Mengajar, agar para guru makin mampu mengajar anak-anak kita dengan optimal,” imbau Yaswardi. **Naf**

Mari berikan ruang kemudahan bagi para guru untuk mendapatkan informasi terhadap Platform Merdeka Mengajar, agar para guru makin mampu mengajar anak-anak kita dengan optimal.

Yaswardi,
Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus



DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

Platform **Merdeka Mengajar**

Telah Tersedia di Play Store



Platform teknologi sebagai
teman penggerak
bagi Guru dalam mengajar,
belajar, dan berkarya.



**Merdeka
Mengajar**

**MERDEKA
BELAJAR**


G20 INDONESIA
2022

POLITIK LOKAL MEMENGARUHI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAERAH

Praktik desentralisasi pendidikan tidak selamanya memberikan dampak positif bagi keberlangsungan dan kemajuan sektor pendidikan di daerah. Salah satu eksekutif negatiffnya yaitu berlangsungnya kuasa politik lokal yang mengatur kebijakan pendidikan di tingkat daerah.

Rumah Baca Cerdas (RBC) Institute A. Malik Fadjar menyelenggarakan *Bincang Pendidikan* bertajuk *Catatan Pendidikan Nasional: Dari Politisasi, Desentralisasi, Hingga Problem Pada Masa Pandemi* pada Rabu, (26/01). Di antara narasumber yang hadir, yaitu Zainuddin Maliki (Anggota Komisi X DPR RI), Alpha Amirrachman (Sekretaris Majelis *Dikdasmen* PP Muhammadiyah), dan Ramliyanto (Kepala Biro Organisasi Setda Jatim).

Alpha Amirrachman melalui hasil risetnya yang terbukukan bertajuk *Education Decentralisation: Community Participation, Market, Politic and Local*

Identity (2021) menyampaikan, pada mulanya para pemangku kebijakan menilai sistem pendidikan yang sentralistik tidaklah demokratis dan efisien. Karena alasan itu, lalu lembaga pendanaan internasional (*International Monetary Fund/IMF*) mengusulkan desentralisasi sebagai sistem pemerintahan yang baru.

Menurut dia, desentralisasi akan membawa demokratisasi dan apresiasi terhadap kebutuhan lokal. Sejak saat itulah, maka pemerintah mengeluarkan UU No.22 Tahun 1999, sehingga sistem pemerintahan Indonesia bergeser dari salah satu negara yang bersistem paling terpusat di dunia ke salah satu negara yang paling terdesentralisasi.

UU tersebut juga berisi tentang berbagai tugas administrasi yang meliputi berbagai sektor kebangsaan. Mulai dari sektor pembangunan infrastruktur, kesehatan, perdagangan, pertanian, industri, investasi, lingkungan dan lahan, hingga pendidikan, yang itu akan menjadi tanggung jawab utama bagi kabupaten dan kotamadya.

“Sementara itu, untuk sektor keamanan dan pertahanan, kebijakan asing, masalah fiskal dan moneter,

kebijakan ekonomi makro, hukum dan urusan agama menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” urai Alpha.

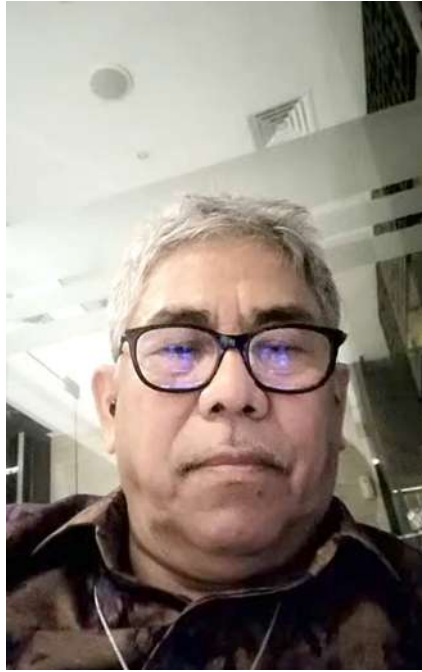
Pada acara diskusi ini, Alpha juga menyinggung praktik desentralisasi pendidikan yang salah satu dampaknya dapat memberi jalan bagi kuasa politik lokal. “Pada saat pemilihan kepala daerah, misalnya, banyak guru yang terjebak ke dalam politik lokal. Keterlibatan mereka dipakai untuk untuk mendulang suara tokoh politik tertentu, bahkan menjadikan mereka sebagai tim dengan imbalan naik jabatan,” terang pria yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) tersebut.

Sementara itu, Zainuddin Maliki mengatakan bahwa dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan layanan pendidikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Persoalannya, hal ini belum sepenuhnya terlaksana. Pemerintah dianggap kurang berhasil dalam membangun komunikasi dengan lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat.

“Akibatnya, lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat kurang mendapat perhatian dan memiliki kesan dianak tirikan. Padahal, sekolah-



Alpha Amirrachman



Zainuddin Maliki



Ramliyanto

sekolah tersebut sangat banyak jumlahnya,” terang Zainuddin.

Pada kesempatan yang sama Ramliyanto menyoroti berbagai isu strategis pembangunan pendidikan. Menurut dia, isu yang pertama adalah adanya disparitas kualitas satuan pendidikan. Hal ini masih terjadi baik antar daerah Kabupaten/Kota maupun

antar sekolah dalam satu Kabupaten/ Kota.

“Tentu saja, disparitas ini nantinya akan berpengaruh terhadap standar kualitas lulusan peserta didik,” ucap Ramliyanto.

Selanjutnya pada isu kedua, kata Ramliyanto, yaitu sarana dan prasarana. Menurutnya, ketersediaan

sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar masih sering menjadi kendala dalam peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, terutama di Jawa Timur. Dalam sistem zonasi, masih terdapat daerah (kecamatan/ desa/kelurahan) “*blank spot*”, yang tidak tersedia oleh sekolah dalam jarak yang terjangkau.

Kemudian, isu ketiga, lanjutnya, minimnya kualitas guru dan tenaga kependidikan. “Secara kualitas masih perlu peningkatan secara berkelanjutan terhadap kompetensi guru, baik kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian maupun kompetensi sosial,” terangnya.

Penting untuk diketahui, bahwa kegiatan ini diadakan melalui daring dengan diikuti lebih dari 100 peserta melalui *Zoom* dan *YouTube* dari berbagai latar belakang yang berbeda. Mulai dari guru, dosen, aktivis mahasiswa serta pelajar. **Ald/Zhar/Naf**

“Pada saat pemilihan kepala daerah, misalnya, banyak guru yang terjebak ke dalam politik lokal. Keterlibatan mereka dipakai untuk untuk mendulang suara tokoh politik tertentu, bahkan menjadikan mereka sebagai tim dengan imbalan naik jabatan.”

Alpha Amirrachman

MEMPERTANYAKAN KEADILAN UNTUK PEKERJA

Melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 tahun 2022, Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah menetapkan Jaminan Hari Tua hanya bisa dicairkan saat pekerja berusia 56 tahun dimulai pada Mei 2022. Peraturan tersebut tertuang dalam Pasal 3 Permenaker tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Permenaker ini sontak mendapat reaksi negatif dari para pekerja/buruh lantaran dianggap “menahan” hak mereka. Pada aturan sebelumnya, manfaat JHT dapat diberikan kepada peserta yang mengundurkan diri dan dibayarkan secara tunai setelah melewati masa tunggu selama satu bulan.

BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga penghimpun dana JHT melaporkan total dana program JHT mencapai Rp375,5 triliun pada 2021 atau naik sekitar 10,2 persen dari tahun sebelumnya. Sebagian besar dana tersebut ditempatkan Surat Utang Negara (SUN) untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meski akhirnya Presiden Jokowi meminta Menaker untuk merevisi peraturan tersebut, namun hingga berita

ini rilis, belum ada perubahan terbaru apapun. Menaker merasa kecolongan atas keberatan presiden, menurutnya sebelum permenaker tersebut diterbitkan, aturan tersebut sudah disetujui Presiden.

Diketahui Presiden, Tapi Minta direvisi

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri mengatakan Presiden menyetujui permenaker tersebut.

Menaker menepis tuduhan yang menyebut bahwa terbitnya Permenaker itu tanpa seizin Presiden. Menurut Indah Anggoro, “Jika Permenaker itu tidak disetujui Presiden, pasti kantor Setkab dan Kantor Kemenkumham tidak menyetujui terbitnya peraturan ini” jelasnya pada konferensi pers di Jakarta Rabu (16/2).

Mengacu aturan, terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa peraturan menteri harus mendapat persetujuan Presiden sebelum

ditetapkan. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang diteken Jokowi pada 2 Agustus 2021.

Ada 3 kriteria rancangan peraturan menteri/kepala lembaga yang wajib mendapatkan persetujuan presiden sebelum diterbitkan. Pertama, berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Kedua, bersifat strategis, yaitu yang berpengaruh pada program strategis presiden, target pemerintah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pertahanan, keamanan dan keuangan negara. Ketiga, rancangan peraturan lintas sector atau lintas kementerian/lembaga.

Merujuk pada Perpres tersebut, bisa dikatakan bahwa Jokowi mengetahui substansi permenaker tersebut dan sekaligus terlibat dalam pemberian persetujuan. Namun melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, senin (21/2) Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menyebut, Presiden mengikuti aspirasi buruh dan meminta Menaker untuk menyederhanakan aturan ini.

Perlu Sinkronisasi dan Ketelitian

Terkait hal ini, Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menilai bahwa penyusunan Permenaker No 2 tahun



Ida Fauziyah

2022 ini kurang teliti. Menurutnya persoalan mengenai JHT buruh masuk ranah sensitif sehingga harus dicek betul-betul oleh Seskab.

Menurutnya, jika kemudian muncul gelombang penolakan dan kritik, maka hal ini dapat membuat Presiden ‘kehilangan muka’. “secara politis gunanya Perpres Nomor 68 tahun 2021 kan supaya tidak mengganggu dan Presiden tidak kehilangan muka” kata Agus.

Disisi lain, Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan UI Aloysius Uwiyo mengatakan, adanya ketidaksinkronan antara Permenaker No 2 tahun 2022 dengan UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).

Aloysius mengusulkan penyederhanaan pengambilan JHT merujuk pada UU SJSN. Penyederhanaan ini mengandung arti bahwa untuk pekerja yang mengalami PHK pada saat pandemi harus betul-betul diperhatikan pesangon dan tabungan berupa JHT.

“JHT yang diambil pekerja yang di PHK tidak akan mengganggu program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang disiapkan pemerintah. Sebab JKP berasal dari Pemerintah dan JHT berasal dari pekerja,” kata Aloysius.

Permenaker No 2 tahun 2022 mengatur pencairan JHT pada saat buruh berusia 56 tahun, tapi pada UU SJSN pencairan JHT dapat dilakukan setelah dana JHT mengendap di BPJS Ketenagakerjaan selama 10 tahun. Oleh karenanya, alih-alih merevisi, Aloysius mendorong supaya proses penyusunan aturan dapat disinkronkan oleh presiden, para pemteri dan pemangku kepentingan

lainnya sebelum diterbitkan.

Rasa Keadilan Buruh Dipertanyakan.

Reaksi keras datang dari Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang sejak awal diterbitkan Permenaker menolak mentah-mentah dan menyarankan dicabut.

Hotman mengunggah video yang diambil di kawasan GBK tersebut sambil mengatakan. “JHT kamu tahu asalnya dari mana? JHT dari buruh atau pekerja asalnya adalah dari 2% dipotong dari gaji buruh dan 3.5% dari oleh perusahaan tiap bulan. jadi tiap bulan total 5.5% buruh tersebut ada uangnya dipotong untuk jaminan hari tua. Satu senpun tidak ada uang pemerintah disitu”. Ucap Hotman Paris.

Menurut Hotman Paris, uang JHT yang murni dari uang buruh kemudian digunakan oleh Negara untuk investasi sehingga tertahan hak buruh untuk mendapatkan uangnya, maka Hotman Paris heran yang bertanya “dimana logika berpikirnya? semua orang mengatakan peraturan ini tidak benar” pungkasnya.

Selain itu, Hotman Paris dengan tegas meminta Menaker, Ida Fauziyah untuk menggunakan nalar

berpikir dengan abstraksi hukum dan nilai keadilan masyarakat.

Hotman memberi

contoh seorang pekerja yang setiap bulan telah dipotong gajinya tiba-tiba di PHK pada usia 32 tahun, dengan adanya peraturan tersebut, JHT baru bisa dcaikan pada usia 56 tahun.

Ada Indikasi Dana JHT untuk Pembangunan IKN

Anggota DPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay menduga pemerintah menggunakan dana penjualan Surat Utang Negara (SUN) untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. SUN tersebut dibeli BPJS Ketenagakerjaan menggunakan dana Jaminan Hari Tua (JHT’).

“Kalau ceritanya kan Permenaker ini untuk pekerja, betul *nggak* untuk pekerja? Belum lagi, ada anggapan bahwa uang BPJS Ketenagakerjaan ini dipakai untuk program-program pembangunan yang dikerjakan pemerintah,” kata Saleh dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (19/2/2022).

Saleh menjelaskan, sebagian besar dana JHT itu diinvestasikan di SUN. Adapun pemerintah sebagai penjual SUN akan memasukkan dana penjualan tersebut ke APBN, lalu digunakan untuk berbagai keperluan.

“Pemerintah kalau sudah ambil uangnya (dari penjualan SUN), lalu tergantung bendahara negara, uangnya mau digunakan untuk apa saja,” kata Saleh. Menurut Saleh, bendahara negara bisa mengalokasikan dana itu untuk pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Misalnya, proyek pembangunan rumah sakit dan sekolah.

“Infrastruktur presiden juga berjalan terus. (Untuk) IKN juga ya saya kira, karena sudah ditetapkan juga sebagian besar (pembiayaannya) dari APBN,” kata anggota Komisi IX DPR ini.

Ika



Indah Anggoro Putri

ANGIE BEBAS PASCA TERJERAT PROYEK WISMA ATLET

Setelah menghirup udara sesak di jeruji besi, akhirnya Angelina Sondakh bisa kembali bernafas lega. Mantan politisi perempuan itu telah selesai menjalani hukumannya selama 10 tahun akibat kasus suap proyek Wisma Atlet pada 2012. Wanita yang akrab disapa Angie itu bebas pada Kamis (3/3), dengan tetap harus menjalani program cuti menjelang bebas (CMB) selama tiga bulan.

Mantan anggota DPR Fraksi Demokrat ini belum dinyatakan bebas murni dan harus menjalankan program CMB sebagai klien Pemasyarakatan, dengan bimbingan lanjutan Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan selama 3 bulan.

Program CMB didapatkan Angie setelah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Program itu diberikan sebesar remisi terakhir paling lama 3 bulan, yang sedianya jatuh pada 29 Oktober 2021.

Namun, lantaran Angie tidak dapat membayar lunas sisa uang pengganti sebesar Rp. 4.538.027.278 subsider 4 bulan 5 hari penjara, maka tanggal menjalani CMB Angie menjadi 3 Maret 2022. Artinya mantan Puteri Indonesia itu belum resmi dinyatakan bebas dari hukuman pidana hingga 1 Juni 2022.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Rika Aprianti mengatakan,



Mantan politisi Partai Demokrat Angelina Sondakh saat keluar dari lembaga pemasyarakatan, Kamis (3/3)

Angie akan menjalani program CMB selama tiga bulan, sehingga dia akan dikeluarkan dari lapas.

“Pada tanggal 3 Maret 2022, Angelina Sondakh akan dikeluarkan dari Lapas Perempuan Jakarta untuk mulai menjalankan program CMB sebagai klien Pemasyarakatan dengan bimbingan lanjutan Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan selama tiga bulan,” kata Rika dalam keterangan tertulisnya.

Jatuh karena “Apel Washington”

Sebelum menjadi tahanan KPK, Angie memulai karir di dunia hiburan. Perempuan bernama lengkap Angelina Patricia Pinkan Sondakh dikenal sebagai artis dan model. Wanita kelahiran 28 Desember 1977 menjadi pemenang ajang Putri Indonesia pada 2001, lalu terjun ke politik usai terpilih

menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009 dan 2009-2014 melalui Partai Demokrat.

Namun, belum selesai periode kedua dirinya menjadi anggota DPR, isteri almarhum Adjie Massaid ini dijabloskan penjara karena kasus korupsi Wisma Atlet oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 3 Februari 2012. Angie yang saat itu menjabat sebagai anggota Badan Anggaran DPR diduga meloloskan anggaran proyek senilai 191 miliar rupiah dengan imbalan suap.

Angie ditahan KPK sejak 2012 karena terbukti menerima suap sebesar Rp2,5 miliar dan USD1,2 juta dari Permai Group, milik Nazaruddin, dalam pembahasan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Ada beberapa istilah yang dibuat Angie dalam melancarkan aksinya menggiring anggaran proyek agar sesuai dengan permintaan Permai Group. Ketika kasus ini pertama kali terungkap oleh publik, Angie membuat istilah “Apel Malang” yang berarti rupiah, “Apel Washington” yang berarti dollar AS, “pelumas yang berarti uang dan “semangka” yang berarti permintaan dana.

Atas perbuatannya tersebut Angie terbukti melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 12a jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengaku Korban Konspirasi

Keterlibatan Angie dalam suap proyek Wisma Atlet diakuinya sebagai korban dari sebuah konspirasi besar. “Saya menjadikorbandarisebuah *grand scenario* yang harus mengorbankan saya melalui seseorang atau beberapa orang konspirator yang bersembunyi di balik topeng *justice collaborator*,” tutur Angie yang tertuang dalam pledoi atau nota pembelaan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/1/2013).

Angie menuturkan, dengan berlindung di balik status *justice collaborator*, ia ternyata punya potensi menukar kebenaran dengan harga tertentu. Dengan mengungkapkan kebenaran yang sepotong-sepotong, maka menimbulkan opini sesat kepada masyarakat.

Pada beberapa kali kesaksian di persidangan, Angie memang menyebut banyak nama, antara lain “Pangeran Ibas”. Selain itu Angie mengaku hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Nazaruddin, yang kala itu

menjabat sebagai koordinator Badan Anggara DPR untuk Partai Demokrat.

Untuk urusan pembahasan anggaran dan permintaan *fee* dari proyek tersebut, Angie mengaku tidak mengetahuinya, karena dia bekerja sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Nazaruddin. “Kami hanya bekerja sesuai dengan perintah,” kata Angie saat memberikan kesaksian di bawah sumpah dalam lanjutan persidangan kasus pencucian uang Nazar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Angie mengaku bersedia menjalankan permintaan Nazaruddin karena tidak mempunyai uang untuk membayar anggaran wajib di partai. “Di partai, ada kewajiban bayar iuran. Karena saya tidak punya uang untuk bayar iuran, menurut terdakwa kerja saja nanti dibebaskan iurannya,” kata Angie.

Tangan Dingin Ardjito Alkostar

Angie kemudian menjadi salah satu korban tangan dingin Artidjo Alkostar dalam menghukum koruptor. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 107PK/Pid.Sus/2015, Angie dijatuhi sederet hukuman, yaitu pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp500 juta dan subsider 6 bulan kurungan yang telah dibayarnya.

Ditambah ia harus membayar uang pengganti Rp2,5 milyar dan USD1,2 juta subsider 1 tahun penjara, dengan penjelasan sudah membayar sekitar Rp8,81 milyar sehingga tersisa Rp4,54 milyar subsider 4 bulan 5 hari dengan keterangan belum dibayar, sehingga harus diganti dengan menjalankan pidana kurungan 4 bulan 5 hari.

Putusan ini diketuk oleh Artidjo selaku Ketua Kamar Pidana MA dengan hakim yang beranggotakan MS Lumme dan Mohammad Askin pada 20

November 2013. Selain itu, Angie juga dijerat dengan Pasal 12 a UU Tipikor yang secara otomatis membatalkan putusan Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan dia dijerat dengan Pasal 11 UU Tipikor.

Dalam putusannya, majelis menyatakan Angie aktif meminta dan menerima uang terkait proyek di Kementerian Pendidikan Nasional serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Tak hanya itu, Artidjo juga mengatakan Angie berperan aktif mempertemukan dan memperkenalkan Mindo Rosalina Manulang, yang merupakan mantan Direktur Marketing Grup Permai dengan Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, Haris Iskandar. Pertemuan itu dilakukan demi memudahkan penggiringan anggaran dan dari perbuatannya ia menerima imbalan berupa *fee* sebesar Rp12,58 milyar dan USD2,35 juta.

Setelah pembebasannya itu, Partai Demokrat membuka pintu bagi Angie untuk aktif kembali. Melalui Deputy Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani, Demokrat sangat memahami pilihan Angie seandainya ingin kembali ke partai ber lambang merci tersebut. Hingga artikel ini ditulis (Sabtu, 5/3), Angie belum memberikan jawaban pasti. Dia akan menggelar konferensi pers nantinya.

Jadi, publik bisa menunggunya apakah karir politik Angie, yang sebelum mencuat kasus Wisma Atlet pada 2012, sangat cemerlang. Politisi perempuan, muda, dan berhasil duduk di kursi DPR dua periode. Ataupun justru Angie akan memutuskan untuk berkarir kembali di dunia hiburan sebagai model dan artis. **Ika**



DPP IMM:

PENUNDAAN PEMILU MENCIDERAI KONSTITUSI

Penundaan Pemilu harus ditolak! Bukan karena ekonomi nasional sedang sulit akibat pandemi, tapi wacana tersebut sengaja digulirkan murni karena kepentingan politik segelintir orang. Penundaan Pemilu

sangatlah menciderai konstitusi. Jika benar-benar ditunda, itu hanya akan menutup figur baru yang akan meramikan kontestasi kepemimpinan nasional pada 2024.

Konstitusi nasional mengatur jabatan presiden dan wakil presiden

selama 5 tahun (satu periode), dan boleh diperpanjang satu periode lagi jika publik menghendaki melalui pemilihan umum. Maka jika ada elit politik yang mengampanyekan “Presiden Tiga Periode” atau “Penundaan Pemilu” dengan alasan

yang tidak rasional, jelas pihak-pihak ini patut dipertanyakan komitmen kebangsaannya.

Sebab itulah, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) melalui Surat Instruksi No: 001/A-4/2022 pada tanggal 16 Februari 2022 menginstruksikan seluruh kadernya di berbagai daerah untuk melakukan aksi menyuarakan penolakan terhadap wacana penundaan Pemilu 2024.

Ribuan massa aksi IMM menggelar demonstrasi menolak usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden di Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Kamis (3/3). Massa sempat melempar botol secara acak, membakar flare, dan melakukan aksi saling dorong dengan aparat kepolisian sebelum membubarkan diri.

Ketua Umum DPP IMM Abdul Musawir Yahya mengatakan, wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 sangat menciderai demokrasi. "Sangat tidak elok bagi pemerintah memaksakan wacana penundaan Pemilu. Tak hanya merusak tatanan demokrasi nasional yang sedang berlangsung baik, tapi juga menciderai konstitusi," kata Abdul saat dihubungi *Majalah CaraPandang*, Kamis (3/3).

Secara tegas, wacana penundaan Pemilu juga dikatakan Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik DPP IMM, Baikuni Al-Shafa. Pria yang akrab disapa Alsa tersebut memperlakukan elit-politik tertentu yang berupaya memasukkan kepentingan pribadi dan kelompoknya melalui wacana penundaan Pemilu ini.

"Isu ini sarat dengan politik kepentingan kelompok. Politiknya tidak adiluhung, tidak berorientasi

Abdul Musawir Yahya



pada kemajuan demokrasi, tapi justru membuat kemunduran bagi demokrasi kita," tutur Alsa.

Selain itu, Alsa juga memperlakukan lambatnya pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), tapi giliran pembahasan UU Ibu Kota Negara (IKN) bisa dibahas dengan cepat.

"Betul, kita tegas ketika berbicara tentang penundaan pemilu. Kita menolaknya, karena apa? Kita melihat rangkaian kebijakan selama ini. Ketika bicara UU IKN, pemerintah mengebutnya dengan cepat, tapi ketika UU PRT, UU TPKS, itu begitu lambat. Maka DPP IMM tidak percaya lagi. Ini kemungkinan ditunda untuk kemudian diperpanjang masa jabatan (presiden)," jelas Alsa.

Menurutnya, berbagai permasalahan yang terjadi pada masa Presiden Jokowi sekarang ini akan bisa diperbaiki oleh presiden berikutnya sehingga masa jabatan Jokowi tidak perlu diperpanjang.

"Kita tahu sekarang Pak Jokowi sudah di periode kedua untuk kemudian selesai. Biarlah hal-hal yang kemudian menjadi carut-marut itu kita perbaiki ke depan oleh tokoh-tokoh yang baru dan segar," ucap Alsa.

Dia juga menyinggung terkait kebijakan investasi infrastruktur yang ada pada era Jokowi. Alsa menganggap kebijakan investasi tersebut hanya menguntungkan industri besar dan tidak berpihak pada rakyat.

Massa IMM juga



Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik DPP IMM, Baikuni Al-Shafa saat memimpin aksi di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Kamis (3/3)

menyinggung insiden yang diduga melibatkan aparat di Wadas hingga Sulawesi Tengah.

Orasi ditutup dengan pembakaran flare merah sambil menyanyikan lagu 'Indonesia Pusaka'. Polisi kemudian meminta massa meninggalkan lokasi sekitar pukul 17.15 WIB. Imbauan disampaikan polisi lewat mobil Pengurai Massa (Raisa).

"Peringatan pertama, massa aksi harap membubarkan diri. Diingatkan kembali agar tidak ada massa aksi yang melakukan pembakaran. Tidak ada pembakaran!" ujar polisi dari mobil Raisa.

Massa terlihat tetap berada di lokasi. Mereka kemudian terlihat melempar botol secara acak di lokasi. Setelah itu, aksi saling dorong antara massa aksi dengan polisi juga terjadi. Salah satu polisi mengaku ditendang peserta aksi.

Naf

MANUVER PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN

Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB yang akrab Cak Imin, dengan sejumlah ketua umum partai koalisi pemerintah mengampanyekan perpanjangan masa jabatan presiden. Praktis, usulan tak masuk akal tersebut mendapatkan pertentangan dari banyak elemen sosial. Beberapa partai politik, seperti PDIP, NasDem, dan PKS juga secara tegas menolak gagasan Cak Imin tersebut. Mereka menilai perpanjangan masa jabatan presiden sebagai pengkianatan demokrasi dan merusak konstitusi negara.

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden tengah menjadi perbincangan hangat. Hal ini menimbulkan kegaduhan di kalangan pro maupun kontra. Berbeda dengan wacana presiden tiga periode tahun lalu, kali ini wacana yang muncul dan mengemuka adalah perpanjangan masa jabatan presiden.

Wacana ini muncul ke publik setelah Cak Imin melontarkan ide penundaan Pemilu hingga 2027. Lebih lama 3 tahun karena masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir 2024 sesuai amanah konstitusi. “Indonesia masih



dalam kondisi pemulihan ekonomi karena pandemi sehingga usulan menunda pemilu menjadi pilihan yang baik bagi berjalannya pemerintahan ini,” kata Cak Imin.

Cak Imin mengklaim bahwa ide itu

tidak didasarkan pada kemaun pribadi maupun partainya. Dia menyebut, gagasan perpanjangan masa jabatan presiden datang dari kehendak 60 juta netizen di media sosial. Para warga medsos itu berharap Jokowi tetap memimpin negeri ini, karena masih mengemban tugas memulihkan perekonomian nasional setelah dihantam Covid-19.

Ide tersebut mendapat dukungan dari dua ketua umum partai koalisi pemerintah, Golkar dan PAN. Entah

“Indonesia masih dalam kondisi pemulihan ekonomi karena pandemi sehingga usulan menunda pemilu menjadi pilihan yang baik bagi berjalannya pemerintahan ini.”

Muhaimin Iskandar

usulan itu benar atau tidak, yang pasti riset melalui media sosial tak bisa menjadi dasar untuk membuat kebijakan publik yang serius. Apalagi untuk menentukan masa depan negara ini untuk beberapa tahun ke depan.

Komentar netizen di media sosial (terutama perbincangan politik) rentan terjadi rekayasa. Komentar itu sengaja dibuat, diramalkan, dan diviralkan oleh pihak atau konsultan politik tertentu yang tidak bertanggungjawab. Akun-akun medsos yang turut meramalkan perbincangan ini pun biasanya *buzzer*, akun robot atau bodong.

Persoalannya, ide Cak Imin tersebut tidak konsisten dengan tindakannya. Pada satu sisi dia mengusulkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan hingga 2027, tapi tetap menghadiri acara-acara deklarasi pencapresannya ke depan pada sisi yang lain. Selain itu, jauh-jauh hari, tim suksesnya di berbagai daerah pun telah memasang banner/ poster pencapresannya untuk pemilu 2024.



Praktis saja, suara Cak Imin tersebut mendapatkan penolakan dari partai-partai lain, seperti PDIP, NasDem dan PKS. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP secara tegas menolak usulan penundaan Pemilu 2024. PDIP bersikukuh penyelenggaraan pemerintah harus berjalan sesuai konstitusi UUD 1945.

“PDIP akan terus kokoh karena memang tidak ada ruang penundaan pemilu, baik karena alasan ekonomi, IKN atau alasan lain yang disebabkan pandemi,” ujar Hasto seperti dikutip dari acara diskusi rilis LSI, Kamis (3/3).

Sejumlah kalangan dari akademisi dan praktisi demokrasi pun menunjukkan penolakannya. Bahkan, mereka mempertanyakan motif dari pendukung usulan dan komitmennya terhadap demokrasi. Banyak yang menilai penundaan ini akan menimbulkan kekacauan dalam demokrasi karena tidak memiliki dasar yang kuat dan alasan penundaan tidak bisa dipertanggungjawabkan kedaruratannya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto juga tidak setuju ada penundaan pemilu. Dia berharap pemerintahan sekarang

haruslah berjalan sesuai konstitusi. “Presiden Jokowi cukup dua periode menjadi presiden. Setelah ini, lebih baik menjadi bapak bangsa,” kata Sunanto, Jum’at (4/3).

Dia menambahkan, dengan cukup memerintah dua periode, Presiden Jokowi akan memberikan ruang dan tempat bagi kepemimpinan selanjutnya. “Pak Jokowi akan memberikan ruang dan kesempatan bagi putra bangsa yang memiliki kualitas kepemimpinan untuk melanjutkan kursi orang nomor satu di Indonesia,” jelas pria asal Madura yang akrab disapa Cak Nanto itu.

Survei Nasional

Lembaga Survei Indonesia (LSI) telah mensurvei sikap publik terhadap penundaan Pemilu dan masa jabatan Presiden. Survei yang dimulai pada 25 Februari hingga 1 Maret 2022 itu menemukan mayoritas warga menolak perpanjangan masa jabatan presiden sehingga Presiden Jokowi harus tetap mengakhiri masa jabatannya pada 2024 sesuai konstitusi (berkisar 68-71%), baik karena alasan pandemi, pemulihan ekonomi, atau pembangunan Ibu Kota Negara baru.

“PDIP akan terus kokoh karena memang tidak ada ruang penundaan pemilu, baik karena alasan ekonomi, IKN atau alasan lain yang disebabkan pandemi.”

Hasto Kristiyanto
Sekjen PDIP

Mayoritas warga juga lebih setuju bahwa pergantian kepemimpinan nasional melalui Pemilu 2024 harus tetap diselenggarakan meski masih dalam kondisi pandemi (64%), ketimbang harus ditunda karena alasan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi (26.9%).

Meskipun masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo, namun penundaan Pemilu ditolak oleh mayoritas warga, khususnya yang tahu

dengan wacana tersebut. Penolakan warga terhadap perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan penyelenggaraan Pemilu mayoritas terjadi di hampir setiap kelompok demografi, wilayah, perilaku mengakses media massa, basis Pemilu 2019, dan pada tiap level kepuasan atas kinerja presiden dan demokrasi.

Dengan demikian, suara publik sesungguhnya menghendaki pergantian presiden tetap pada 2024 dan dilakukan melalui pemilu. Sebab, jika *ngotot* diperpanjang tanpa proses pemilu, itu sama halnya dengan menciderai demokrasi. Perilaku sejumlah elite politik yang demikian itu sama seperti mengingkari konstitusi.

Ide penundaan Pemilu 2024 sangat tidak berdasar. Pemilu dan masa jabatan telah diatur dalam pasal 22E UUD 1945 yang menghendaki dilaksanakannya setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD.

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, setelah lima tahun sejak dilantik, masa jabatan penyelenggara negara harus berakhir dengan sendirinya.

“Jadi, jika pemilu ditunda melebihi batas waktu lima tahun, maka atas dasar apakah para penyelenggara negara itu menduduki jabatan dan menjalankan kekuasaannya? Tidak ada dasar hukum sama sekali.

Kalau tidak ada dasar hukum, maka semua penyelenggara negara mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD semuanya ilegal, tidak sah, atau tidak *legitimate*,”

kata Yusril.

Pakar politik dari Universitas Indonesia Reza Hariyadi juga menjelaskan, meskipun menambah masa jabatan atau periode bisa dilakukan melalui amandemen UUD 1945. Namun, hal ini akan menabrak etika politik dan prinsip demokrasi itu sendiri.

“Jika, sampai terjadi perpanjangan masa jabatan presiden, maka itu bakal merusak tatanan demokrasi yang sudah dibangun,” ujar Reza.

Demokrasi yang sudah dibangun seharusnya berjalan di rel yang semestinya. Sebagai negara yang berpredikat demokrasi terbesar ketiga di dunia, segala bentuk dan upaya pengabaian terhadap demokrasi tidak ada ruang di negeri ini. Apapun alasannya, harus berjalan sesuai dengan konstitusi yang menyatakan pemilu legislatif dan presiden lima tahun sekali tetap terlaksana.

Negara-negara yang menganut sistem demokrasi seperti Amerika, Korea Selatan, Jepang, dan Bolivia, meskipun diterpa badai pandemi Covid-19 tetap taat terhadap proses demokrasi.

“Bahkan, di negara kita momen Pilkada serentak 2020 pernah terlaksana ketika covid-19 tengah di puncak keganasan. Jadi, alasan penundaan karena pandemi tidak masuk akal,” kata Reza.

Apa yang sudah menjadi amanah konstitusi, demokrasi, dan reformasi harus tetap berjalan dan ditegakkan oleh seluruh elemen bangsa. Agenda demokrasi lima tahunan harus tetap dijalankan dan sebisa mungkin menghindari amandemen UUD 1945 kecuali keadaan bangsa ini terdesak atau dalam keadaan sangat krisis.

Aldi/Naf

“Presiden Jokowi cukup dua periode menjadi presiden. Setelah ini, lebih baik menjadi bapak bangsa.”

Sunanto
Ketua Umum
Pimpinan
Pusat Pemuda
Muhammadiyah



HUNIAN LAYAK BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mendorong agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah layak huni.

UPAYA PEMERINTAH

- 1 Mempermudah perbankan dalam pembiayaan perumahan.
- 2 Menyalurkan bantuan prasarana, sarana dan utilitas kepada pengembang rumah bersubsidi.

KATEGORI MBR

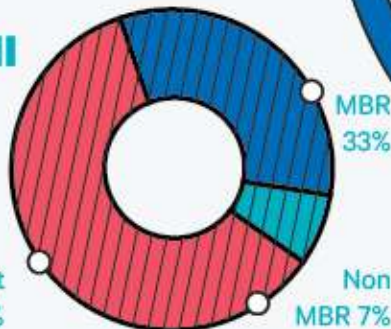
- 1 Berusaha sendiri (wirausaha)
- 2 Wirausaha sekaligus buruh tidak tetap
- 3 Wirausaha sekaligus buruh tetap
- 4 Buruh/karyawan
- 5 Pekerja bebas di sektor nonpertanian
- 6 Pekerja bebas di sektor pertanian.
- 7 Pekerja keluarga/tidak dibayar

- Memiliki pencahayaan dari sinar matahari langsung.
- Menggunakan bahan bangunan yang aman.
- Memiliki ventilasi.
- Suhu udara dan kelembapan sesuai dengan suhu tubuh manusia.
- Luas minimal 60 m².



KONDISI SAAT INI

11 juta rumah tangga tidak memiliki rumah, dengan komposisi:
(data Februari 2022)



Masyarakat miskin 60%



Pemerintah berkomitmen memberikan hunian yang layak, sehat dan nyaman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan begitu, kami harap kualitas hidup para penerima bantuan meningkat.

Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR



CONTOH PERUMAHAN BAGI MBR

- Perumahan bagi Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut.
Kabupaten Garut
- Perumahan bagi penyapu jalan.
Kota Prabumulih
- Perumahan bagi guru honorer.
Kabupaten Kendal



POEMPIDA HIDAYATULLAH,

KETUA UMUM ORGANISASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (ORKESTRA),
DEWAN PENGAWAS BPJS KETENAGAKERJAAN (2015 - 2021),
ANGGOTA DPR RI KOMISI IX (2009-2014)

DARI JHT, PAK JOKOWI, HINGGA IKN

Munculnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Program Jaminan Hari Tua menuai kritik keras dari publik. Kritik itu berfokus pada persyaratan

klaim JHT yang hanya bisa dilakukan pada usia minimal 56 tahun. Padahal, pada situasi yang sulit akibat pandemi Covid-19 seperti ini, banyak tenaga kerja yang dirumahkan dan hanya bisa mengandalkan JHT sebagai salah satu bantalan ekonomi. Maka kemudian,

tak ayal, beleid baru ini mendapat pertentangan dari publik. Meski kemudian, presiden sendiri meminta untuk merevisi peraturan tersebut.

Di sisi lain, menjelang pemilu 2024, santer muncul isu perpanjangan masa jabatan presiden, menjadi

tiga periode. Seperti halnya permen ketenagakerjaan tersebut, usulan yang agak sembrono ini mendapat protes keras dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari aktivis, akademisi, hingga masyarakat umum.

Poempida Hidayatullah, ketua umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat, berbagi cerita kepada Cara Pandang pada 12 Maret 2022. Ia berbagi pandangan mulai dari soal JHT, Pak Jokowi, hingga pandangannya mengenai ibu kota negara baru: Nusantara. Berikut petikan wawancara kami.

Selama menjadi Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, adakah hal-hal menarik di dalamnya?

Kita, dewan pengawas, itu seperti malaikat raqib atid. Tapi, sebagai seorang pengawas tentu harus berprasangka buruk secara ekstrim. Kan, katanya tidak boleh suasan, harus khushukan. Tapi kalau kita khushukan semua, buat apa ada pengawas? Betul kan, itulah tugas pengawas.

Di Indonesia ini, menurut saya, persoalan pengawasan menjadikan hal yang ujung-ujungnya—saya tidak bicara semuanya, kalau di *rentet* itu memang mengarah ke persoalan korupsi. Dan ini sebenarnya mengarahnya ke lemahnya pengawasan. Kalau pengawasan di depannya benar pasti ujungnya, insyaallah benar.

Adakah hal mengenai BPJS yang tidak diketahui publik?

Ya, ada beberapa praktik kebijakan—yang istilahnya—tidak sesuai kaidah ... tapi menurut saya, carut marut lembaga itu biasa banget, medioker begitu. Ya, itu saja.

Soal JHT, mengapa baru boleh diambil di usia 56 tahun?

Itu sebetulnya yang saya pertanyakan juga. Ini, kan, momen di mana situasi sedang susah. Jadi, banyak sekali orang yang, *pertama*, di-PHK, *kedua* sebelum-sebelumnya sudah dibolehkan untuk mengambil [JHT] di bawah umur 56 tahun. Nah, terus tiba-tiba [tidak boleh]. Ibaratnya kita lagi senang mandi pakai air, terus kerannya dimatikan, orang mandi itu pasti protes.

Sebetulnya apa alasan dasarnya?

Ketika saya tanya ke staf di sana, timnya begitu, jawabannya selalu 'kita ingin mengembalikan jaminan hari tua pada kitab-nya', disesuaikan dengan undang-undang SJSN tahun 2004. Logikanya, Bu Ida sudah berapa lama jadi menteri, sudah 2 tahun. Sebelumnya juga kan kawannya Bu Ida, dan sudah 7 tahun ini program berjalan bisa diambil sebelum umur 56 tahun. Kalau menganggap bahwa perilaku yang 7 tahun ini salah dan harus dikembalikan kepada undang-undang, ya berarti mereka mengakui mereka melawan undang-undang, melawan hukum, itu ada hukumannya, kan tidak bisa begitu. Jadi kalau alasannya cuma itu buat saya tidak masuk akal.

Apa ini ada kaitannya dengan skema investasi dana JHT, yang kita dengar, kurang lebih 60 persen berada di SUN?

Kalau 66% ada di SUN, SUN itu likuid saya tanya, ya tidak. Cuma, SUN itu bisa diperjualbelikan. SUN sendiri tidak likuid. Kenapa? Karena dia ada jatuh temponya. SUN itu seperti, misalnya kita beli, SUN sendiri memberi bunga

bagi hasilnya, tapi kan itu negara likuiditasnya sendiri tumbuh terbatas karena ada jatuh temponya, hampir mirip deposito. Sisanya lagi deposito mungkin sekitar 20%-an. Kalau 20%, 86% sisanya, 14% saham sama reksa dana, kan gitu.

Jadi ketika JHT diambil, kemungkinan akan terjadi kekurangan *cash flow* atau ada yang namanya gagal bayar.

Ada potensi gagal Bayar?

Potensi gagal bayarnya ada, dan ini mungkin yang ingin dihindari. Tapi, sebenarnya bisa disosialisasikan. Itu sebetulnya sudah saya sampaikan pada April 2021 di DEWAS zaman saya. Karena acara perpisahan dengan menteri keuangan, Bu Sri Mulyani. Saya sudah sampaikan bahkan 3 kali, potensi [gagal] itu ada salah satunya karena klaim JHT meningkat akibat PHK.

Yang kedua, porsi investasi dalam bentuk reksa dana dan sahamnya cukup besar. Ini harus diantisipasi segera. Makanya, beberapa minggu kemudian kayaknya Bu Menteri memanggil direksi dan diputuskan untuk saham dan reksa dana dikurangi porsinya.

...Ya istilahnya jumlah iuran yang masuk tidak sebanding dengan klaim yang harus dibayarkan.

Untuk sementara masih aman, tapi potensinya ke depan ya kita tidak tahu.

Kenapa baru disampaikan ketika itu?

Sebetulnya Bu Sri Mulyani sampai kaget, 'kok DEWAS baru ngomong sekarang'. Saya langsung sampaikan, 'Bu, kapan kita pernah ketemu, jadi kita tidak pernah rapat. Kami tidak pernah sekalipun diundang. Yang

selalu datang direksi, kita tidak pernah diajak. Jadi, bagaimana kalau sudah versinya yang mengelola, kita tidak pernah bisa memberikan versi kita.

Perbedaan pelayanan JHT dulu dan sekarang?

kalau dulu zaman saya itu JHT dua Minggu cair. Misalnya, ada orang berhenti kerja atau diberhentikan, dua minggu [kemudian uangnya] cair. Berarti *cash flow* masih bagus. Sekarang coba detail berapa lama, saya dengar 2 bulan, 2 bulan terakhir. Nah, berarti kalau 2 bulan, kan mundur. Jadi, makin lama makin susah *cash flow*-nya, kira-kira begitu.

Berarti masalah utamanya cash flow?

ini persoalannya sendiri saya sebagai orang yang pernah di dalam dan pernah hitung itu menurut saya itu ... akhirnya memang JHT itu sendiri jadi kurang maksimal. Saya sendiri menyayangkan kejadian ini pada momen di mana situasi lagi susah, memang lagi butuh.

Misalnya revisi peraturan menteri keluar, akan menyelesaikan masalah JHT ini kah?

Sebetulnya kalau revisi tidak perlu. Keluarkan saja pembatalan. Jadi, maksudnya supaya kembali ke peraturan sebelumnya; dibatalkan saja permen yang baru.

Ketika Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan kebijakan, presiden meminta revisi, tapi staf khusus menteri menyampaikan bahwa kebijakan menteri itu atas perintah presiden, lantas bagaimana?

Waduh itu sih, menurut saya

ngebongkarnya jangan tanya ke saya, tanya ke staf khusus. karena saya tidak tahu persis, jadi saya juga tidak mau spekulasi.

Kita sedikit bergeser topik, kalau berbicara Pak Jokowi, sekarang ramai isu tiga periode, menurut Anda bagaimana?

Pemahaman saya tentang konstitusi yang ada hubungannya dengan kekuasaan, berkali-kali saya sampaikan, kekuasaan itu tidak 'tak terbatas'. Artinya, kalau tidak 'tak terbatas', berarti terbatas. Konstitusi kita menjelaskan seperti itu. Kalau konstitusi menyatakan seperti itu, artinya terbatasnya seperti apa? Tidak hanya ruang lingkupnya yang terbatas, tetapi juga masa waktunya terbatas.

Di Undang Undang Dasar itu dikatakan 2 periode. Kenapa 2 periode, kenapa tidak 3? Kenapa tidak 4, kenapa tidak 5? Yang jelas, pada saat dibuka tidak ada limitnya, ada rezim yang kemudian harus dijatuhkan dan kita akan berdarah darah. Artinya memang harus dibatasi.

Apakah ada rujukannya?

Referensinya sebenarnya simpel. Referensinya adalah Amerika. Sebab, kita mengenal Amerika itu sebagai negara yang paling demokratis, karena basis pemikiran demokrasi kita sebenarnya kiblatnya ke sana. Makanya 2 periode, padahal sebenarnya logikanya Korea cuma satu periode. Korea jauh lebih maju dari kita. Kok bisa satu periode lebih maju. Artinya kekuasaan itu tidak perlu dipegang satu orang kelamaan. Kekuasaan itu cukup sekali saja, karena di dalam satu periode itu orang harus bekerja keras

dan cepat, menunjukkan prestasinya dengan cepat, ide idenya dengan cepat, visinya dengan cepat, semangatnya dengan cepat, membuat berbagai macam gebrakan dengan cepat.

Saya yakin ini kita bicara di dalam suatu tatanan pemikiran kenegarawan ... kita harus lebih matang ketika berdemokrasi dalam konteks mengatur kekuasaan.

Ngomong-ngomong, bagaimana menurut Anda kinerja pemerintahan Jokowi periode kedua?

Terus terang saya kurang bisa melakukan analisa yang *apple to apple* karena memang di periode 2 ini persoalan tiba-tiba banyak. Salah satunya yang terjadi Covid-19. Jadi, kalau kemudian saya melakukan satu kesimpulan, menyatakan sukses atau gagal, ini agak sulit karena kondisi seperti ini tidak pernah dialami oleh semua negara di dunia. Ini baru pertama kali.

Tapi, di lain hal banyak juga isu yang [sebetulnya] tidak perlu muncul. Salah satu yang saya lihat, momen yang kurang tepat itu adalah undang-undang Cipta Kerja, itu agak terburu-buru.

Jadi seolah-olah ada mekanisme membuat sesuatu yang berbeda dari apa yang pernah dikerjakan. Tapi nanti di coba membangun opini yang pro dengan menggunakan *buzzers*.

Kalau soal ibu kota baru?

Kalau saya melihat IKN ini adalah simbol dari sentralisasi atau pusat kekuasaan yang ada. Kalau kita mau menjatuhkan Ukraina ke mana kita menyerang, ya ke Kiev. Karena Kiev itu adalah pusat pemerintahan. Itu



sebenarnya sudah dihitung menurut saya.

...kalau pendapat pribadi Anda?

Untuk saat ini sebetulnya tidak ada penjelasan yang memuaskan saya dalam konteks suka atau tidak suka. Intinya gini, kalau melihat Jakarta memang ini kota sudah susah untuk

diekspansi lagi, saya sepakat.

Berarti Anda memandang bahwa pemindahan itu harus?

Saya melihatnya lebih dalam konteks yang strategis, ya. Memindahkan kemungkinan memang harus, karena kondisi Jakarta yang sudah membutuhkan *repositioning*.

Tinggal dipindah ke mananya. Kalau memang sudah disepakati di sana, tinggal dilanjutkan. Catatan-catatan saya, tentu [pemindahan itu] juga membutuhkan biaya yang signifikan. Saya cuma berharap jangan sampai nanti ada yang meraup keuntungan dengan tiba tiba. **(Azhar)**



DAMPAK EKONOMI GLOBAL PERANG RUSIA-UKRAINA

Hanya butuh waktu 24 jam setelah Rusia menginvasi Ukraina, negara-negara anggota NATO menjatuhkan sanksi ekonomi pada Rusia. Jerman menghentikan sertifikasi Pipa Nord Stream 2 pada Selasa (22/2).

Kerjasama ambisius yang akan menghasilkan 55 miliar meter kubik gas per tahun atau lebih dari 50 persen konsumsi tahunan Jerman bernilai USD15 miliar itu terhenti. Kesepakatan dengan Gazprom, perusahaan milik negara Rusia yang mengendalikan pipa, itu terhenti karena perang.

AS, Inggris, Eropa dan Kanada sepakat memblokir bank-bank Rusia dari Society Worldwide Internalbank Financial Telecommunication (SWIFT) pada Sabtu (26/2). SWIFT merupakan jaringan pembayaran terbesar yang menghubungkan ribuan lembaga pembayaran di dunia. Pemblokiran ini akan menghentikan Rusia melakukan transaksi besar di seluruh dunia termasuk ekspor-impor.

Inggris yang mengumumkan sanksi terhadap lima bank Rusia di antaranya Rossiya Bank, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank dan Black Sea Bank.

Inggris juga akan membekukan aset tiga orang kaya, di antaranya Gennady Timchenko, Boris Rotenberg dan Igor Rotenberg.

Otoritas New York Stock Exchange (NYSE), Nasdaq Inc, dan Intercontinental Exchange pada Senin (28/2), menghentikan sementara perdagangan saham perusahaan yang berbasis di Rusia dan tercatat di bursa saham AS.

Rusia nampaknya sudah memprediksi hal tersebut dan mempersiapkan skenario terbaiknya. Pemblokiran NATO tak sepenuhnya

mengusik perekonomian negeri beruang merah itu. Rusia lebih banyak bergantung pada domestik.

Pemblokiran itu tidak terlalu berdampak untuk Rusia. Sebab, ketergantungan pada ekspor untuk negeri ini tidak sampai 30 persen. Justru efek domino dari invansi ini berimbas pada komoditi pangan mengingat Rusia adalah salah satu produsen minyak bumi dunia, kalium karbonat (potash) bahan baku pupuk, dan industri pertambangan seperti nikel, aluminium dan palladium. Rusia dan Ukraina juga merupakan negara pengekspor utama gandum.

Pemulihan Ekonomi Melemah

Sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memproklamkan invansi terhadap Ukraina, keuangan global langsung bereaksi negatif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 102,23 poin atau 1,48% ke 6.817,21 pada Kamis (24/2). Imbas ketegangan geopolitik ini, menghambat pemulihan

ekonomi pasca covid-19 di Eropa dan Global.

Indeks pasar keuangan di berbagai negara terkoreksi, harga minyak dan emas mengalami kenaikan signifikan. Ini terjadi lantaran Rusia merupakan salah satu pengekspor energi, produk pertanian, dan logam terbesar di dunia.

Peningkatan ketegangan diprediksi akan memicu kenaikan harga energi dan berbagai komoditas serta nilai tukar dolar AS, yang tentunya akan berdampak pada peningkatan inflasi.

Pemulihan ekonomi global juga terancam akan lebih rendah dari prediksi awal. Pemulihan ekonomi dunia post Covid-19 dengan ancaman inflasi sebelumnya telah terlihat di beberapa negara maju seperti AS dan Indonesia. Prediksi awal pertumbuhan ekonomi global diprediksi 4.4 persen pada 2022, 3.8 persen pada 2023, 3.9 persen pada negara maju di tahun 2022, dan 2.6 persen di negara berkembang pada tahun 2023.

Harga Komoditas dan Suplai Logistik Terhambat

Perang berisiko pada kenaikan harga komoditas dari Rusia-Ukraina. Sebagai negara produsen dunia minyak bumi, kalium karbonat (potash) bahan baku pupuk, industri pertambangan, serta negara pengekspor utama gandum, perang ini berimbas pada negara lain yang bergantung pada keduanya. Pencarian alternatif suplai lain tentu mengakibatkan lonjakan kenaikan harga komoditi secara global.

Perang Rusia-Ukraina dapat berdampak pada kenaikan harga minyak bumi yang diperkirakan meningkat mencapai lebih dari USD100/barrel. Sementara itu, harga bahan bakar minyak meningkat di AS dan Eropa sebesar 30 persen.

Rantai pasokan global sebelumnya sudah mengalami hambatan logistik akibat Covid-19. Konflik Rusia-Ukraina yang berkepanjangan berisiko memperburuk *supply chain* dan memicu kenaikan harga komoditas.

Jika suplai komoditas dan logistik pengiriman terhambat, lalu infrastruktur utama seperti pelabuhan di area Laut Hitam rusak akibat perang, maka negara maju dapat memberikan sanksi pembubaran atas komoditas Rusia.

Tetapi, sanksi ini juga dapat memperburuk harga komoditas karena pasokan komoditas alam dari Rusia untuk global ikut turun.

Peneliti Paramadina Graduate School of Diplomacy Mahmud Syaltout mengatakan, kendati perang membuat kerugian dan krisis perdagangan maupun ekonomi, ada beberapa negara yang justru diuntungkan. Ia



Tentara Rusia memasuki Ibu Kota Ukraina, Kiev dan menghancurkan sejumlah bangunan dan fasilitas umum

mencontohkan, negara penghasil emas, perak, alumunium, dan nikel seperti Indonesia mengalami kenaikan harga komoditas saat konflik Rusia-Ukraina berlangsung.

Ia menambahkan, negara lain penghasil minyak, gas bumi, perak, emas, nikel dan alumunium, hingga palladium juga mengalami kenaikan ini.

“Untung dan rugi secara ekonomi maupun perdagangan dalam konflik ini bukan hanya bergantung pada sisi mana kita berpihak secara politik, (ke Rusia atau Ukraina), tapi juga bergantung pada interdependensi perdagangan kita, apakah dengan jejaring dagang aliansi besar Rusia

ataukah aliansi Ukraina-US-EU dan juga secara khusus pada komoditas ekspor dan impor kita,” kata Mahmud.

Sementara itu, Peneliti INDEF Eisha M. Rahcbini mengatakan, AS setidaknya telah memberikan sanksi pada pemain pasar keuangan dan perusahaan teknologi Rusia. Ia menjelaskan, kendati berdampak pada ekonomi Rusia, negara ini masih mungkin mendapat bantuan keuangan dan perdagangan dari Cina.

Negara-negara di Asia Tenggara harus mengantisipasi perluasan konflik agar tidak berpindah ke kawasan Asia Tenggara. Konsolidasi kekuatan di kawasan Indo-Pasifik sebelumnya dibuat melalui deklarasi

pakta pertahanan Australia, United Kingdom dan United States of America (AUKUS) pada September 2021.

Pakta pertahanan AUKUS ini dihadirkan sebagai upaya perimbangan kekuatan (*balance of power*) terhadap Cina yang semakin mengokohkan pengaruh dan kekuatan ekonomi-politik serta pertahanannya di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik secara general.

Perlu komitmen semua negara di kawasan yang harus terus ditegakkan. Hal ini untuk menghadirkan kerja-kerja diplomasi dan komunikasi politik yang jujur, transparan, dan akuntabel.

Ika

PERANG, HARGA MINYAK, DAN DAMPAKNYA BAGI EKONOMI NASIONAL

Invasi Rusia ke Ukraina semakin membuat harga minyak dunia melambung. Sebelumnya harga komoditas emas hitam ini sudah mengalami peningkatan seiring mulai pulihnya ekonomi sebagian besar negara di dunia akibat pandemi.

Di tengah kenaikan harga minyak karena peningkatan permintaan global tersebut, geopolitik antara Rusia dan Ukraina memanas yang berakibat semakin mendorong harga minyak dunia melesat ke atas. Harga minyak jenis Brent menembus USD105 per barrel pada 24 Februari 2022 sesaat setelah Rusia menyerang Ukraina.

Minyak Bumi masih merupakan

bahan energi utama bagi perekonomian dunia, sehingga konflik perang yang melibatkan negara-negara penghasil energi seperti Rusia – Ukraina ini akan membuat ketidakpastian harga dan pasokan minyak global.

Rusia merupakan produsen minyak terbesar kedua di dunia dan bukan anggota OPEC, sehingga perang ini akan membuat harga minyak berpotensi kian meninggi dengan implikasi yang tidak ringan bagi pemulihan ekonomi baik di level global maupun nasional.

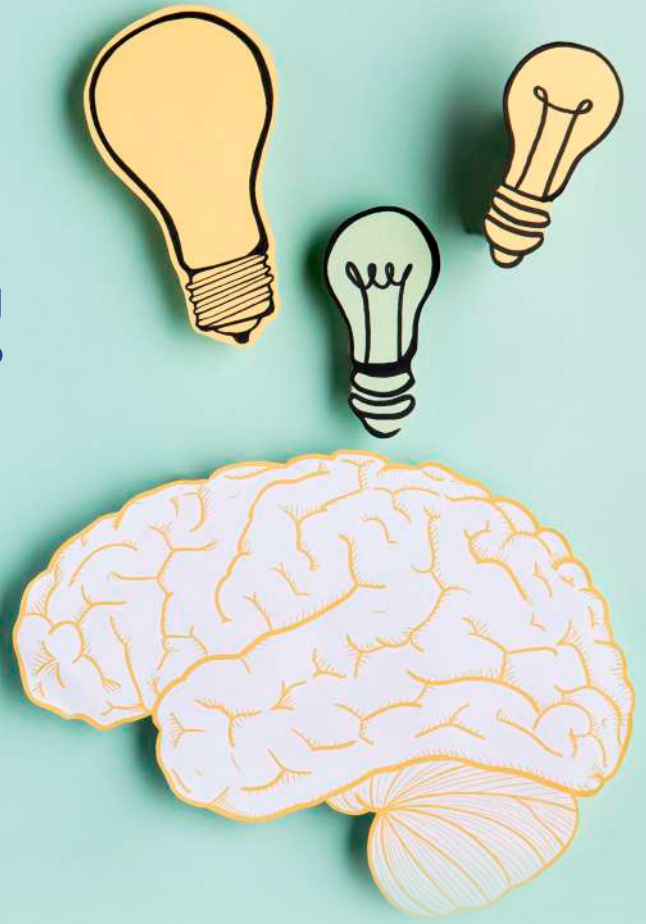
Perekonomian Indonesia pada 2021 telah lepas dari resesi dan mampu tumbuh positif di tingkat 3,69%. Capaian pertumbuhan

ekonomi ini sekaligus menandakan fase pemulihan ekonomi nasional berjalan di sepanjang tahun 2021.

Pada 2022 target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2%, menyiratkan upaya pemulihan ekonomi yang lebih akseleratif sehingga dapat segera menjalankan agenda transformasi ekonomi.

Namun, perang dan harga minyak dunia yang tinggi dapat menjadi batu sandungan bagi pemulihan ekonomi dan meningkatkan ketidakpastian dunia bisnis. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk dapat menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah geopolitik global yang memanas dan kenaikan harga minyak dunia. **(Sumber: *Indefor.id*)**

Berpikir Besar! Anda itu Hebat!



David J. Schwartz dalam bukunya Berpikir dan Berjiwa Besar menuliskan kalimat yang mengarahkan mindset Anda untuk “Berpikirlah Besar!”. Kalimat sederhana tetapi tak sesederhana maknanya. Tanpa Anda sadari jika Anda berpikir diri Anda lemah, maka Anda benar-benar menjadi lemah. Jika Anda berpikir tak sanggup, pastilah tak kesanggupan yang akan menghampiri Anda. Berpikir tak hebat karena melihat kehebatan oranglain, maka Anda akan benar-benar merasakan hal itu.

Pikiran Inspiratif senantiasa memperbesar daya tangkap pengaruh untuk berpikir besar. Terkadang sebagai manusia, kita pun hanya terbiasa dengan lingkungan yang membentuk kita. Walaupun sama-sama terlahir sebagai “pemimpin”, namun cara berpikir, cara memandang, bahkan cara kita menyelesaikan hanya sebatas “lingkaran” yang selalu membatasi area kita menyelesaikannya.

Pikiran ketakutan untuk berbuat, takut mencoba, bahkan ketika jawaban ada di depan Anda, seakan-akan terlewat begitu saja. Dan akhirnya membentuk sebuah kebiasaan (habit) dan sayangnya kebiasaannya ke arah negatif. Ngerinya, kebiasaan itu berubah drastis menjadi karakter Anda.

Sadari bahwa kita diciptakan sebagai manusia menjadi makhluk yang sangat berharga. Manusia dilengkapi pikiran, memiliki jiwa raga, dan diberikan talenta yang berbeda-beda. Human is a very special

being! Sebagaimana pada firman Allah dalam QS. At-Tin ayat 4. “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.

Namun banyak manusia menilai dirinya sebagai orang yang tidak berharga dan tak mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Hal itu dikarenakan manusia tak mampu melihat dirinya sendiri.

Selama kita memandang diri kita berdasarkan kelemahan, maka kita hanya sebatas melakukan apa yang kita bayangkan dan kira. Tapi ketika kita memandang diri kita besar dan melihat kemampuan yang luar biasa, maka capaian kita pun akan melampaui batasan diri kita dan terus maju tuk gapainya. Berpikirlah besar, maka Anda akan menjadi besar!

Keluarlah dari kebiasaan yang menghambat potensi Anda, berpikirlah “luar biasa”.

*You can not stop the wave in ocean but
you can learn to surf.*

Mulailah saat ini. Sukses selalu untuk Anda.





PP MUHAMMADIYAH DESAK RUSIA-UKRAINA LAKUKAN GENCATAN SENJATA

Hingga artikel ini ditulis (Kamis, 3/3), invasi Rusia atas Ukraina telah memakan banyak korban meninggal dunia. Pemerintah Ukraina mengklaim bahwa terdapat lebih dari seribu tentara Rusia tewas dalam perang

tersebut. Begitupun sebaliknya, pemerintah Rusia mengklaim ratusan tentara Ukraina tewas karena mempertahankan negaranya.

Terlepas dari berbagai klaim tersebut, peperangan yang berakhir pada jatuhnya korban jiwa, baik dari

kelompok tentara maupun masyarakat sipil, sama sekali tidak ada untungnya bagi kedua negara yang berkonflik. Perang hanya akan menghasilkan kehancuran, penyesalan, dan ketidakharmonisan.

Sebelum perang Rusia-Ukraina

tersebut merembet ke berbagai sektor dan memicu terjadinya Perang Dunia III, sebagaimana yang diprediksi sejumlah pengamat internasional, maka sudah seharusnya masyarakat dunia mendesak kedua negara untuk segera berdamai.

Salah satu elemen sosial di Indonesia yang menyerukan gencatan senjata dan melakukan perundingan damai dalam perang tersebut adalah Muhammadiyah. Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, patut bagi Muhammadiyah untuk menyerukan seruan moral tersebut. Hal ini bukan hanya didasarkan pada nilai-nilai agama yang mengedepankan perdamaian, tapi juga persoalan kemanusiaan global yang harus diutamakan.

Pasalnya, perang hanya akan memunculkan ketakutan bagi masyarakat sipil. Tidak akan ada jaminan hidup yang layak bagi generasi penerus mereka pasca perang usai nanti. Karena itu, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak agar Rusia dan Ukraina yang sedang terlibat peperangan melakukan gencatan senjata.

PP Muhammadiyah juga mendesak PBB untuk melakukan langkah tertentu untuk mengakhiri perang. PBB sebagai organisasi yang menyatukan banyak negara maju di dunia, perlu bertindak tegas agar berani menghentikan perang tersebut.

“Muhammadiyah mendesak kedua belah pihak untuk dapat melakukan gencatan senjata dan mencoba mencari solusi damai melalui meja perundingan,” tulis PP Muhammadiyah dalam siaran persnya, Kamis (3/3).

Selain itu, lanjut press release tersebut, Muhammadiyah juga mendesak PBB, khususnya Dewan Keamanan untuk melakukan langkah-

langkah yang diperlukan demi mengakhiri peperangan karena akan menimbulkan masalah yang kompleks baik ekonomi, politik, kemanusiaan, perdamaian global, dan masalah-masalah lainnya.

PP Muhammadiyah pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia karena telah mengeluarkan seruan untuk mengakhiri perang. Namun, pemerintah RI didorong untuk lebih aktif terlibat.

“Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang telah membuat seruan agar pertempuran diakhiri. Akan tetapi Pemerintah Indonesia hendaknya bisa lebih aktif dan proaktif terlibat dalam penyelesaian peperangan Rusia-Ukraina dan berbagai dampak yang ditimbulkannya,” tuturnya.

Selain itu, masyarakat, khususnya umat Islam diminta agar tidak terprovokasi. Upaya ini untuk menjaga kerukunan.

“Muhammadiyah mengimbau masyarakat, khususnya umat Islam, agar tidak terpengaruh oleh provokasi dan propaganda kedua belah pihak yang berusaha mencari dukungan politik internasional. Peperangan Rusia-Ukraina bukanlah karena masalah agama. Karena itu, masyarakat dan umat Islam, hendaknya tetap menjaga kerukunan dan persatuan dengan tidak menyebarkan informasi yang tidak jelas sumbernya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” tegasnya.

Karena itu, Muhammadiyah mengimbau masyarakat, khususnya umat Islam, agar tidak terpengaruh oleh provokasi dan propaganda kedua belah pihak yang berusaha mencari dukungan politik internasional.

Terakhir, PP Muhammadiyah

“Kami memberikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang telah membuat seruan agar pertempuran diakhiri. Akan tetapi Pemerintah Indonesia hendaknya bisa lebih aktif dan proaktif terlibat dalam penyelesaian peperangan Rusia-Ukraina dan berbagai dampak yang ditimbulkannya.”

PP Muhammadiyah

menyampaikan, di era tatanan dunia baru yang menjunjung demokrasi dan perdamaian semestinya dibangun hubungan antar negara dan bangsa yang lebih adil, saling menghormati, dan menjauhkan tindakan hegemoni dalam bentuk apapun.

“Karena pada dasarnya semua negara dan bangsa di muka bumi ini memiliki kesetaraan,” ujar PP Muhammadiyah soal invasi Rusia ke Ukraina. **Naf**

FOREIGN MINISTERS ASEAN RETREATS' 2022

KOLEKTIFITAS ASEAN DI PANGKAL 2022

Negara-negara ASEAN mesti bersatu dan bekerjasama demi mendorong kemajuan di kawasan. Apalagi, negara-negara di ASEAN cukup terpuruk dalam hal ekonomi, ketika kurang lebih dua tahun pandemic Covid-19 menyerang. Tanpa kerjasama dan saling peduli, kemajuan Kawasan tidak akan tercapai.

Setelah ASEAN dipimpin Kamboja, inilah kali pertama pertemuan bersama antar-negara ASEAN dilakukan. Inilah pertemuan jajaran menteri luar negeri seluruh negara ASEAN atau *Foreign Ministers ASEAN Retreats'*, yang dilaksanakan pada 16-17 Februari 2022 di Phnom Penh, Kamboja.

Menurut keterangan resmi pemerintah Kamboja, pertemuan kali ini mengusung tajuk, "*ASEAN A.C.T.: Addressing Challenges Together*". Sebuah tema yang menyiratkan pesan penting bagi negara-negara ASEAN bahwa di masa-masa sulit akibat pandemi ini, kerja sama regional mesti ditingkatkan. Persatuan dan persaudaraan mesti dijaga.

Kendati demikian, acara yang dilaksanakan secara *hybrid* tersebut, tidak dihadiri oleh perwakilan Myanmar. Myanmar disebut-sebut menolak hadir karena ASEAN

hanya mengundang perwakilan nonpolitik. ASEAN secara khusus tidak mengundang para jenderal yang saat ini memegang kendali politik, setelah kudeta beberapa waktu lalu.

Terlepas dari itu, para pemimpin tertinggi ASEAN tetap berharap bahwa permasalahan domestik yang tengah dihadapi oleh Myanmar, dapat segera diatasi.

"Kami berupaya membantu menyelesaikan krisis (yang terjadi di Myanmar)", demikian menurut berita resmi tertulis pemerintah Kamboja (18/02).

Integrasi Regional

Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari tersebut, memunculkan nuansa kental tentang pentingnya menguatkan integrasi regional di kawasan ASEAN. Integrasi ini, terutama, dilakukan untuk mendorong kerja sama pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca-pandemi.

Dalam hal ini, Sekretaris Jenderal ASEAN, dalam sebuah *briefing* dalam pertemuan tersebut, menyampaikan pentingnya kolektivitas. "Mendorong semua negara-negara ASEAN untuk mengimplementasikan semua kesepakatan terkait penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi agar kawasan Asia Tenggara dapat segera

pulih," ujar Retno Marsudi, melalui konferensi virtual dari Kamboja (17/2).

Secara lebih spesifik, integrasi kawasan Asia Tenggara ini akan dilaksanakan dalam konteks promosi perdamaian, keamanan dan stabilitas regional. Selain itu, integrasi ini juga dilakukan dalam bentuk kerja sama mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan (*sustainable development*).

"Kita juga akan menekankan pentingnya memperdalam integrasi ekonomi ASEAN, meningkatkan perdagangan dan investasi intra-ASEAN, mendorong konektivitas rantai pasok," ujar perwakilan Kamboja dalam keterangan resmi tertulis (18/02).

Dalam konteks kerja sama ekonomi, tentu hal ini menarik untuk melihat sejauhmana kooperasi negara-negara Asia Tenggara yang memiliki karakter ekonomi beragam mampu mengakselerasi pemulihan ekonomi kawasan. Kerja sama yang bersifat resiprokal dan saling menguntungkan, tentu saja, menjadi sangat penting. Misalnya, konfigurasi pemasaran produk-produk lokal yang selama ini menjadi andalan masing-masing negara.

Di sisi lain, pendalaman integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara juga perlu dilakukan dalam kerangka



Indonesia sudah pasti hanya menjadi pasar.

Karena itu, Indonesia perlu mengoreksi dirinya. Indonesia, pada kesempatan pertemuan antar Menteri luar negeri ASEAN, perlu memanfaatkan momentum ini sebagai produsen handal dengan produk-produk yang berkualitas. Sudah barang tentu untuk menuju Indonesia menjadi negara produsen, kita perlu memetakan sektor-sektor strategis yang bisa didorong dan ditawarkan di pasar regional.

Paling tidak, Indonesia perlu menyiapkan pembangunan yang masif di dua sektor utama, yakni pertanian dan industri manufaktur. Dua sektor inilah penyumbang terbesar ekonomi Indonesia, termasuk menyerap 47,9 persen total tenaga kerja Indonesia pada Agustus 2021. Dengan potensi berbagai macam produk pertanian yang bisa diekspor oleh Indonesia, tentu hal ini menjadi arah pengembangan jangka panjang yang menguntungkan bagi Indonesia.

Di sisi lain, sektor Industri manufaktur juga perlu dipersiapkan. Sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dan memiliki permintaan ekspor besar mesti dimaksimalkan. Sebab, sektor industri manufaktur inilah tulang punggung peningkatan nilai tambah ekonomi.

Akhirnya, kebermanfaatan ekonomi akan jauh lebih terasa ketika proses integrasi ini diiringi dengan kesiapan Indonesia, sehingga upaya-upaya menjaga komitmen untuk mendorong perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran baik di regional Asia Tenggara maupun Internasional, bukanlah isapan jempol belaka. **Zhar/ Naf**

berpikir keberlanjutan (*sustainability*), yang mana isu keberlanjutan juga juga menjadi salah satu topik pembahasan.

Maka itu, proses integrasi ekonomi regional Asia Tenggara perlu dikelola dalam kerangka ekonomi hijau yang memperhatikan regenerasi lingkungan. Para pemimpin di Asia tenggara pastilah berharap supaya ekonomi hijau tidak sekedar menjadi ide, tapi juga terealisasi dalam praktik dan proyek pemerintahan yang riil.

Sebab itu, komitmen pada masing-masing pemimpin negara di Asia Tenggara sangatlah penting. Apalagi, kondisi alam dan lingkungan hidup secara umum belakangan ini mengalami problem serius. Industri-industri, khususnya yang bergerak di bidang pertambangan, masih sedikit sekali yang memprioritaskan kesehatan lingkungan.

Kematangan Domestik

Mengaca pada hasil pertemuan tersebut, selain terus mendorong upaya

kerja sama negara-negara ASEAN untuk pulih secara bersama-sama baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan, Indonesia perlu memperhatikan kesiapan domestik.

Misalnya, dari sisi ekonomi. Indonesia tentu tidak ingin, dalam jangka panjang, hanya menjadi pasar bagi negara-negara Asia Tenggara, seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Sejumlah negara tersebut telah jauh memajukan sektor perekonomian mereka, karena satu kuncinya yaitu memprioritaskan kompetensi dan keterampilan sumber daya manusia.

Sementara itu, Indonesia justru masih lemah dalam hal keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia. Terlebih lagi, SDM yang tidak terlalu kompeten itu terus saja menuntut gaji tinggi. Tak pelak, para produsen perusahaan-perusahaan multinasional lebih memilih Vietnam atau Thailand untuk mendirikan pabrikannya di sana, sedangkan

KONFLIK MOSKOW-KIEV DAN KERAPUHAN EKONOMI



Azhar Syahida
Staf Peneliti di Rumah Baca Cerdas (RBC)
Institute A. Malik Fadjar

Barat dua sisi koin mata uang, begitulah relasi antara geopolitik dan ekonomi: keduanya berkelindan satu sama lain. Dalam bahasa lainnya, perkembangan ekonomi suatu kawasan akan selalu berubah seiring dengan pergeseran lanskap politik yang menyertainya. Lebih-lebih, perubahan lanskap politik itu dialami oleh negara-negara yang berkontribusi besar terhadap ekonomi.

Konflik antara Moskow dan Kiev yang sepekan ini mencapai puncaknya bermula dari pernyataan resmi Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang mengumumkan invasi ke wilayah Ukraina pada Kamis, 24 Februari 2022. Ini adalah puncak ketegangan dua negara yang sebetulnya sudah terjadi sejak Ukraina memisahkan diri dari Uni Soviet pada Desember 1991.

Tentu, invasi yang dilakukan oleh Rusia kepada Ukraina membawa konsekuensi ekonomi. Namun begitu, sebetulnya, terlalu dini untuk mengalkulasi dampak ekonomi atas invasi Rusia itu. Sebab, hal-hal tidak

menentu masih akan muncul ke depan. Terlalu banyak pertanyaan soal invasi ini ketimbang jawaban yang meyakinkan. Begitulah, saking dinamisnya urusan politik.

Sungguhpun begitu, perkiraan-perkiraan awal bisa kita baca dari sekarang sebagai bagian dari analisa awal. Menurut saya, konsekuensi-konsekuensi ekonomi utamanya akan bertransmisi melalui pergerakan harga komoditas dunia, inflasi, dan perdagangan yang ketiganya berkaitan erat dengan prospek pemulihan ekonomi global.

Angka-angka statistik mencatat bahwa Rusia adalah produsen minyak mentah dan salah satu pemasok gas alam terbesar di dunia. 40 persen kebutuhan gas di Eropa kabarnya berasal dari negeri Beruang Merah itu. Di sisi lain, sumur-sumur minyak di Rusia memproduksi 11 persen minyak mentah global atau sekitar 10,5 juta barel per hari. Sebuah angka yang tidak sedikit.

Dari sisi harga komoditas, dampak

langsung dari invasi tersebut terlihat dari naiknya harga minyak mentah dunia. Bloomberg (2022) merilis bahwa harga minyak mentah Brent, per 28 Februari 2022, mencatatkan rekor tertinggi sejak Agustus 2014, yakni mencapai 101 USD per barel. Sedang minyak mentah berkode WTI berada pada level 95 USD per barel, atau tertinggi sejak September 2014. Dari angka tersebut, kita bisa membaca bahwa kenaikan harga minyak mentah global ini belum melampaui harga seperti ledakan harga komoditas (*booming commodity*) pada 2010-2014. Kesimpulan sederhanannya, invasi ini meski menyerang sisi suplai minyak global, dampaknya relatif kecil.

Sebenarnya, hari-hari ini harga minyak mentah global memang tengah merangkak naik sejalan dengan tren pemulihan ekonomi yang terjadi di seluruh belakan Eropa, Asia, dan Amerika. Kembali dibukannya restriksi mobilitas barang, jasa, dan masyarakat menyorong permintaan bahan bakar kendaraan pribadi, pesawat terbang, dan industri. Bahkan, selama masa pemulihan ekonomi ini, beberapa ekonom memperkirakan soal terjadinya *supercycle* komoditas, atau pertumbuhan secara terus-menerus pada harga komoditas global. Dengan kata lain, konflik antara Rusia dan Ukraina menjadi stimulus kenaikan harga di beberapa komoditas tertentu.

Kedua, dari sisi konsumen rumah tangga di negara-negara Eropa, invasi

Rusia ini berpotensi membahayakan pasokan gas alam, yang memiliki peluang kuat memperburuk krisis energi akibat minim suplai dan permintaan yang terus naik, belakangan ini. Hal ini berkebalikan kuat dengan inflasi yang kini terjadi di negara-negara yang tengah menikmati pemulihan ekonomi. Diperkirakan bahwa sempitnya pasokan gas alam akibat konflik Moskow-Kiev semakin memanaskan pergerakan inflasi. Ini tentu akan mengkhawatirkan jika terus memecahkan rekor, sebab, satu-satunya cara untuk menurunkan tensi inflasi dalam konteks pemulihan ekonomi global adalah bank sentral mesti menginjak rem dengan menaikkan suku bunga acuan. Pada aras tertentu, kenaikan suku bunga yang terlalu dini justru bisa menikam pemulihan ekonomi yang tengah kita nikmati bersama.

Ketiga, yang sebetulnya juga berkaitan dengan transmisi kedua dan ketiga, adalah isu perdagangan. Negara-negara yang memiliki relasi dagang baik dengan Rusia maupun Ukraina, sedikit banyak akan terdampak. Rusia dan Ukraina adalah salah satu produsen gandum terbesar di dunia. Rusia, yang menempati urutan keempat terbesar setelah Uni Eropa, Tiongkok, dan India, memproduksi sekitar 85,9 juta metrik ton gandum, sementara Ukraina adalah produsen ke-9 terbesar dunia dengan produksi mencapai 26,2 juta metrik ton. Negara-negara yang membutuhkan pasokan gandum untuk produksi roti dari kedua negara tersebut, boleh jadi akan terimbas besar jika invasi dan perundingan tidak menuai titik terang.

Pada akhirnya, ketiga transmisi tersebut tentu akan bermuara pada hambatan pemulihan pertumbuhan ekonomi yang kini tengah dinikmati

oleh beberapa negara Eropa. Jika konflik ini berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan meluas, sangat mungkin bahwa saluran terhadap dampak ekonominya akan semakin lebar.

Kendati demikian, terlepas dari beberapa pintu masuk dampak ekonomi yang muncul tersebut, invasi Rusia ke Ukraina semakin mencandran bahwa ekonomi yang bergantung pada komoditas ekstraktif

invasi Rusia ke Ukraina semakin mencandran bahwa ekonomi yang bergantung pada komoditas ekstraktif adalah ekonomi yang rapuh. Ekonomi yang terlalu bergantung pada tarik ulur keseimbangan suplai dan permintaan pasar adalah yang mudah runtuh.

adalah ekonomi yang rapuh. Ekonomi yang terlalu bergantung pada tarik ulur keseimbangan suplai dan permintaan pasar adalah yang mudah runtuh.

Pada kaitan ini negara-negara yang masih menggantungkan diri pada sektor ekstraktif—pertambangan dan perkebunan, berpotensi terdampak dengan variasi yang beragam. Negara-

negara yang besar ketergantungannya pada komoditas ekstraktif terutama yang memiliki relasi dagang kuat dengan Rusia dan Ukraina, pemulihan ekonomi yang dicandran oleh pertumbuhan ekonomi sedikit banyak terganggu. Demikian berkaitan dengan level interaksi sebuah negara dengan pasar global. Dengan kata lain, negara-negara yang keterkaitan eksternalnya kuat, dampak ekonomi yang muncul juga semakin besar.

Domestik

Sementara itu, meski dampak ekonomi invasi Rusia ke Ukraina diprediksi tidak terlalu besar pada pemulihan ekonomi global, Indonesia patut waspada. Indonesia adalah *net importir* minyak mentah dunia. Artinya, untuk memenuhi pasokan bahan bakar dalam negeri, Indonesia mesti rutin mendatangkan suplai dari pasar global. Tentu, kenaikan yang terus terjadi pada komoditas minyak mentah, berpotensi membebani APBN untuk biaya subsidi.

Selain itu, industri makanan dalam negeri, yang membutuhkan pasokan gandum sebagai bahan dasar industri, perlu berwaspada, sebab, kita tidak ada yang tahu, kapan konflik yang sedikit banyak telah menghalangi laju ekonomi ini akan berhenti.

Ketakutan memang tidak perlu dibesar-besarkan, tidak perlu dilebih-lebihkan. Tapi, dalam catatan sejarah umat manusia, tidak ada konflik yang cepat terselesaikan. Di balik konflik yang terlihat kecil, selalu saja ada pemain besar yang sewaktu-waktu bisa memicu ketegangan yang lebih besar. Seperti sebuah permainan, Moskow adalah senior dalam konflik dunia, yang berarti Anda sudah tahu, sejauh mana konflik ini akan selesai dengan cepat?

PENUNDAAN PEMILU DAN WAJAH REPRESIF PEMERINTAH



Baikuni Al-Shafa
Ketua Bidang Hikmah, Politik
dan Kebijakan Publik DPP IMM

Awal tahun 2022 dibuka dengan dua peristiwa tragis di Indonesia, yaitu insiden represiif Wadas dan penembakan di Sulawesi Tengah yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian. Dua peristiwa ini merupakan kejadian yang memilukan. Bagaimana tidak, negara yang sudah keluar dari belenggu otoritarianisme Orde Baru kini seolah kembali pada memori kelam masa itu.

Perjuangan Reformasi (1998) seakan tidak membuahkan hasil signifikan, yang berimplikasi pada transformasi wajah politik negeri ini menjadi lebih baik. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena negara terus menambah daftar panjang tindakan represiif terhadap rakyatnya.

Pada realitasnya, wajah represi ini memiliki satu frekuensi dengan praktik perampasan tanah yang kerap menelan korban jiwa. Wajah kepolisian terus tercoreng saat menghadapi konflik di masyarakat. Aparat keamanan senantiasa mengedepankan cara-cara yang arogan dan represiif. Seolah lebih membela kepentingan para investor

dibanding derita hidup rakyat kecil.

Bahkan, di masa pandemi sekalipun tidak menyurutkan alasan pemerintah untuk memperluas ekspansi bisnis dan pembangunan berbasis sumber-sumber agraria. Satu jawaban mereka adalah karena beralih pemulihan ekonomi. Hasilnya, masyarakat di wilayah-wilayah konflik terus menghadapi ancaman berlapis. Satu sisi sedang terancam Covid-19, dan pada sisi yang lain mengalami ancaman digusur pemerintah-investor dari tempat tinggal mereka.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, terjadi kenaikan konflik agraria yang sangat signifikan di sektor pembangunan infrastruktur sebesar 73% dan sektor pertambangan sebesar 167% pada 2021. Kenaikan signifikan situasi konflik agraria juga terjadi dari sisi korban terdampak dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 135.337 KK menjadi 198.859 di tahun 2021. Situasi ini menandakan bahwa konflik agraria semakin menyasar area-area masyarakat akar rumput.

Di Riau, lahan para petani di Singingi Hilir, Kuantan Singingi dicaplok oleh

PT Warnasari Nusantara pada tahun 2021. Perusahaan tersebut membuat galian parit gajah untuk mengisolasi lahan masyarakat sehingga tidak dapat bertani dan mengambil hasil perkebunannya.

Kemudian, salah satu yang terbaru ditunjukkan oleh aparat kepolisian dengan pengepungan warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah pada 8 Februari 2022. Juga, peristiwa penembakan peserta unjuk rasa yang menolak aktivitas tambang oleh PT Trio Kencana di Paringi Moutung, Sulawesi Tengah pada Sabtu (12/2). Dengan demikian, deretan konflik dan perampasan ruang hidup oleh pemerintah bersama pihak pemodal dapat disaksikan dengan nyata.

Dua peristiwa tersebut menjadi perhatian Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM). Melalui Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik, DPP IMM menyerukan konsolidasi dan aksi solidaritas kepada seluruh level pimpinan IMM. Seruan tersebut tertuang dalam surat instruksi No: 001/A-4/2022 pada tanggal 16 Februari 2022.

Dalam instruksi dan aksi yang digelar IMM se-Indonesia pada Rabu (2/3), IMM tegas menyatakan jika tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan bentuk represiif kepada masyarakat. Hal tersebut tak lain ialah usaha untuk membungkam hak dalam menyuarakan aspirasi.

Semestinya, pendekatan yang

dilakukan ialah pendekatan humanis bukan sebaliknya. Babakan situasi ekonomi dan kebijakan politik pemerintahan Jokowi saat ini begitu nyata. Tentu saja, sikap represif yang demikian tersebut lambat laun akan mencekik rakyat. Hal tersebut dapat dilihat melalui arah kebijakan yang beberapa waktu lalu diputuskan. Salah satunya melalui Menteri Ketenagakerjaan yang mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 2 tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua (JHT).

Peraturan tersebut sangat merugikan buruh. Serikat-serikat pekerja satu suara menyatakan sikap untuk menolak Permenaker terkait klaim Jaminan Hari Tua di usia 56 Tahun. Kecaman masif disuarakan serikat-serikat buruh untuk menahan langkah pemerintah memberlakukan Permenaker yang tentu merugikan pekerja. Sebelumnya, uang JHT dapat dicairkan dalam waktu yang relatif cepat tanpa menunggu usia 56 tahun.

Kebijakan Menaker dengan permen yang baru saja dikeluarkan jelas mempersulit para pekerja. Jika dibandingkan dengan peraturan Menaker Nomor 19 tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua, pembayaran JHT jauh lebih cepat. Misalnya, pada pekerja yang mengundurkan diri, pemberian manfaat JHT dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan. Sedangkan pada permenaker Nomor 2 Tahun 2022, peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pembayarannya akan diberikan pada saat mencapai usia 56 tahun.

Sebab itu, tidak ada alasan



Banyak pekerja atau buruh yang membutuhkan dana JHT secepatnya untuk kebutuhan hidup atau memulai wirausaha pasca berhenti bekerja.

untuk menahan uang pekerja, karena JHT yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah dana milik nasabah yang tak lain adalah pekerja, bukan milik pemerintah. Banyak pekerja atau buruh yang membutuhkan dana JHT secepatnya untuk kebutuhan hidup atau memulai wirausaha pasca berhenti bekerja.

Belum surut perjuangan, Presiden Jokowi lagi-lagi menginstruksikan jika bukti kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi syarat berbagai pelayanan publik. Contohnya, pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli, kepesertaan calon jemaah haji dan umrah, dan pengurusan perizinan usaha. Selain itu juga permohonan SIM, STNK, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), syarat untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan seluruh pelayanan terpadu satu pintu.

Berbagai keperluan tersebut tentu

berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Demi mengurus berbagai persyaratan formal, pada akhirnya warga harus segera mendaftarkan diri menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan.

Melihat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, begitu jelas berbagai persyaratan terkait jaminan kesehatan mempersulit masyarakat. Seharusnya negara melalui pemerintah menjamin secara utuh dan penuh atas jaminan kesehatan oleh negara.

Wacana Penundaan Pemilu

Belakangan, hadir wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024. Isu ini mengemuka setelah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar memberi usul agar Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Ia mengaku menyerap aspirasi dari petani Sawit di Kabupaten Siak, Riau, saat kunjungan kerja. Senada dengan keduanya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga satu suara menerima usulan penundaan Pemilu 2024. Jika ditunda, berarti tidak ada transisi kepemimpinan yang bermuara pada perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.

DPP IMM berpandangan, jangan sampai kepercayaan rakyat melalui pemilu, baik untuk eksekutif ataupun legislatif dikhianati. Apabila kewenangan tersebut tidak dilaksanakan sesuai ketentuan UUD 1945 dan aturan lain, mandat itu gugur dan kembali ke rakyat.

TEROR, CINTA DAN PERDAMAIAN

Tiada yang menyangkal bahwa Indonesia, dikenal sebagai negara yang bangsanya sangat kental dalam beragama. Meski beragam agama dan kepercayaan yang hidup di negeri ini, namun masyarakatnya tetap dikenal sebagai bangsa yang murah senyum, ramah dan toleran. Corak beragama warga Indonesia yang demikian itu digambarkan Jim Baton dalam novelnya berjudul *Someone Has to Die*.

Kendati berbicara banyak tentang problem terorisme yang marak terjadi di Indonesia dalam kurun waktu dua dekade terakhir, namun aspek sosial-budaya masyarakatnya yang senang bertetangga, saling sapa, dan aktif dalam kegiatan yang dilakukan secara bersama sangat mencolok dalam novel tersebut.

Hal ini karena Jim sebagai seorang penulis novel, langsung merasakannya ketika ia tinggal di rumah keluarga Muslim di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di Banjarmasin itulah Jim sangat mengenal watak masyarakatnya yang sangat kental dalam beragama. Satu sisi fanatisme masyarakat beragama di sana sangat kuat, tapi pada sisi yang lain sikap ramah dan saling tolong-menolong antarsesama telah menjadi kebiasaan warga setempat.

Hanya saja, sebagaimana tercermin dalam novel *Someone Has To Die*, keramahan warga Banjarmasin yang mayoritas Muslim itu tidak untuk non-Muslim. Meski novel ini merupakan

artikel fiksi, sangat mungkin Jim menuliskannya dari data lapangan yang berbasiskan realitas nyata. *Nah*, pada posisi ini, sesungguhnya Jim sebagai warga negara Amerika Serikat (AS) ingin mengkritik perilaku beragama yang demikian itu, bahwa mensubordinasi kelompok lain bukanlah ajaran agama, sekalipun itu Islam.

Buku *Someone Has To Die* merupakan sebuah novel yang menceritakan tentang seorang aktivis perdamaian ketika diundang pada acara perdamaian di Jakarta. Tetapi, informasi kedatangan aktivis perdamaian dari AS itu didengar oleh jaringan teroris yang berbasis di Moro, Filipina. Konflikpun dimulai dengan rencana jahat Syaifullah, ideolog sekaligus perekrut teroris, yang ingin membuat gaduh acara tersebut dengan ledakan bom bunuh diri.

Tak pelak, langkah pertama yang dilakukan Syaifullah adalah memastikan diri untuk merekrut anak muda yang tumbuh dari keluarga Muslim yang taat. Syaifullah tidak mencarinya di Jawa, karena berfikir bahwa Jawa sedang diintai aparat karena sudah seringkali terjadi aksi teror dan pelakunya dari juga dari orang Jawa. Maka, dia mendaratkan pencariannya ke Banjarmasin, sebuah kota yang cocok untuk merealisasikan gagasannya –atau balas dendam atas ketidakberhasilan Syaifullah melaksanakan panggilan yang sama di

waktu yang lampau.

Pengantin yang direkrut oleh Syaifullah kebetulan berasal dari Kampung Kelayan, kawasan kecil di Banjarmasin bagian selatan, yang dihuni hampir seluruh warganya Muslim fanatik, tapi menjadi tempat terjadinya kriminalitas tertinggi. Syaifullah menemukan Syukron dan kawan-kawannya dari pesantren Al-Mustaqim, yang kebetulan mereka adalah anak-anak pesantren yang suka dengan bahan bacaan buku-buku jihad, sehingga selalu bercita-cita ingin ikut berjihad di Afghanistan.

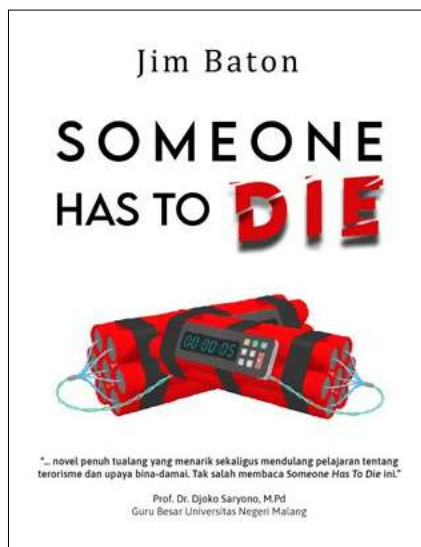
Novel tersebut sangat jelas menggambarkan sosok Syaifullah sebagai seorang ideolog sekaligus perekrut calon pengantin teroris. Tapi di sisi yang lain, ada juga orang-orang Islam yang sedang membangun jembatan antara orang Islam dan Kristen, seperti sosok Ibu Aminah dan Abdullah. Melalui Ibu Aminah, relasi Muslim-Kristen coba dirajutnya dengan mengikutsertakan Ibu Kris (non-Muslim) untuk ikut kelompok perempuan di kampung yang biasanya mengadakan acara *yasinan* dan arisan. Sementara Abdullah adalah mantan teroris yang bersembunyi dari masa lalunya, mengajar ilmu bela diri di pesantren Al-Mustaqim, dan orang di balik pembangunan gereja setelah dibakar sejumlah santrinya.

Ibu Aminah dan Abdullah berupaya menunjukkan bahwa perdamaian itu tidak hanya diperjuangkan di level

makro, yaitu melalui bidang politik, hukum atau pendidikan. Menurut Jim, aktifitas bina damai senantiasa bisa diwujudkan dalam bentuk yang lebih sederhana, misalnya dengan aktifitas warga berupa yasinan dan arisan kelompok perempuan di kampung. Ini adalah bentuk kearifan lokal yang bisa ditumbuhkan dalam rangka mewujudkan resiliensi terhadap ideologi ekstremis.

Penting untuk diketahui bahwa buku *Someone Has To Die* ini relatif tebal untuk pembaca orang Indonesia. Jumlah halamannya mencapai 442 halaman. Tentu ini sangat berat, apalagi alur cerita yang dibuat tidak selalu mengalir, melainkan berganti-ganti plot. Kemudian, dari aspek materi novel, sangat jarang novel yang mengkaji tentang terorisme, kecuali karya Noor Huda Ismail dengan judul “Temanku, Teroris?” (2010). Karya inipun sesungguhnya tidak benar-benar bisa dikatakan karya novel, karena Noor Huda Ismail bercerita tentang temannya sebagai salah satu pelaku Bom Bali I.

Buku yang diterbitkan penerbit *Pelangi Sastra* dan *Locus Perdamaian Indonesia* ini merupakan buku pertama dari Trilogi novel bertema terorisme dan perdamaian yang ditulis Jim sendiri. Dalam salah satu pengakuannya di acara *Webinar*, Jim menyebut bahwa karya ini merupakan hasil riset pribadinya pada tahun 2008-2010-an. Pertama kali diterbitkan berbahasa Inggris dan dipasarkan di AS, tapi karena *setting* novel ini banyak bercerita tentang beberapa kota di



Judul: *Someone Has to Die* (Harus Ada yang Mati)

Penulis: Jim Baton

Penerbit: Pelangi Sastra dan Locus Perdamaian

Tahun: Cet. Pertama, 2021

Tebal: xxiv + 442 hal.

Kategori: Novel

Peresensi: Amir Rifa'i

(Staff Pengajar AIK Universitas Muhammadiyah Malang)

Indonesia, sehingga sangat relevan bila dipasarkan di negeri ini.

Selain itu, novel ini juga menceritakan tentang motivasi kenapa banyak anak muda yang pada akhirnya bisa terpapar ke dalam jaringan teroris. Menurut buku ini, hal itu bukan hanya dipengaruhi ideologinya. Jim mengatakan, jawabannya ada di buku kedua nantinya.

Salah satunya terjadi pada dua anak yang sering berkunjung ke rumah penulis buku ini di Banjarmasin. Bagaimana seorang pemuda bisa direkrut di kampus ternama di Banjarmasin oleh kelompok ekstremis, sedangkan adiknya direkrut di kampung dari kelompok pengajian. Adik kakak ini direkrut di kelompok dan lokasi yang berbeda namun sama-sama memiliki ideologi terorisme.

Kejadian demi kejadian dan berbagai

kisah yang tertuang dalam buku ini terasa begitu mengalir, mudah dicerna, dimaknai dan seolah mengajak kepada kita untuk sadar bahwa Islam sejatinya tidak seekstrim yang diceritakan, tidak teroris justru harmonis.

Selain itu, dalam buku ini kita tidak hanya menemukan tentang perdamaian saja, namun kita juga disuguhkan tentang pemahaman agama, budaya, ekonomi juga tentang cinta. Semua tertuang dalam novel ini.

Akhirnya, bagaimana kelanjutan cerita Louis Staunton sebagai tokoh perdamaian dalam mengemban misi perdamaannya? Juga Saifullah sang perekrut teroris asal Indonesia dalam melancarkan aksinya? Dan bagaimana Abdullah yang juga mantan teroris dari masa lalunya? Dan juga tokoh yang lainnya? Ikuti kisah keseruan mereka dalam buku *Someone Has to Die*.

SAVANA, ADA APA DI SANA?

Tere Liye adalah penulis yang dikenal dengan sejumlah novel serialnya. Salah satu serial novel yang ditulisnya adalah Serial Anak Nusantara. Melalui sedikit tulisan ini, kita akan mendapatkan berbagai informasi umum tentang salah satu novel yang baru selesai ditulisnya, yaitu *Si Anak Savana*.

Seperti judulnya, *Si Anak Savana*, novel ini akan menceritakan kepada kita tentang kisah anak-anak yang penuh dengan pembelajaran berharga di salah satu Savana di desa bernama Dopu. Bagaimana si Wangsa, Sedo, Somat, Rantu, Bidal dan kawan-kawan lainnya menjalani kehidupan di tanah Savana?

Si Anak Savana merupakan karya Bang Tere, panggilan akrabnya, yang juga merupakan buku kedelapan, dari Serial Anak Nusantara. Dalam novel ini kita disajikan cerita menarik yang diawali dengan pencurian sapi di tempat tinggal Ahmad Wangsa. Adapun pencurinya sangat lincah, lihai, tidak meninggalkan jejak sedikitpun sehingga tidak ada yang merasa kehilangan.

Sangat lama aksi pencurian itu terjadi bahkan sampai berbulan-bulan namun tidak pernah ketahuan. Namun, ketika sedang menjadi tuan rumah untuk acara pacuan kuda, pencurian itu kembali terjadi. Adalah kepala kampung yang awalnya selalu menggampangkan sesuatu, ternyata kena musibah, semua sapinya

hilang tanpa jejak. Ini adalah akibat dari sikap seorang pemimpin yang selalu meremehkan kejadian, ketika peristiwa itu terjadi pada dirinya sendiri atau orang terdekatnya, baru musibah itu benar-benar memukul dirinya.

Novel karya Darwis (nama asli penulis) ini tentu saja tidak hanya berkisah tentang pencurian, tetapi juga banyak kisah seru, menghangatkan, dan khas anak-anak daerah Savana yang dibalut berbagai permasalahan yang sering terjadi di kalangan orang tua dan warga pada umumnya di kampung tersebut.

Namun, novel ini jelas tidak kalah keren dengan karya-karya Bang Tere sebelumnya. Sesuai premisnya, buku ini mengisahkan aktivitas anak-anak Savana di wilayah bagian timur Indonesia. Maka kita-pun diajak untuk berpetualang dengan seru bersama si Wangsa dan kawan-kawannya.

Dalam buku yang memiliki ketebalan 382 halaman ini kita diajak untuk menikmati kehidupan anak-anak yang berada di desa Dopu, di mana di tempat itu terdapat padang Savana yang sangat indah. Begitu juga tema-tema yang disajikan dalam isi buku ini juga sangat beragam.

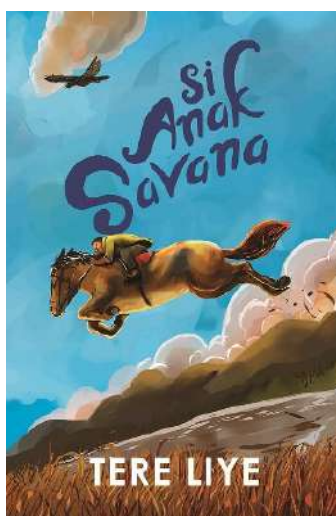
Selain itu buku yang terbit awal tahun 2022 ini juga menyajikan puisi yang ditulis oleh Sedo dengan judul “Anak Savana” sangat menarik dan penuh ekspresi. Dan tidak kalah menariknya karya bang Tere liye

ini selalu saja menyajikan kisah-kisah yang mengharukan. Salah satu karakter anak yang bernama Sedo membuat hati kita yang membaca buku ini terenyuh.

Sedo hidup bersama adiknya karena kedua orang tuanya sudah meninggal, akan tetapi anak ini selalu bekerja keras dan penuh tanggung jawab atas setiap pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Dia tidak pernah mengeluh atas kehidupan susah yang dijalaninya. Itu semua karena pesan dari mamaknya supaya Sedo tidak akan menyusahkan orang lain. Tidak mudah bergantung, apalagi membebankan hidup pada orang lain.

Walaupun novel ini lebih dikategorikan sebagai novel anak, namun tidak salah juga jika dinikmati oleh para remaja juga orang dewasa. Bahkan siapapun yang bisa membacanya terutama bagi yang senang dengan genre buku anak. Dari buku ini kita banyak belajar tentang kehidupan anak-anak di desa Dopu.

Ada beberapa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan Wangsa dan kawan-kawannya dalam buku ini. Dari kisah Wangsa yang melanggar peraturan berenang di telaga, kita bisa belajar tentang betapa pentingnya bertanggung jawab dan memikul konsekuensi atas perbuatan yang kita lakukan. Salut sama Bapak dan Mamaknya Wangsa yang mendidik putra satu-satunya untuk mempertanggung jawabkan



Judul Buku : Si Anak Savana
Penulis : Tere Liye
Penerbit : PT Sabak Grip Nusantara
Tahun terbit : 21 Januari 2022
Jumlah halaman : 382 hlm ; 20,5 cm
ISBN : 978-623-97262-2-5
Kategori : Novel
Peresensi : Choirul Umamah (Ibu Rumah Tangga dan Penikmat Novel)

perbuatannya.

Salah tetap salah, peraturan tetap peraturan, maka jalankan saja tanpa perlu alasan. *“Lari dari sebuah kesalahan tidak lebih baik dari berbuat salah itu sendiri.”* (halaman 238)

Dengan membaca buku ini dan semua buku di Serial Anak Nusantara karya bang Tere, selalu menjadikan kita terenyuh bahkan sukses membuat mata kita berkaca-kaca, terutama kisah Mamak yang begitu menyayangi anak-anaknya. Dan di buku Si Anak Savana, ulah Bidal sungguh menguji kesabaran mamak dan membuktikan betapa kasih sayang Mamak sangat luar biasa, mampu meluluhkan anak keras kepala seperti Bidal yang sedang cari perhatian.

Ada hal baru yang kita temukan dalam buku ini, yang mungkin tidak

ditemukan dalam buku bang Tere yang sebelumnya. Apa hal baru itu? Bisa kita baca sendiri dalam buku ini dan juga buku sebelum-sebelumnya. Silakan kamu baca sendiri bukunya, dan temukan betapa Tuan Guru seorang tokoh masyarakat yang memegang teguh prinsip untuk kebaikan semua warga.

Kita bisa membayangkan seandainya semua orang berpengaruh melakukan apa yang dilakukan Tuan Guru, betapa kerennya pengaruh baik digunakan untuk kebaikan bersama. Apakah itu? Penasaran kan? Mari, kita baca novel Si Anak Savana.

Beberapa plot *twist* yang cukup menarik dalam novel ini di antaranya ketika menceritakan dalang dari pencuri sapi. Juga kehebatan kuda yang dijuluki Angin Timur, lewat insting-nya

yang tajam mampu menyelamatkan tokoh yang disegani ketika beliau disekap di sebuah tempat.

Ada banyak pesan moral yang disampaikan dalam buku ini yang tidak bisa dituliskan satu-persatu dalam ulasan singkat ini, baik tentang mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahan. “Janji itu masih terpatri, aku harus menebus kesalahanku. Maka jadilah aku anak yang paling rajin.” Wanga. Juga tentang saling tolong menolong antara teman juga tetangga, tentang belajar bisa di mana saja, dan masih banyak lagi.

Oke, sedikit ulasan diatas tentu akan membuat kita semakin penasaran dengan kisah Wanga dan kawan-kawanya di lingkungan Savana. Lalu bagaimana kisah selengkapnyanya? Ada baiknya kita baca novelnya.

MEMIKAT EKSPATRIAT DENGAN SUARA ANGKLUNG

Indonesia memiliki beragam alat musik tradisional, di antaranya ada kecapi, gamelan, calung, krinding, sasando, dan angklung. Masing-masing memiliki keunikan suara sendiri-sendiri. Bukan hanya warga lokal yang mempelajari alat-alat tradisional ini, melainkan banyak juga ekspatriat yang datang ke Indonesia khusus mempelajarinya.

Salah satu alat musik tradisional yang banyak dipelajari warga asing adalah angklung. Angklung berasal dari tanah Sunda (Jawa Barat), yang dimainkan dengan cara digoyangkan sehingga timbul bunyi dari bambu yang saling berbenturan. Memainkan alat musik ini bisa terbilang mudah, tapi juga bisa sulit.

Pasalnya, angklung termasuk alat musik multitonal (bernada ganda) yang perlu tehnik tersendiri untuk mempelajari pengaturan nadanya. Alat musik tradisional ini telah diakui UNESCO sejak 2010 sebagai karya agung warisan budaya lisan dan nonbendawi manusia. Kepopulerannya sudah diakui masyarakat dunia, sehingga banyak pecinta seni tradisional dari negara lain datang ke Indonesia untuk mempelajarinya.

Ketua Musyawarah Guru Mata

Pelajaran (MGMP) Seni dan Budaya Kodya Jakarta Selatan Nanang Mulyana mengatakan, angklung adalah satu dari sekian produk budaya masyarakat Indonesia yang diakui hak patennya oleh UNESCO. Ia telah ada sejak Kerajaan Sunda tegak berdiri di tanah Jawa. Sebelum memiliki fungsi sebagai alat musik, angklung merupakan media penggugah semangat dalam pertempuran.

Fungsi angklung sebagai pemompa semangat rakyat masih terus terasa sampai pada masa penjajahan. Hal itu menjadi faktor mendasar bagi pemerintah Hindia Belanda saat itu melarang masyarakat menggunakan angklung. Akibat kebijakan pelarangan itu, popularitas angklung sempat menurun dan hanya dimainkan anak-anak pada waktu itu.

Meski angklung populer di kancah internasional, namun sesungguhnya di dalam negeri sendiri kurang mendapat perhatian serius. Mestinya warisan budaya leluhur ini diprioritaskan perhatiannya agar di masa mendatang tetap terpelihara. Jika tidak ada yang mau belajar, lama-lama alat musik tradisional ini terlupakan dengan sendirinya.

“Harus diakui bahwa musik



angklung belum begitu diminati warga lokal sendiri. Hanya beberapa komunitas yang mempelajarinya, padahal banyak juga orang asing yang datang ke Indonesia dengan tujuan supaya bisa memainkan alat musik angklung,” kata Nanang.

Selama ini, banyak warga asing seperti dari Jepang, Malaysia, China, dan beberapa negara Eropa datang ke Indonesia untuk belajar angklung. Mereka melihat bahwa warisan budaya yang sudah ada sejak abad ke-12 ini memiliki keunikan yang tak dimiliki bangsa lain.

Bahkan tak sedikit di antara warga



Harus diakui bahwa musik angklung belum begitu diminati warga lokal sendiri. Hanya beberapa komunitas yang mempelajarinya, padahal banyak juga orang asing yang datang ke Indonesia dengan tujuan supaya bisa memainkan alat musik angklung."

Nanang Mulyana

asing itu yang mengatakan bahwa suara yang dihasilkan dari angklung memiliki nuansa mistis. Alasannya, karena kemunculannya berawal dari ritus padi. Angklung diciptakan dan dimainkan untuk memikat Dewi Sri turun ke bumi agar tanaman padi rakyat dapat tumbuh subur.

Kepercayaan ini diyakini lebih dari 400 tahun yang lalu, dan hingga sekarang alat musik ini terkadang masih dimainkan sebagai bagian dari ritus memanen padi. Bagi masyarakat Jawa Barat, warisan budaya ini merupakan kebanggaan yang mesti terus dilestarikan dengan mengajarkan

kepada anak-anak mereka.

Di era modern seperti sekarang ini, di mana seni pertunjukan panggung kian hari kian diminati publik, maka angklung pun hadir turut meramaikan. Tak jarang di acara pementasan musik maupun di kegiatan kenegaraan, angklung kerap dimainkan kalangan seniman muda untuk memberikan hiburan para tamu.

"Sayangnya, materi seni dan budaya yang mengajarkan tentang angklung di muatan lokal, kurang begitu menarik minat siswa-siswa sekolah," jelas Mohammad Aminudin, salah satu guru seni dan budaya di Malang.

Keterbatasan alat musik dan pengajar yang handal di bidang ini masih menjadi kendala di banyak sekolah. Akibatnya, banyak siswa sekarang yang tidak memiliki keterampilan memainkan angklung. Ke depan, pemerintah mesti menyiapkan tenaga atau SDM khusus yang mampu menguasai seni-seni tradisional agar keberadaannya tidak hilang digerus zaman.

Merebaknya budaya hedon di kalangan remaja saat ini menjadi ancaman nyata bagi eksistensi warisan budaya yang telah terjaga berabad-abad lamanya. Jika saat ini mereka melupakan semua itu, maka dalam setengah atau satu abad yang akan datang maka segala "peninggalan" leluhur tersebut tidak akan bisa ditemukan lagi. **Naf**

INTRIK LOGIKA PENGUASA



Oleh: Achmad San
Editor Bahasa Jawa Pos

Modus manipulasi kekuasaan yang dilakukan pemerintah bisa terwujud dalam beragam corak. Lewat bahasa kiasan, misalnya, modus itu dapat diejawantahkan dalam rupa eufemisme, metafora, metonimia, hingga pars prototo atau totem proparte. Modus ideologi juga bisa menyusup ke dalam peranti kebahasaan lain, seperti nominalisasi, leksikalisasi, pemasifan, penegasian, dan modalitas.

Eufemisme, kita tahu, kerap dipakai untuk memperhalus sebuah keadaan sehingga apa yang ditangkap pendengar tidak sama dengan keadaan sesungguhnya. Metafora setali tiga uang. Ia, dalam ranah politik, sering digunakan untuk mengonkretkan maksud konsep yang abstrak sekaligus disalahgunakan dalam rangka mengaburkan maksud si penyampai pesan.

Nominalisasi terjadi manakala kalimat atau bagian kalimat, deskripsi tindakan, dan seluruh partisipan yang ada di dalamnya berubah menjadi kata benda. Adapun pemasifan muncul ketika kata kerja aktif dialihkan

menjadi bentuk pasif. Kedua modus ini tak lain bertujuan untuk menyembapkan peran aktor atau agensi.

Singkatnya, lewat kendaraan kata-kata, selalu ada dalih untuk melakukan pembenaran atas segala keputusan yang dibuat. Teranyar, modus itu menyeruak tatkala pemerintah – lewat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)– menggulirkan revisi aturan penerimaan jaminan hari tua (JHT) melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, *Jaminan Kematian*, dan *Jaminan Hari Tua*. Disambut gaduh di mana-mana, kebijakan yang salah satu isinya tentang JHT baru bisa dicairkan pekerja saat usia tepat 56 tahun itu lantas diminta untuk diperbaiki oleh presiden.

Pada akhirnya sang menteri memang “melunak”: pencairan JHT kembali menggunakan cara lama sekaligus merevisi permenakernya. Tapi, di sinilah lagi-lagi masalahnya. Buruh menganggap sang menteri sedang menggunakan kata-kata bersayap. Kata-kata bersayap ini adalah “bilanganya begini maksudnya

begitu”, kata Sapadi Djoko Damono. Adapun menurut Seno Gumira Ajidarma, kata-kata bersayap muncul jika Anda sulit berterus terang, padahal harus menyampaikan sesuatu. Karena itu, sampai tulisan ini dibuat, problem kebijakan tersebut belum sepenuhnya klar.

Sebagaimana kebijakan-kebijakan lain yang bersinggungan langsung dengan rakyat, apabila diputuskan secara sembrono, hasilnya pasti acakadut. Reaksi penolakan, tentu saja, terjadi di segala lini, dari mahasiswa hingga buruh itu sendiri. Tak sedikit yang menilai uang mereka tengah “ditahan” untuk kepentingan pemerintah. Tapi, menteri tenaga kerja sebagai penanggung jawab berdalih bahwa aturan yang dibikinnya demi kepentingan masyarakat.

Di sinilah, meminjam istilah J.B. Thompson, legitimasi itu terjadi. Pemerintah selalu memakai objek masyarakat sebagai alasan untuk merasionalkan kebijakannya, padahal masyarakat sendiri tidak sependapat. Lantas, masyarakat mana yang dimaksud?

”Justru hal ini wujud dari komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh dari segala tahapan kehidupan peserta. Pada saatnya nanti peserta akan memasuki hari tua. Dalam kondisi ini, harapannya peserta masih mempunyai dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, tujuan tersebut tidak akan pernah tercapai bila dana untuk masa tua tersebut sudah diambil semuanya sebelum datangnya hari tua,” kata sang menteri, Ida

Fauziyah, ihwal alasan menerbitkan kebijakannya kala itu (12/2/2022).

Alasan-alasan yang dipamerkan sang menteri seakan-akan memang terlihat rasional, tapi kenyataannya tidaklah demikian menurut Tri Guntur Narwaya dalam bukunya, *Logika, Bahasa, dan Modus Kuasa*. Guntur mengistilahkan perilaku seperti itu sebagai logika strategi rasionalisasi.

Modus tersebut dipakai sang menteri, dan umumnya pejabat lain yang sejenis, sebagai landasan legitimasi yang dibangun melalui seperangkat artikulasi pemikiran yang berusaha mempertahankan sekaligus menjustifikasi seperangkat relasi atau institusi sosial. Caranya, membujuk khalayak, dalam hal ini pekerja/buruh, agar memberikan dukungan atau minimal memercayai kebijakan yang telah dikeluarkan.

Modus seperti ini, yakni menjadikan rakyat sebagai alasan pembenaran, sebetulnya sudah usang. Kasus serupa pernah terjadi pada kebijakan pencabutan (pemerintah galib menggantinya dengan istilah pengalihan) subsidi bahan bakar minyak bagi rakyat. Alasannya pun tidak tunggal. Misalnya, subsidi akan dialokasikan kepada mereka yang berhak alias masyarakat kurang mampu.

Ada pula alasan subsidi akan dialihkan untuk pemangkasan anggaran dan prioritas sasaran pembangunan. Padahal, yang akan dirugikan, tentu saja, justru rakyat lagi. Namun, karena narasi yang dibangun mengesankan banyak sisi positifnya ketimbang sisi negatifnya, masyarakat mau tidak mau akhirnya menerima kebijakan tersebut.

Trik-trik rasionalisasi semacam itu memang paling gampang untuk meluluhkan hati rakyat. Logika-

logika yang dibikin rumit dan jelimat yang membuat masyarakat terpaksa berkeputusan: "ya sudahlah masa bodoh".

Biasanya, meskipun disambut kontra luar biasa hingga demonstrasi pun, pemerintah tetap bergeming. Lihat saja yang terjadi pada Undang-Undang Cipta Kerja. Gelombang unjuk rasa di mana-mana toh tak mampu melawan pemerintah dengan segala otoritas yang dimilikinya. Karena itu, kendati bakal ada revisi setelah adanya perintah atasan, sang menteri, barangkali, tidak akan mengubah banyak materi. Sebab, mengutip pendapat Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini, revisi JHT tetap menjadi domain Kemenaker.

Belum kelar urusan JHT, rakyat kini kembali "direpotkan" dengan kebijakan pemerintah lainnya: Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan. Mulai urusan jual beli tanah sampai layanan kepolisian (SIM, STNK, SKCK), kini semuanya wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. Bukan cuma itu, haji dan umrah pun wajib memakai BPJS Kesehatan. Tak tanggung-tanggung, kebijakan itu diperintah langsung oleh kepala negara lewat jalan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Terang saja, sebagaimana kebijakan lain yang bersinggungan dengan masyarakat, beleid ini menghasilkan gelombang protes, meskipun tidak sederas penolakan terhadap polemik JHT tadi. Banyak kalangan yang resah kewajiban ini bakal kian membebani masyarakat. Tapi, dengan alasan demi kepentingan rakyat, gelombang protes bakal terbentur tembok tebal pemangku kebijakan yang mengklaim

punya legitimasi kepemimpinan.

Dan, setelah ini, gelombang protes yang lebih semarak lagi mungkin akan terjadi setelah wacana (atau sudah masuk usulan) para demagog tentang penundaan pemilu belakangan berseliweran menghiasi media massa maupun media sosial. Penundaan yang tentu saja berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden, DPR, dan jabatan-jabatan politik lainnya.

Lagi-lagi, ada saja modus rasionalisasi yang disuguhkan kepada publik. Mulai pandemi yang masih menerunghu, perekonomian yang belum membaik, hingga masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan usaha-usaha yang gulung tikar. Dan, siapa lagi kalau bukan masyarakat yang dijadikan alasan pembenaran untuk memuluskan dan melanggengkan praktik kekuasaan semacam itu.

Padahal, menurut para pengamat, jika hal itu terealisasi, prosesnya akan jauh lebih panjang nan rumit. Seperti kata pakar tata negara Yusril Ihza Mahendra, apabila pemilu diundur, yang bisa dilakukan hanya tiga alternatif: amendemen UUD 1945, dekret presiden, atau sistem presidensial. Bukan tidak mungkin para elite bakal ketagihan terus dengan jabatan politik yang diembannya saat ini. Sebuah kondisi yang berpotensi menghidupkan kembali rezim otoritarianisme Orde Baru jilid II.

Seyogianya, untuk hal-hal yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, merekalah yang diajak berdialog lebih dahulu. Bukan malah menjadikan rakyat sebagai alasan yang dibuat-dibuat demi kepentingan para penghamba politik. Tapi, saya hampir lupa, memang seperti itulah legitimasi dan logika penguasa bekerja. (*)

CRISTIANO RONALDO

PESAN CHRISTIANO RONALDO UNTUK PERANG RUSIA-UKRAINA

Ketegangan Rusia-Ukraina semakin tak terelakkan. Semakin banyak korban berjatuhan, baik korban dari pasukan tentara maupun masyarakat sipil. Tak hanya gudang persenjataan yang dirudal, tetapi juga apartemen, gedung perkantoran, serta fasilitas umum lainnya. Sejak hari ketiga perang dimulai, tentara Rusia telah mengobrak-abrik Ibu Kota Ukraine, Kiev.

Tak pelak, invasi Rusia terhadap Ukraina tersebut mendapatkan atensi dari berbagai pihak, tak terkecuali dari para selebritas dunia. Salah satu figur yang berempati terhadap perang tersebut adalah Cristiano Ronaldo.

Penyerang Manchester United tersebut turut menyoroti perang antara Rusia dan Ukraina. Dia menyerukan perdamaian di dunia demi masa depan generasi mendatang.

Perang Rusia-Ukraina pecah setelah Persiden Rusia, Vladimir Putin memerintahkan pasukan militernya untuk menyerbu Ukraina pada Kamis (24/2).

Sejak itu, konflik bersenjata antara kedua negara tak terhindarkan. Banyak tentara dan warga sipil yang dilaporkan menjadi korban dari peperangan yang masih terus berlanjut itu.

Berbagai pihak telah mengecam keputusan Rusia untuk menginvasi Rusia, tak terkecuali para pesepak bola. Cristiano Ronaldo jadi salah satu orang yang juga tak setuju dengan konflik Rusia-Ukraina.

Ronaldo menyampaikan pandangannya lewat media sosial Instagram. Melalui fitur Instagram Story, dia menyampaikan pesan menyentuh demi perdamaian dunia.

“Kita perlu menciptakan dunia yang lebih baik untuk anak-anak kita. Berdoa untuk perdamaian di dunia kita,” tulis Cristiano Ronaldo, Sabtu (26/2/2022).

Dampak invasi Rusia terhadap Ukraina sangat terasa diberbagai aspek salah satunya olahraga. Khusus di sepak bola, UEFA bahkan telah resmi memindahkan tuan rumah final Liga Champions 2021/2022 dari Rusia ke Prancis.

Sebelumnya, final Liga Champions musim ini akan berlangsung di Gazprom Arena, Saint Petersburg, Rusia. Namun, konflik yang tengah terjadi memaksa

UEFA memindahkannya ke kandang timnas Prancis, Stade de France. **Naf**



Saat ini dunia sedang dihebohkan dengan perseteruan antara negara Rusia dan Ukraina karena sedang terlibat perang. Bahkan kedua negara tersebut masih terus menjadi perbincangan hangat di media-media. Namun ternyata di balik itu, publik perlu mengetahui bahwa ada sederet artis cantik asal Ukraina yang mewarnai dunia hiburan bahkan ada yang sudah go internasional dan menjadi artis Hollywood.

Deretan artis cantik asal Ukraina dikenal dengan paras mereka yang cantik dan sudah memainkan film-film Hollywood yang laris dan terkenal. Menjadi artis Hollywood memang menjadi sesuatu yang membanggakan karena sekaligus mereka dapat mendongkrak negaranya menjadi lebih dikenal dunia juga.

Salah satu artis berdarah Ukraina adalah Katheryn Winnick. Dia merupakan actor perempuan yang berperan sebagai Lagertha dalam serial Viking. Dia dengan mudah lulus sebagai Skandinavia, berkat mata biru dan rambut pirangnya, tentu saja kualitas aktingnya yang sangat memikat penggemarnya.

Winnick sebenarnya lahir dan dibesarkan oleh orang tuanya yang merupakan imigran dari Ukraina. Bahasa Ukraina menjadi bahasa pertamanya. Winnick telah mengumumkan tentang kedaulatan Ukraina, memposting dukungannya di media sosial dan menulis, "Saya mendukung Tanah air saya, Ukraina."

Ketika perang antara Rusia-Ukraina benar-benar terjadi pekan terakhir Februari lalu, Winnick menyesalkan hal itu bisa terjadi. "Saya sakit hati.

Saya sangat taku, (perang) itu mengerikan," katanya di laman media sosial pribadinya, Minggu (27/2).

Dia sangat terus terang menunjukkan dukungannya terhadap Ukraina. Meski tidak dilahirkan di Ukraina, namun keluarga besarnya berkebangsaan Ukraina.

Winnick menyuarakan kepada masyarakat dunia supaya berani berbicara menentang invasi Rusia ke Ukraina. "Kita semua harus bersatu sebagai satu dunia dan menghentikan perang ini," ungkap Winnick, dikutip dari *people.com*, Minggu (27/2).

Saat ini, dia percaya "tidak ada yang lebih penting" daripada berbicara dan menyebarkan kebenaran di balik krisis di Ukraina.

"Jika Anda orang Ukraina atau bukan, saya pikir semua orang harus berbicara demi kemanusiaan," jelas Winnick. "Dunia layak untuk dapat berbicara dan mendukung Ukraina demi memiliki negara yang damai." **Naf**

WINNICK

**"SAYA MENDUKUNG
TANAH AIR SAYA"**



MEDIA SOSIAL DAN IRONI LITERASI KITA



Oleh;
Nafik Muthohirin
Dosen Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang

SEBAGIAN di antara kita, atau bahkan setiap dari kita, (mungkin) pernah menerima pesan dalam bentuk artikel atau gambar yang bernada provokatif, menyesatkan dan sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ketika menerima berita-berita palsu (*hoax*) yang demikian itu, rasa jengkel sudah pasti kita rasakan.

Sayangnya, banyak artikel atau gambar berita palsu seperti itu terus memenuhi jejaring sosial yang ada sekarang, dan ironisnya banyak orang yang memberi komentar dan mempercayainya. Padahal, sumber dan data informasi yang disajikan tak lebih dari sekedar bohong.

Mencermati fenomena yang demikian, satu pertanyaan yang patut kita ajukan, yaitu kenapa banyak orang mudah percaya terhadap berbagai berita *hoax*, bahkan ikut-ikutan menyebarkannya, padahal

infrastruktur yang menjamin ketersediaan informasi sudah cukup berlimpah di era teknologi informasi seperti saat ini?

Peran Media Sosial

Menurut riset terbaru dari DataReportal menunjukkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia mencapai 191,4 juta pada Januari 2022. Dalam laporan bertajuk *Digital 2022: Indonesia*, DataReportal itu membeberkan bahwa angka ini setara dengan 68,9 persen dari total populasi di Indonesia. Sebagai perbandingan, jumlah penduduk di Indonesia kini mencapai 277,7 juta hingga Januari 2022. Jumlah pengguna YouTube mencapai 139 juta orang, Facebook ada 129,9 juta, Instagram mencapai 99,15 juta, dan TikTok ada 92,07 juta.

Dengan keberadaan 191,4 juta netizen itu, kita bisa bayangkan bagaimana sesaknya perbincangan

di jejaring sosial, seperti *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, *TikTok*, dan *YouTube*. Dengan sekali klik, tanpa berfikir panjang, artikel atau gambar-gambar *hoax* itu diproduksi demi menaikkan peringkat situs tertentu, atau sengaja dibuat untuk menjatuhkan orang dan kelompok tertentu. Ironisnya, setiap individu dengan mudahnya memviralkan berbagai artikel dan gambar tersebut, sehingga seringkali memicu kebencian.

Dengan demikian, hampir tidak ada batasan moral, etika, sopan dan santun yang bisa diterapkan di dunia yang banyak digemari anak-anak muda tersebut. Maka tidak heran, bila hari-hari ini, dengan sangat mudahnya ujaran kebencian dan kata permusuhan itu kita jumpai di berbagai saluran media sosial. Yang awalnya teman lama, karena berbeda pilihan politik atau pandangan terhadap tafsir agama tertentu, kemudian menjadi saling olok dan caci maki di media sosial.

Jelas saja, penggunaan media sosial yang penuh dengan potret kebencian ini jauh dari asas kemanfaatan. Kehadiran media dalam jaringan yang mulanya bisa menjadi alat bagi masifitas gerakan sosial baru, seperti yang sudah terjadi di sejumlah negara di Timur Tengah, malah belum berperan sebagaimana mestinya di Indonesia. Masih banyak kita temukan artikel bodong yang menyudutkan kelompok, agama, dan penganut

keyakinan tertentu; serta ungkapan peyoratif yang menjatuhkan harga diri sebuah pemerintahan di jejaring sosial.

Bersemainya artikel-artikel bodong (terutama yang berbasis keagamaan) dan maraknya ujaran kebencian yang dengan mudah kita jumpai di media sosial mengindikasikan satu hal, yakni rendahnya tingkat literasi di negeri ini. Meski berbagai infrastruktur yang mendukung, seperti perpustakaan, koran, toko buku, *e-paper* dan *e-journal*, telah banyak tersedia, namun kenyataan hari ini menggambarkan masyarakat kita tetap enggan membiasakan diri melakukan pembacaan secara berulang dan menyeluruh atas setiap informasi yang diterima.

Kondisi ini sangat ironis, mengingat akses internet di Indonesia relatif cepat dan setiap individu senantiasa terhubung dengan *mobile phone*, serta ketersediaan komputer juga sangat mencukupi. Kemudian, sebagaimana data *DataReprtal 2022* bahwa hampir setiap setengah jam sekali orang memeriksa media sosial mereka. Jadi, bukan soal ketersediaan akses mendapatkan bahan bacaan yang menjadi persoalan utama bangsa kita menjadi *illiterate*, tapi lebih pada sikap malas yang merajalela dan membludaknya perilaku instan.

Tak pelak, data *World's Most Literate Nation*, yang disusun oleh Central



Setiap pandangan pertama yang kita terima, mesti diikuti dengan pandangan kedua; setiap *first look* harus diikuti dengan *second look* supaya kita dapat menyingkap hijab-hijab kebenaran yang dimaksud (Zaprul Khan: 2016).

Connecticut State University belum lama ini membelalakkan mata kita semua. Laporan hasil riset tersebut menyebutkan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia berada di peringkat ke-60 dari 61 negara yang diteliti. Indonesia berada di urutan paling belakang nomor dua setelah Botswana, negara di kawasan selatan Afrika.

Laporan tersebut juga mengungkapkan, bahwa bangsa

yang masuk dalam kategori *illiterate*, masyarakatnya cenderung suka mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar, berperilaku brutal dan suka merusak, serta kerap melanggar hak asasi manusia. Miris, karena perilaku-perilaku tersebut dengan mudah kita jumpai di negeri ini sekarang, baik yang berada di dunia nyata maupun maya.

Dengan berbagai infrastruktur yang tersedia, baik jaringan internet maupun perpustakaan dan toko buku yang berjubel, mestinya masyarakat Indonesia bisa bersanding dengan sejumlah negara yang masuk pada peringkat atas sebagai negara yang sadar literasi, seperti Finlandia, Norwegia, Islandia atau Denmark, kemudian bersikap kritis terhadap berbagai pemberitaan atau berita palsu yang beredar di media sosial.

Untuk menyikapi fenomena yang elegis ini, ada baiknya kita kembali mempelajari filsafat fenomenologi, yang mengajarkan kepada kita supaya senantiasa bersikap kritis dan konfirmatif terhadap setiap informasi, pandangan dan paradigma pemikiran yang kita terima. Sebagaimana perkataan Edmund Husserl, bahwa setiap pandangan pertama yang kita terima, mesti diikuti dengan pandangan kedua; setiap *first look* harus diikuti dengan *second look* supaya kita dapat menyingkap hijab-hijab kebenaran yang dimaksud (Zaprul Khan: 2016).

BNI Taplus Bisnis **Bisnis Laris Pakai QRIS**

Bonus Cashback

Rp **250**
Ribu

Bonus

POIN+

Klik Disini



1500046
BNI Cici